



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



BIDANG STUDI:
KETAHANAN NASIONAL

TAHUN 2024

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



BIDANG STUDI KETAHANAN NASIONAL

2024

MATERI POKOK BIDANG STUDI KETAHANAN NASIONAL

Penulis : Tim Pokja Bahan Ajar BS. Tannas

1. Mayjen TNI (Purn) Hari Mulyono, S.E., M.M.
2. Marsda TNI (Purn) Supriharsanto
3. Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, S.I.P.
4. Mayjen TNI (Purn) Ir. Sary Sutaat
5. Mayjen TNI (Purn) M. Nasir Madjid, S.E.
6. Prof. Dr. Miyasto, S.U.

ISBN : 978-602-14873-6-5

Cetakan : Tahun 2024

Penerbit : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat

Editor : Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan
Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit



**GOVERNOR
NATIONAL SECURITY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA**

SAMBUTAN

Bahan Ajar (Hanjar) merupakan salah satu instrumen pokok dalam setiap pendidikan, seperti pendidikan di Lemhannas RI yang menyelenggarakan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA), serta Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA). Bahan yang disesuaikan dengan kurikulum PPRA, PPSA, dan P3DA ini diharapkan akan dapat menghasilkan kompetensi lulusan yang diinginkan. Oleh karenanya, penyediaan Hanjar dengan isi dan kualitas yang baik senantiasa menjadi perhatian yang utama bagi Lemhannas RI.

Dihadapkan pada dinamika tantangan dan kebutuhan kompetensi lulusan pendidikan, Lemhannas RI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Hanjar. Peningkatan kualitas ini dilakukan melalui kajian-kajian mendalam yang dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Hanjar yang ditunjuk, dengan melibatkan personel yang sesuai dengan kompetensinya di Bidang Studi (BS) masing-masing dan beranggotakan dari dalam maupun luar Lemhannas RI.

Melalui Hanjar BS. Inti yang di dalamnya mencakup materi-materi BS. Empat Konsensus Dasar Bangsa (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika), BS. Wawasan Nusantara, BS. Ketahanan Nasional, BS. Kewaspadaan Nasional, BS. Sistem Manajemen Nasional serta BS. Kepemimpinan, diharapkan lulusan pendidikan Lemhannas RI di samping memiliki kompetensi menjadi pemimpin negarawan dan visioner juga menjadi pemimpin yang memiliki karakter kepemimpinan strategis. Sesungguhnya kompetensi inilah yang saat ini dan ke depan dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, agar mampu mengelola kehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di era globalisasi persaingan antar bangsa-bangsa di dunia.

Akhirnya, saya selaku Pelaksana Tugas Gubernur Lemhannas RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Tim Pokja Penyusunan Hanjar ini. Semoga Hanjar ini dapat memperluas cakrawala pandang dan meningkatkan kompetensi kepemimpinan peserta lulusan Lemhannas RI sebagaimana seperti yang diharapkan, serta bermanfaat bagi semua pihak, baik yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Lemhannas RI maupun masyarakat akademik lainnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk serta perlindungan kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Jakarta, Januari 2024

Plt. Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia,



Maman Firmansyah
Laksamana Madya TNI

KATA PENGANTAR

DEPUTI PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan petunjuk dan rahmat-Nya, Kelompok Kerja Enam Bidang Studi Inti (Pokja 6 BSI) telah menyusun Bahan Ajar (Hanjar) yang akan dipergunakan sebagai materi Hanjar bagi para peserta pendidikan yang diselenggarakan oleh Kedeputan Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI.

Hanjar 6 BSI ini sebagai panduan bagi Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Profesional, Narasumber, Alumni Lemhannas RI dan para peserta pendidikan yang secara substansial telah disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi, tujuan, dan sasaran pendidikan Lemhannas RI. Namun disadari, naskah ini belum sempurna sehingga diharapkan saran dan masukan dari para pembaca.

Akhirnya disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh Pokja 6 BSI yang telah mencurahkan waktu dan pemikirannya dalam menyusun Hanjar ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Jakarta, Januari 2024

Deputi Pendidikan
Pimpinan Tingkat Nasional,



Andi Heru Wahyudi
Marsekal Muda TNI

DAFTAR ISI

SAMBUTAN GUBERNUR LEMHANNAS RI	iii
KATA PENGANTAR DEPUTI PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL LEMHANNAS RI	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN	1
1. Umum	1
2. Maksud dan Tujuan	2
a. Maksud	2
b. Tujuan	2
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut	2

BAB II GEOSTRATEGI INDONESIA	3
4. Umum	3
5. Pengantar Geostrategi Indonesia	4
a. Arti dan Hakikat Geostrategi Indonesia	4
b. Karakteristik Geografi Indonesia	7
c. Dampak Karakteristik Geografi Indonesia	12
6. Pandangan Geostrategi Indonesia	19
a. Geostrategi dalam Tatahan Pemikiran di Indonesia	19
b. Geostrategi Indonesia dalam Mewujudkan Cita-Cita Proklamasi	27

BAB III KETAHANAN NASIONAL	41
7. Umum	41
8. Filosofi Ketahanan Nasional Indonesia	41
a. Latar Belakang	41
b. Landasan Idiil Pancasila	43
c. Landasan Konstitusional UUD NRI Tahun 1945	44
d. Landasan Konseptual Wawasan Nusantara	44

9.	Pengantar Ketahanan Nasional	45
a.	Pengertian Ketahanan Nasional	45
b.	Hakikat Ketahanan Nasional dan Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional	46
c.	Asas Ketahanan Nasional	47
d.	Sifat, Kedudukan, dan Fungsi Konsepsi	48
10.	Dasar, Perincian, dan Hubungan Gatra	50
a.	Dasar Pemikiran Astagatra	50
b.	Perincian Astagatra	53
c.	Hubungan Antargatra dalam Astagatra	53
11.	Konsepsi Ketahanan Nasional	56
a.	Gatra Geografi	56
b.	Gatra Demografi/Kependudukan	59
c.	Gatra Sumber Kekayaan Alam	61
d.	Gatra Ideologi	64
e.	Gatra Politik	68
f.	Gatra Ekonomi	78
g.	Gatra Sosial Budaya	83
h.	Gatra Pertahanan dan Keamanan	86
i.	Implementasi Konsepsi Ketahanan Nasional dalam Pembangunan Nasional	92
BAB IV	SISTEM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL	103
12.	Model Pengukuran Ketahanan Nasional	103
a.	Aspek, Variabel dan Indikator dalam Gatra	108
b.	Makna Hasil Pengukuran	108
13.	Pengembangan Instrumen Pengukuran	109
14.	Bentuk Keluaran (<i>Output</i>) Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional	110
BAB V	PENUTUP	127
	DAFTAR PUSTAKA	129

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Geostrategi merupakan manifestasi kesadaran ruang (*space consciousness*) setiap negara yang digunakan sebagai acuan untuk merumuskan cara terbaik untuk mengembangkan kekuatan yang telah dimiliki menjadi kekuatan yang lebih besar sehingga negara memiliki kemampuan yang lebih baik guna menghadapi ancaman yang mungkin timbul, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Geostrategi memiliki hubungan langsung dengan geopolitik dalam arti bahwa konsepsi yang dirumuskan dalam geostrategi harus didasarkan pada tujuan yang dirumuskan dalam geopolitik. Berkaitan dengan negara Indonesia, geostrategi Indonesia merupakan cara Indonesia mengembangkan kekuatannya berdasarkan konstelasi geografis melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita nasional sesuai yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yaitu kehidupan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Geostrategi Indonesia merupakan dasar perumusan ketahanan nasional Indonesia, khususnya terkait dengan konsepsi ketahanan nasional.

Ketahanan nasional merupakan salah satu doktrin nasional yang harus dibina dan dikembangkan secara terus-menerus sehingga mampu meningkatkan kekuatan nasional melalui pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu, konsepsi ketahanan nasional harus diimplementasikan dalam kehidupan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga proses kehidupan tersebut dapat menghasilkan tingkat kehidupan yang lebih baik yang disebut sebagai tingkat kondisi ketahanan nasional. Sehubungan dengan itu, ketahanan nasional memiliki hubungan timbal balik dengan pembangunan nasional dalam arti tingkat kondisi ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong keberhasilan pembangunan nasional dan sebaliknya, pembangunan nasional yang berhasil guna akan meningkatkan tingkat kondisi ketahanan nasional.

Dalam pelaksanaannya, implementasi konsepsi ketahanan nasional dalam pembangunan nasional harus didasarkan pada nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika (BTI). Sehubungan dengan itu, hasil dan pembangunan nasional sebagai suatu proses kehidupan harus terukur sesuai parameter-parameter yang telah dirumuskan. Dengan

demikian, tingkat kondisi yang telah dicapai dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan nasional berikutnya.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Bahan ajar (hanjar) ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional dengan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya.

b. Tujuan

Hanjar ini digunakan sebagai dasar dan rujukan dalam mengikuti kegiatan pendidikan Lemhannas RI.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Hanjar ini melingkupi geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional dengan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Geostrategi Indonesia
- Bab III Ketahanan Nasional
- Bab IV Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional
- Bab V Penutup

BAB II

GEOSTRATEGI INDONESIA

4. Umum

Geostrategi pada dasarnya adalah sebuah rumusan strategi nasional yang didasari oleh konstelasi geografi sebagai faktor utamanya dan analisis kondisi nyata yang dihadapi. Perumusan geostrategi sangat memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung, baik internal maupun eksternal. Dalam kaidah hubungan sesama bangsa di dunia yang saling punya kepentingan, maka geostrategi sangat memperhatikan faktor perubahan lingkungan strategis baik regional maupun global. Dalam perkembangan saat ini, perwujudan geostrategi sangat dipengaruhi oleh era baru dalam percaturan dunia khususnya era globalisasi yang salah satunya berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Dunia yang dulunya hanya bisa dijelajah oleh negara tertentu, saat ini menjadi keniscayaan dengan majunya alat transportasi dan alat komunikasi, siapa saja bisa menjelajah dunia. Batas teritorial hanya menjadi kesepakatan sebuah wilayah kedaulatan, selebihnya menjadi persaingan sesuai kepentingan masing-masing.

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang geografinya berbentuk kepulauan (terdiri dari ±17.499 pulau), terletak di khatulistiwa dan memiliki posisi strategis karena terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang merupakan salah satu bagian dari jalur transportasi dan perdagangan internasional. Selain itu Indonesia juga kaya akan sumber kekayaan alam (SKA), baik yang ada di darat, laut maupun di udara (sebagian orbit geostasioner dunia). Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan kalau wilayah Indonesia menjadi incaran untuk dipengaruhi, atau dijajah, atau dikuasai oleh negara-negara lain sejak zaman Kaisar Khoe Bee Laikhan hingga saat ini. Pada masa kini, penjajahan atas sebuah negara atau bangsa tidaklah populer dan pasti akan mendapat tentangan secara internasional, namun tindakan mempengaruhi atau menguasai secara tidak langsung dalam berbagai aspek kehidupan nasional sering kali dilakukan oleh negara atau bangsa yang merasa lebih superior terhadap bangsa atau negara lain yang dianggap inferior.

Pandangan bangsa Indonesia tentang geostrategi berbeda dengan pandangan klasik bangsa lain umumnya, di mana pada umumnya memandang geostrategi merupakan perwujudan atau tindakan nyata suatu bangsa sesuai keinginan politiknya (lazim disebut geopolitik) di bidang politik didukung kekuatan militer. Bangsa Indonesia

memandang bahwa geostrategi adalah suatu strategi besar nasional yang berisi panduan untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam segenap aspek kehidupan bangsa (geografi, demografi, SKA, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan) dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional.

5. Pengantar Geostrategi Indonesia

a. Arti dan Hakikat Geostrategi Indonesia

Dalam mempelajari dan memahami geostrategi Indonesia, diperlukan adanya satu kesamaan pengertian atau persepsi tentang penggunaan istilah geostrategi hubungannya dengan geografi dan pengertian strategi dalam pencapaian tujuan politik.

Geopolitik dan geostrategi kedua-duanya menggunakan kata geo yang dikaitkan dengan perkembangan ilmu tentang pentingnya geografi bagi suatu negara. Ilmu geografi adalah ilmu dasar tentang geografi, baik keterkaitannya dengan ilmu pengetahuan alam (IPA), ilmu pengetahuan sosial (IPS), maupun yang berkaitan dengan politik dan strategi.

- 1) Ilmu geografi politik dan ilmu geografi strategi adalah suatu ilmu yang menempatkan geografi sebagai suatu pembenaran dari tujuan politik atau pembenaran strategi yang digunakan dalam pencapaian tujuan politik.
- 2) Ilmu geopolitik dan geostrategi adalah pengembangan dari ilmu geografi politik dan strategi dengan menempatkan hal-hal berikut:
 - a) Geografi analog atau identik dengan suatu negara yang dapat bertahan, menyusut dan hilang, atau mati (negara merupakan suatu organisme hidup atau entitas biologis);
 - b) Geografi sebagai ruang atau wadah kehidupan, dilihat dari sudut pandang negara (kebutuhan ruang dipenuhi melalui pendekatan kekuasaan/kekuatan);
 - c) Kebijakan dan kegiatan kenegaraan disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan konstelasi (SKKG);
 - d) Dewasa ini berkembang suatu pemikiran adanya ilmu geopolitik/geostrategi yang disesuaikan dengan tuntutan globalisasi, yaitu:
 - (1) Ilmu geopolitik/geostrategi dikembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek);

- (2) Ilmu geopolitik/geostrategi melihat negara dari sudut pandang ruang yang tanpa batas.

Untuk lebih mendalami hakikat geostrategi dipandang perlu adanya satu kesamaan pengertian tentang strategi dalam pencapaian tujuan nasional. Pada awalnya strategi adalah ilmu militer, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang dan dalam kondisi yang menguntungkan. Strategi adalah kebijakan dalam pelaksanaan (*policy in execution*). Masalah militer dan *policy* (kebijakan) adalah masalah politik;
- 2) Esensi strategi adalah cara mencapai tujuan yang ditentukan oleh politik dengan menggunakan kekuatan yang tersedia dalam lingkup tertentu. Penggunaan kekuatan militer untuk tujuan perang (strategi murni) dan kekuatan nonmiliter untuk usaha perang atau penggunaan kekuatan militer dan nonmiliter (kekuatan nasional) untuk usaha perang (strategi besar). Tujuan strategi besar adalah menang perang dan juga dalam arti “damai yang lebih baik” melalui suatu rencana yang cermat dari berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (menang pertempuran).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dinyatakan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa (bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan dalam perang dan damai (KBBI Edisi Keempat, 2008: 1340). Sehubungan dengan itu, Laksda (Purn) Soewarso, M.Sc. mendefinisikan bahwa strategi adalah pengerahan menyeluruh dari semua sumber daya untuk mengendalikan situasi, ruang, dan waktu guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa strategi pada hakikatnya merupakan suatu ilmu dan seni atau cara menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, baik untuk tujuan penyelesaian damai atau perang maupun untuk tujuan terciptanya keamanan dan kesejahteraan. Pengerahan seluruh sumber daya pada dasarnya untuk menciptakan medan juang dalam rangka mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, terutama untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam ruang juang, alat juang, dan kondisi (RAK) juang.

Ruang juang merupakan wadah dari berbagai aktivitas atau kegiatan masyarakat, baik yang berkaitan dengan tempat/wilayah atau lingkungan hidup (geografi), kebersamaan hidup (penduduk/demografi), maupun SKA yang dimiliki sebagai sumber hidup. Semua yang berada dalam ruang hidup ini, baik geografi, demografi, maupun SKA, merupakan modal dasar yang harus dipelihara, dikelola, dimanfaatkan, diarahkan, serta dikendalikan, termasuk dalam pengendalian situasi dan waktu.

Adanya modal dasar yang didukung oleh penguasaan iptek dan tegaknya kepastian hukum diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya secara tepat guna, efisien, dan efektif dalam menciptakan suatu kondisi kehidupan nasional yang diinginkan. Suatu situasi dan kondisi kehidupan dinamis yang dibangun melalui suatu rencana pembangunan yang terarah dan berkelanjutan dengan memanfaatkan modal dasar yang telah diberikan oleh Maha Pencipta (Tuhan) kepada bangsa Indonesia harus kita syukuri bersama. Untuk itu, sangat diperlukan rencana pembangunan dengan pengendalian waktu yang betul-betul diarahkan melalui penyusunan politik dan strategi nasional untuk pencapaian tujuan nasional, baik tujuan jangka panjang, jangka sedang, maupun jangka pendek.

Cara untuk mencapai atau mewujudkan tujuan nasional (politik) melalui pemanfaatan ruang negara (dengan isinya) secara tepat, dengan menggunakan seluruh kekuatan nasional yang ada, merupakan manifestasi kesadaran ruang (*space consciousness*) masyarakat bangsa secara utuh dan konsisten. Proses pencapaian tujuan nasional dapat berlangsung pada masa damai melalui medan politik dan pada masa perang melalui medan militer. Kedua-duanya sangat memerlukan medan intelijen atau kombinasi dari ketiga medan, baik masa damai maupun masa perang, seperti yang terjadi pasca serangan 11 September di New York pada saat kedua medan ini cenderung menyatu. Kesadaran ruang pertama kali digagas oleh Friedrich Ratzel yang kemudian dikembangkan oleh Rudolf Kjellen yang menganggap bahwa manusia butuh negara dan negara butuh ruang hidup. Keduanya menganggap bahwa negara seakan-akan merupakan organisme hidup (entitas biologis). Negara perlu tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan rakyatnya.

Adalah suatu kemutlakan bahwa masyarakat bangsa memerlukan lebensraum yang cukup dan merupakan tugas pemerintahan negara dalam menjaga dan menjamin pertumbuhan lebensraum. Pemikiran-pemikiran Friedrich Ratzel dan Rudolf Kjellen terus berkembang, terutama pemikiran yang dikembangkan oleh Haushofer yang tertuang dalam bukunya *Macht and Erde* yang menekankan bahwa negara sebagai salah satu organisme hidup perlu memiliki kekuatan (*power*) yang kemudian melahirkan *power concept*. Selama bertugas di Jepang, Haushofer mengembangkan *power concept* dengan nama *Dai Nippon* yang bermakna “*greater Nippon*” (Nippon terbesar) melalui satu doktrin *rich country strong army*.

NKRI yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang setiap silanya secara sendiri-sendiri bersifat universal, di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya, menggunakan strategi yang disesuaikan dengan paham bangsa Indonesia tentang perang dan damai. Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Perang dilaksanakan dalam keterpaksaan sebagai penyelesaian akhir apabila gagal secara politis. Dengan

kata lain, upaya damai melalui politik bebas aktif merupakan jalan terbaik. Perang merupakan tindakan dari kegagalan diplomasi atau politik.

Dengan dilandasi semangat Sumpah Pemuda 1928 dan didasari ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, dikembangkan prinsip-prinsip dan strategi besar dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan pencapaian tujuan nasional. Suatu prinsip yang dijadikan pegangan adalah: 1) pembinaan dan penciptaan ruang juang ditujukan untuk segenap aspek kehidupan bangsa; 2) penyusunan postur kekuatan dengan mengikutsertakan partisipasi seluruh rakyat, memanfaatkan cadangan yang terstruktur, mengarahkan dan mengendalikan ruang juang dengan arif dan bijaksana, serta memelihara persahabatan antarnegara, baik regional maupun internasional; 3) sinergitas seluruh komponen bangsa menjadi sesuatu yang mutlak.

Dalam memelihara persahabatan atau hubungan antarnegara, mantan Presiden Ir. Soekarno dalam politik luar negeri yang bebas aktif serta anti kapitalisme dan imperialisme menjalankan strategi internasionalisme. Strategi itu menekankan pada adanya kerja sama, koordinasi, solidaritas, saling sokong, dan persatuan antarsesama secara teoretis. Penjabaran strategis yang dikaitkan dengan pandangan geostrategi Indonesia tercermin dalam kemampuan pemerintahan negara untuk mengarahkan, mengelola, dan memanfaatkan seluruh sumber daya nasional sebagai modal dasar pembangunan (geografi, demografi, SKA) untuk membina dan membangun terciptanya kondisi kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan kondisi kehidupan pertahanan keamanan (hankam).

Suatu pembangunan nasional yang disesuaikan dengan strategi besar yang tepat dan mendasar, terutama untuk (1) menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, (2) berlangsungnya kelancaran dan pemerataan pembangunan, (3) otonomi yang tepat dalam menjaga persatuan dan kesatuan, serta (4) demokrasi yang sehat dan berjati diri serta taat terhadap hukum yang berlaku.

b. Karakteristik Geografi Indonesia

- 1) Bentuk wilayah NKRI berupa kepulauan dengan lautan yang ditaburi pulau-pulau dan penjorokan wilayah yang menjurus ke arah daerah tetangga seperti di lautan sekitar Natuna, di daerah Aceh, Papua, Kalimantan Timur sebelah utara, dan Sangir Talaud. Jika dilihat dari sudut pandang geostrategi, Indonesia relatif rawan. Apabila tidak diwaspadai, dimungkinkan terjadinya benturan kepentingan nasional;
- 2) Secara politis, Indonesia merupakan negara kesatuan, tetapi struktur fisiknya terdiri atas pulau-pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil yang menurut perhitungan terakhir berjumlah 17.499 buah pulau (Dishidros, TNI AL). Luas wilayah Indonesia termasuk

ZEE $\pm 7,4$ juta km^2 yang terdiri atas luas wilayah daratan 1,9 juta km^2 dan luas wilayah lautan sebesar 5,5 juta km^2 . Luas lautan ini sudah termasuk di dalamnya landas kontinen $\pm 2,8$ juta km^2 sehingga perbandingan wilayah darat dan laut ialah 1:2. Bagian barat kepulauan Indonesia terdiri atas beberapa pulau besar, sedangkan bagian timur merupakan kumpulan pulau-pulau kecil, kecuali Papua.

Wilayah Indonesia cukup luas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Wilayah seluas itu merupakan peluang besar bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Di samping akan merangsang pertumbuhan penduduk, wilayah itu juga akan memberikan peluang bagi perpindahan penduduk dari daerah-daerah yang terlalu padat penduduk ke daerah-daerah yang masih kosong atau terlalu jarang penduduknya sekaligus dapat mendukung upaya pembangunan dan pemerataan pembangunan. Dengan wilayah daratan saja, yakni sumber kehidupan masih cukup besar, peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masih terbuka lebar. Demikian pula dengan luas wilayah lautan, SKA yang berada di dalamnya sangat memberikan peluang besar bagi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Dewasa ini masih banyak yang belum dilakukan eksplorasi atau eksploitasi;

- 3) Lokasi astronomis Indonesia, yang terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur serta antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, menunjukkan bahwa Indonesia terletak relatif cukup jauh dari negara adidaya di bidang kekuatan militer (Amerika Serikat), tetapi cukup dekat dengan negara adidaya di bidang ekonomi (RRC, Jepang). Keberadaan letak Indonesia seperti ini akan berdampak positif dan negatif terhadap program pembangunan nasional di segala bidang;
- 4) Indonesia menempati dan memiliki posisi silang strategis, tidak hanya dalam arti geografis serta demografis, tetapi juga dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam (militer). Posisi seperti itu memberikan kepada Indonesia suatu kedudukan dan peranan yang strategis dan penting sekali dalam hubungan dengan dunia internasional. Namun, posisi Indonesia cukup terbuka dan dapat didekati dari segala penjuru sehingga juga memiliki kerawanan, karena Indonesia adalah suatu negara yang wilayah lautnya luas ($\frac{2}{3}$ wilayahnya merupakan lautan) yang berlokasi atau menduduki posisi silang yang strategis bagi kepentingan kesejahteraan dan keamanan bagi negara-negara lain, Indonesia harus mampu dan memiliki postur kekuatan yang cukup tangguh untuk dapat melakukan perannya dalam rangka

menyumbang pelaksanaan tertib dunia, khususnya kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, diperlukan pembangunan suatu sistem pengawalan dan pengamatan pantai yang modern dan efektif bagi pengawasan terhadap segala bentuk infiltrasi dan pelanggaran kedaulatan dan pelanggaran hukum yang berlaku. Sistem pengawasan dan pengamatan tidak hanya didukung oleh sarana prasarana yang berteknologi tinggi, tetapi akan lebih efektif apabila adanya bela negara dari penduduk di sepanjang pantai yang memiliki kemampuan usaha yang ulet dalam bidang kehidupannya;

- 5) Dalam hubungan dengan negara tetangga, perlu dipelihara hubungan di segala bidang terutama yang berbatasan dengan Indonesia, yaitu di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan wilayah Papua Nugini, di sebelah selatan dengan Australia dan Timor Leste, di sebelah utara dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, serta Thailand. Hal-hal yang perlu perhatian penuh dari masalah-masalah perbatasan antara lain sebagai berikut:

a) Pintu Gerbang Natuna

Belum tercapainya persetujuan batas landas kontinen antara Indonesia dan Vietnam merupakan masalah yang memerlukan perhatian kita bersama dalam dasawarsa mendatang. Klaim teritorial terhadap kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan (LCS) terutama oleh Republik Rakyat Cina (RRC), menjadikan LCS ancaman bagi stabilitas kawasan. Perairan tersebut akan tetap menjadi jalur subversi dan infiltrasi dari wilayah komunis, baik dari RRC maupun Vietnam ke Indonesia.

b) Pantai Timur Sumatra dan Kepulauan Indonesia Bagian Barat

Faktor kekayaan laut yang melimpah dan sangat terbatasnya sarana pengamanan yang dimiliki oleh unsur keamanan laut Indonesia, jika dibandingkan dengan luasnya perairan, akan merupakan rangsangan bagi nelayan asing untuk melakukan kegiatan pencurian, terutama di sekitar perairan pantai timur Sumatra (Riau) serta pulau-pulau Indonesia bagian timur (Maluku), dan perairan Papua. Keadaan itu tidak mustahil akan digunakan dan dimanfaatkan oleh unsur tertentu untuk usaha dan kegiatan yang bersifat strategis.

c) Perbatasan Papua dengan Papua Nugini

Masalah lintas batas tradisional yang dilakukan oleh rakyat Papua ke Papua Nugini masih tetap akan berlangsung. Daerah yang secara tradisional dijadikan tempat perlintasan adalah sebagian besar daerah perbatasan sebelah utara Kabupaten Jayapura dan sebagian kecil dilakukan di sekitar Kecamatan Oksibil, Kabupaten Merauke. GPM/OPM di Papua secara fisik militer kekuatannya sudah tidak berarti lagi. Kegiatan mereka pada masa mendatang lebih diarahkan pada hal-hal yang bersifat politik.

- 6) Terdapat beberapa daerah inti yang perlu mendapatkan perhatian bersama, baik dalam masalah perencanaan, perbatasan, maupun sistem sirkulasi. Daerah inti merupakan daerah pusat kegiatan, yaitu daerah tempat upaya pembangunan dimulai sehingga kemudian menjadi daerah pusat pertumbuhan dan pengembangan yang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, pusat pelayanan jasa, industri, dan pusat pemerintahan yang menangani pembinaan kesejahteraan dan keamanan. Dapat dikatakan bahwa daerah inti adalah pusat saraf pemerintahan yang menjadi arah datangnya dan keluarnya informasi dalam segala bentuk dan sifatnya.

a) Perencanaan Daerah Inti

Sebagai pusat pertumbuhan pembangunan, daerah inti harus direncanakan dengan saksama dan sedini mungkin dengan pendekatan kesejahteraan keamanan. Daerah inti yang kurang baik perencanaannya akan menjadi kendala dalam pembangunan pada masa mendatang dan apabila rawan lokasinya dari pertimbangan keamanan nasional dapat mendatangkan malapetaka. Di tanah air tentu akan lahir daerah-daerah inti sehingga akan merupakan suatu jaringan yang harus dirancang dengan sebaik-baiknya atas dasar tersedianya sumber daya manusia dengan segala prospeknya di kemudian hari dengan mempertimbangkan segi tata ekonomis dan segi pertahanan keamanan atau segi kelangsungan hidup bangsa dan negara.

b) Daerah Perbatasan versus Perbatasan Negara

Daerah inti atau daerah pusat kegiatan, misalnya daerah industri yang akan dikembangkan dan berlokasi terlalu dekat dengan perbatasan, seperti pulau Batam atau daerah Kepulauan Riau, pada umumnya memang dapat dijadikan pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan kutub pertumbuhan negara-negara tetangga sehingga dapat dijadikan sarana persahabatan dan kerja

sama dengan tetangga. Namun, pada hakikatnya daerah inti juga mengandung benih konflik kepentingan antarbangsa sehingga senantiasa perlu diwaspadai demi terwujudnya kondisi lingkungan strategis yang menguntungkan perjuangan bangsa.

Perkembangan wilayah tersebut akan mempunyai daya serap tenaga kerja yang akan mendorong persebaran penduduk. Sebagai akibat dari adanya peluang tersebut, upaya transmigrasi seyogianya tanggap terhadap perannya dalam persebaran penduduk dengan menempatkannya di lokasi permukiman transmigrasi yang dapat menjadi *hinterland* daerah industri dan dengan demikian maka upaya transmigrasi sekaligus juga menunjang majunya industri dengan segala dampak positifnya.

c) Sistem Sirkulatori

Sistem sirkulasi merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan perhubungan laut dan sistem sirkulasi sebagai struktur eksternal.

(1) Peran Hubungan Laut

Wilayah ruang hidup bangsa berupa kawasan ekuator yang sangat luas ketika jalan pendekat melalui laut atau hubungan laut menyebabkan semua komponennya cukup mudah dijangkau dari segala penjuru. Luasnya wilayah negara sebenarnya dapat merupakan hambatan bagi pembangunan ekonomi, dalam hal ini perdagangan akibat jarak-jarak yang sangat jauh yang harus ditempuh, kenyataannya dapat diimbangi dengan mudahnya mobilitas transportasi melalui air lewat lautan yang tenang dan terlindung. Bahkan, gunung-gunung yang diselimuti hutan dan pantai-pantai yang berawa dapat ditembus melalui lautan dan selat. Di tempat lain, sungai-sungai tropik merupakan jalan alami melalui tanah rawa dan berhutan. Namun, alam itu kemudian juga merupakan kendala bahkan ancaman, di samping sebagai peluang. Jalan air yang merupakan garis komunikasi yang memberikan kemudahan bagi penduduk asli penghuninya juga memudahkan orang asing, baik yang datang untuk menjajah atau berdagang saja.

(2) Sistem Sirkulatori sebagai Struktur Eksternal

Sea Lanes Of Communication yang dikenal dengan sebutan SLOC adalah jalur-jalur pelayaran/perhubungan

laut yang secara politik dan ekonomi sangat strategis karena menyangkut kelangsungan hidup berbagai negara. Jalur laut tersebut yang membentang dari Teluk Paris ke arah barat menuju Eropa Barat dan ke arah timur menuju Jepang dan Amerika Serikat (AS) merupakan bentangan garis energi minyak dan gas bumi yang tidak terputus karena hal tersebut sangat erat kaitannya dengan industri negara maju.

Dari tujuh selat strategis di dunia, empat di antaranya berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Sudah barang tentu menurut pandangan geopolitik dunia Alfred Thayer Mahan, Indonesia memiliki *bargaining power* yang kuat berupa *check point* dalam pengendalian lalu lintas lautan yang melewati SLOC dan pengendalian lalu lintas udara di atasnya. Yang ke timur menembus perairan Indonesia (tidak ada jalan lain) seperti selat melalui LCS (Natuna) atau Selat Makasar.

Dengan keberadaan SLOC tersebut, lautan nusantara Republik Indonesia menjadi lautan yang berkedudukan sangat strategis dan rawan dan polusi/pencemaran. Selain garis SLOC yang membentang dari barat ke timur, terdapat juga SLOC yang membentang dari selatan ke utara yang menghubungkan Australia, New Zealand, dan negara-negara Pasifik Selatan dengan Jepang, Korea, Hongkong, RRC, Taiwan, dan sebagainya yang melalui laut teritorial Indonesia.

Posisi yang strategis di atas sebenarnya dapat dijadikan kartu yang ampuh dalam setiap negosiasi, baik bersifat politik maupun ekonomi. Setiap diskusi tentang jalur-jalur laut dalam rangka SLOC dan jalur-jalur udara di atasnya akan menyentuh masalah-masalah kedaulatan negara, yurisdiksi nasional, hukum laut, dan hukum udara dan internasional, di samping masalah-masalah politik yang diakibatkan oleh berbagai perbedaan persepsi dan latar belakang negara-negara yang bersangkutan.

c. Dampak Karakteristik Geografi Indonesia

Karakteristik geografi negara Indonesia memiliki ciri yang besar pengaruhnya terhadap kebijaksanaan dan strategi, baik dalam upaya penciptaan kesejahteraan bangsa maupun keamanan nasionalnya. Oleh karena itu, setiap putusan yang diambil oleh bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional, harus selalu dikaitkan dengan karakteristik geografi wilayah Indonesia

dan berorientasi pada pendekatan kesejahteraan (*prosperity*) dan keamanan (*security*) dalam semua aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah (statis) maupun aspek sosial (dinamis).

Dalam rangka pembangunan tersebut sasaran-sasaran yang akan dicapai secara menyeluruh meliputi semua aspek kehidupan bangsa, yakni aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam, di samping aspek-aspek Trigatra, yaitu aspek geografi, kependudukan/demografi, dan SKA yang lazimnya meliputi segi pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanannya. Atas dasar itu, perlu kita perhatikan lingkungan strategis regional dan global yang saat ini sedang melanda dunia untuk kita jadikan dasar pemikiran dalam menentukan arah kegiatan serta sasaran yang ingin dicapai pada setiap tahap pembangunan. Adapun dampak karakteristik geografi Indonesia terhadap aspek-aspek Astagatra adalah sebagai berikut:

1) Dampak di Bidang Demografi

Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang (ujung Sumatra Utara) sampai Merauke (ujung Papua). Keanekaragaman suku bangsa ini tentunya bahwa Indonesia terletak di *cross position* (posisi silang). Bukan saja suku bangsa atau ras yang beraneka ragam di Indonesia, tetapi juga keanekaragaman kepercayaan (agama), misalnya seperti Hindu, Budha, Kristen (Katolik dan Protestan), Konghucu, dan Islam. Bahasa juga merupakan suatu kekayaan bangsa kita, ada bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dan bahasa-bahasa daerah yang menjadi identitas kesukuan. Akibat pengaruh letak geografis wilayah Indonesia antara lain:

- a) Kepulauan Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut, hal ini berarti penduduk Indonesia banyak hidup dari kekayaan laut, misalnya nelayan dan perhubungan laut;
- b) Kepulauan Indonesia berada pada posisi silang, sehingga wilayah Indonesia merupakan pertemuan kebudayaan dari berbagai bangsa seperti kebudayaan Islam, Hindu, Budha, dan lain-lain.

Indonesia seperti negara-negara lainnya di dunia sedang mengalami problem penduduk. Secara kuantitasnya terdapat tiga problem utama penduduk yang dihadapi Indonesia, yaitu jumlah penduduk yang besar, tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, dan persebaran penduduk yang tidak merata. Indonesia memiliki masalah persebaran penduduk yang tidak merata dari tiap pulau dan provinsinya. Persebaran penduduk berkaitan dengan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan perbandingan

jumlah rata-rata penduduk dalam satuan wilayah seluas 1 km². Faktor-faktor lingkungan geografis yang mempengaruhi persebaran penduduk, antara lain lokasi, iklim, relief, tanah, sumber daya alam, sumber daya air, dan kebudayaan.

Orang yang hidup di daerah geografis dataran tinggi, geografis dataran rendah, geografis daerah pantai (pesisir) dari logat/dialek bahasa memiliki ciri khas masing-masing. Misalkan orang pantai yang biasa melihat dan mendengar deburan ombak, cara dan volume bicara mereka akan lebih keras, ketimbang mereka yang hidup di daerah geografis dataran tinggi yang senyap ataupun daerah geografis dataran rendah yang biasanya lebih padat penduduknya. Kondisi geografis dapat mempengaruhi dan membedakan setiap orang yang hidup dengan letak morfologis yang berbeda.

2) Dampak di Bidang Sumber Kekayaan Alam

Indonesia merupakan negara kepulauan yang merupakan pertemuan dua samudra besar (Samudra Pasifik dan Samudra Hindia) dan diapit daratan luas (Benua Asia dan Benua Australia), hal itu berpengaruh terhadap kondisi alam.

- a) Wilayah Indonesia beriklim laut, sebab merupakan negara kepulauan sehingga banyak memperoleh pengaruh angin laut yang mendatangkan banyak hujan;
- b) Indonesia memiliki iklim musim, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin muson yang berembus setiap 6 bulan sekali berganti arah. Hal ini menyebabkan musim kemarau dan musim hujan di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang dan seperti telah sejarah buktikan, salah satu jenis tambang di Indonesia yakni minyak bumi pernah menjadikan negara Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sangat besar. Meskipun saat ini minyak bumi tidak lagi menjadi primadona dan andalan komoditi ekspor Indonesia, namun Indonesia masih banyak memiliki hasil tambang yang dapat menggantikan peran minyak bumi sebagai salah satu sumber devisa negara. Selain minyak bumi, Indonesia juga memiliki hasil tambang lain seperti biji besi, timah, tembaga, batu bara, emas, gas bumi, dan lain-lain. Indonesia juga mempunyai potensi kekayaan alam yang banyak seperti kekayaan hasil hutan, hasil perkebunan yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sifat dan karakteristik geografis Indonesia ditinjau dari aspek iklim adalah negara humid tropik yang berpengaruh pada kehidupan tumbuhan, satwa dan manusia, sehingga sebagian besar sumber daya lahan adalah lahan yang subur untuk

pertanian. Kondisi laut yang membentang mempunyai potensi ikan dan keindahan alam serta berfungsi sebagai penghubung antarpulau. Sumber daya kelautan adalah segala potensi yang dikandung oleh permukaan, di dalam, dan di dasar laut yang dapat memberikan manfaat. Sumber daya kelautan dapat kita manfaatkan sebagai sumber perikanan, energi, jalur transportasi, keseimbangan iklim bumi, persediaan air, obat-obatan, fasilitas olahraga, dan lain-lain. Sebagian besar wilayah negara Indonesia adalah wilayah perairan laut yang tersebar merata menyatukan seluruh pulau dan kaya dengan bermacam-macam jenis spesies ikan serta hasil-hasil laut lainnya, seperti rumput laut, bermacam-macam jenis karang, mutiara, garam, mineral, agar-agar, dan lain-lain.

Di masa yang akan datang, eksistensi Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografis Indonesia itu sendiri, sehingga pengelolaan sumber daya alam, wilayah perbatasan dan pertahanan yang baik sangat diperlukan di Indonesia. Hal lain yang vital untuk dilakukan adalah mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang memadai, seperti sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, dan udara.

3) Dampak di Bidang Ideologi

Dalam kehidupan berbangsa, bangsa Indonesia telah menetapkan kehidupan berbangsanya adalah Pancasila. Ketetapan tersebut dicantumkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, seperti diketahui bahwa ideologi Pancasila ditetapkan melalui suatu kesepakatan nasional pada waktu pendirian negara Indonesia dengan mengingat ciri geografis, demografis, dan budaya bangsa Indonesia yang serba majemuk atau berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Kesepakatan nasional tersebut dimungkinkan oleh persamaan sejarah, nasib, dan cita-cita perjuangan membebaskan diri dari penjajah dan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sejarah telah membuktikan keampuhan falsafah Pancasila, baik bagi kepentingan eksistensi bangsa Indonesia maupun upaya pencapaian tujuan negara seperti apa yang diamanatkan UUD NRI 1945. Berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan (TAHG) yang dialami oleh bangsa Indonesia di bidang pemberontakan seperti Golongan Komunis/PKI sebanyak dua kali kemudian golongan ekstrem kanan berkali-kali seperti pemberontakan DI/TII, atau rencana pembentukan NII, telah memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dalam melestarikan Pancasila.

4) Dampak di Bidang Politik

Secara geografis, wilayah negara Republik Indonesia terdiri dari kepulauan dengan luas laut empat kali luas daratan, dan terdiri atas ribuan pulau sehingga berdampak terhadap masalah komunikasi maupun pengambilan kebijakan politik. Politik merupakan satu aspek kehidupan nasional yang di satu sisi berhubungan dengan kekuasaan dan kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan di aspek lainnya berkaitan dengan penyaluran aspirasi sebagai wujud dari kedaulatan di tangan rakyat. Dihadapkan dengan kondisi geografis yang sangat luas dan berada di posisi silang, maka dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang sehat dan dinamis, perlu diwujudkan adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara penyelenggaraan pemerintahan negara dan masyarakat. Hubungan ini tercermin dalam fungsi pemerintahan negara sebagai penentu kebijakan serta aspirasi dari masyarakat sebagai tujuan yang ingin diwujudkan, sehingga kebijakan pemerintahan negara tersebut harus serasi dan selaras dengan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, kondisi geografis ini mempengaruhi pengambilan keputusan, baik dalam permasalahan politik dalam negeri maupun politik luar negeri.

5) Dampak di Bidang Ekonomi

Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas yang membujur dari timur ke barat memberikan berbagai keuntungan jika ditinjau dari segi ekonomi. Dengan luasnya wilayah tersebut, Indonesia memiliki potensi SKA yang sangat besar dan apabila dieksploitasikan akan dapat memberikan sumbangan yang besar di bidang ekonomi. Indonesia juga berada pada wilayah iklim tropik yang memungkinkan dikembangkan vegetasi sepanjang tahun. Perbedaan musim di setiap daerah mengakibatkan perbedaan musim tanam dan kondisi. Kondisi itu sangat menguntungkan apabila dimanfaatkan sebaik-baiknya karena dapat menjamin kesinambungan pemenuhan kebutuhan pangan. Namun seperti diutarakan di atas, wilayah Indonesia yang sangat luas dapat menjadi kendala apabila komunikasi dan transportasi serta sistem pemerintahan belum mendukung luas wilayah tersebut. Keadaan itu telah menciptakan kesenjangan ekonomi antardaerah, khususnya antara kawasan barat dan kawasan timur.

Berdasarkan hal di atas, pengembangan kawasan industri/ ekonomi mungkin dapat dibagikan menjadi beberapa kawasan, yaitu kawasan Indonesia bagian timur dengan pusatnya di Ambon; kawasan Nusa Tenggara dengan pusatnya di Kupang; kawasan Indonesia bagian tengah dengan pusatnya di Makassar; kawasan Jawa dengan pusatnya

di Jakarta dan Surabaya; serta kawasan Indonesia bagian barat dengan pusatnya di Medan, Batam, dan Palembang.

6) Dampak di Bidang Sosial Budaya

Sama halnya dengan ekonomi, pengaruh terhadap sosial budaya juga dihadapkan kepada karakteristik geografi Indonesia, terutama yang meliputi luas, bentuk, dan lokasi.

a) Pengaruh Luas dan Bentuk Wilayah

Luas wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan, besar pengaruhnya terhadap sosial budaya. Kondisi sosial budaya antara satu daerah dan daerah yang lain, antara satu pulau dan pulau yang lainnya berbeda-beda, baik macam, kualitas, maupun perkembangannya. Interaksi sosial relatif rendah karena faktor jarak dan sarana transportasi yang kurang mendukung sehingga upaya pemetaan budaya dalam beberapa bidang tertentu, misalnya pendidikan, kesehatan, dan penyebaran penduduk relatif sulit. Pada sisi lain, luas dan bentuk wilayah Indonesia memungkinkan untuk tetap memelihara keanekaragaman budaya yang merupakan salah satu aset nasional.

b) Pengaruh Lokasi Wilayah

Lokasi wilayah Indonesia yang terbuka dari semua penjuru sangat peka terhadap pengaruh lingkungan. Indonesia yang dikelilingi negara-negara yang sedang berkembang, termasuk dalam hal sosial, langsung atau tidak langsung memengaruhi perkembangan dan pembinaan sosial budaya Indonesia. Tata kehidupan dan perilaku sosial budaya Indonesia berkembang sebagaimana lazimnya negara yang sedang berkembang tidak radikal, cenderung primordial sosialis, agak konservatif, serta kurang tinggi etos kerja dan daya saingnya. Berbeda halnya dengan andai kata letak Indonesia berada di tengah negara maju dengan tingkat sosial budaya yang berkembang pesat, akan besar pengaruhnya terhadap perkembangan sosial budaya Indonesia.

7) Dampak di Bidang Pertahanan dan Keamanan

a) Pengaruh Luas Wilayah

Luas wilayah Indonesia memerlukan pemikiran tersendiri untuk mewujudkan suatu sistem pertahanan yang efektif dalam rangka mempertahankan serta menjaga integritas dan kedaulatan negara Indonesia. Kiranya perlu dirumuskan besar kekuatan pertahanan negara yang diperlukan agar setiap jengkal wilayah

yurisdiksi Indonesia, baik lautan maupun daratan dan udara di atasnya dapat diawasi dan dipertahankan secara efektif.

Luas wilayah Indonesia tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah, tetapi juga komposisi serta sistem pertahanan keamanan. Untuk menjamin efektivitas sistem hankam Indonesia dengan wilayahnya yang sangat luas menguntungkan dari segi hankam karena Indonesia masih sulit dikuasai seluruh wilayahnya secara fisik.

b) Pengaruh Lokasi Wilayah

Bentuk wilayah sangat berpengaruh dalam menyusun sistem pertahanan keamanan. Bentuk kepulauan memungkinkan untuk dikembangkan dalam suatu sistem pertahanan pulau-pulau besar dan rangkaian pulau-pulau kecil dengan tetap mengacu pada sistem pertahanan semesta (sishanta). Posisi silang Indonesia dan letaknya yang berada di tengah-tengah negara Asia Tenggara, khususnya ASEAN berpengaruh terhadap sistem pertahanan keamanan pada khususnya dan ketahanan nasional pada umumnya.

Berdasarkan pertimbangan luas bentuk dan posisi wilayah Indonesia tersebut, kompartemen strategis untuk kepentingan hankam disusun sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan pertahanan darat wilayah Indonesia, kepemimpinan berada pada komando daerah militer;
- (2) Untuk kepentingan pertahanan laut dan udara serta dalam upaya pertahanan terpadu, wilayah Indonesia pada prinsipnya dibagi menjadi dua yaitu kawasan timur dan kawasan barat;
- (3) Untuk menjamin efektivitas pengendalian operasi pertahanan maka wilayah Indonesia perlu dibagi menjadi dua wilayah pertahanan, yaitu: wilayah pertahanan timur, yang terdiri dari Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Papua; dan wilayah pertahanan barat terdiri dari Jawa, Kalimantan, dan Sumatra;
- (4) Suatu bentuk pengawasan perbatasan perlu mulai dirintis demi dapat terwujudnya deteksi dini terhadap pelanggaran teritorial atas wilayah negara RI;

- (5) Peningkatan sistem sirkulasi dengan tujuan untuk mencegah daerah-daerah yang menonjol keluar jauh dari pusat, tidak terisolasi dan keterpisahan;
- (6) Perwujudan kesatuan ekonomi sesuai dengan wawasan nusantara dengan menetapkan adanya lautan mediterania nusantara sebagai sarana atau media kesatuan ekonomi nusantara;
- (7) Kepentingan keamanan dilakukan oleh Polri;
- (8) Penjaminan terselenggaranya ketahanan dan ketertiban dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.

6. Pandangan Geostrategi Indonesia

a. Geostrategi dalam Tatahan Pemikiran di Indonesia

Suatu negara dalam mewujudkan suatu keinginan untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi kehidupannya maka perlu adanya pemanfaatan konstelasi geografi atau ruang hidup melalui geopolitik yang menjadi kebijakan umum. Geopolitik identik dengan pemikiran ruang hidup sebuah bangsa (*lebensraum*) yaitu mencari penalaran dan membentuk kesadaran terhadap masalah ledakan penduduk, penurunan persediaan sumber daya alam, batas ruang hidup karena pengaruh perkembangan dan pengembangan hidup bangsa dan negara. Geopolitik adalah pedoman dalam perumusan kebijakan politik negara yang diterapkan dalam langkah-langkah strategis yang disebut geostrategi, di mana unsur utama geopolitik meliputi:

- 1) Konsepsi ruang diperkenalkan Karl Haushofer yang menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer, teori ini disebut pula Teori Kombinasi Ruang dan Kekuatan;
- 2) Konsepsi *frontier* (batas imajiner dari dua negara);
- 3) Konsepsi politik kekuatan yang terkait dengan kepentingan nasional;
- 4) Konsepsi keamanan negara dan bangsa konsep ketahanan nasional.

Geopolitik dan geostrategi adalah dua pernyataan (*nomenclature*) yang tidak dapat dipisahkan pengertiannya karena saling terkait. Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam. Apabila wilayah/ruang hidup tidak mendukung bangsa tersebut akan mencari pemenuhan kebutuhan kekayaan alam di luar wilayahnya (*expansion*). Hal ini

mulai didefinisikan hukum *expansion* yaitu perkembangan atau dinamika budaya dalam bentuk gagasan, kegiatan (ekonomi perdagangan, perindustrian/produksi) diimbangi oleh pemekaran wilayah batas-batas suatu negara pada hakikatnya bersifat sementara (pandangan ajaran Friedrich Ratzel).

Dalam mewujudkan suatu keinginan untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi kehidupannya maka perlu adanya strategi yang disebut geostrategi. Perkembangan geopolitik dan geostrategi di Indonesia berbeda-beda tergantung lingkungan strategis (lingstra) pada era pemerintahan/Presiden masing-masing. Pada era Presiden Soekarno, politik negara-negara besar seperti AS dan Uni Soviet yaitu Perang Dingin. Perang Dingin ini dimulai dari zaman Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Pada zaman Presiden SBY, geopolitik dunia yaitu globalisasi dan reformasi. Tantangan yang dihadapi pada zaman Soekarno dan Soeharto adalah neoliberal/kapitalisme, imperialisme, komunisme, kemiskinan, pengangguran, dan keutuhan wilayah, sedangkan pada zaman SBY tantangan yang dihadapi adalah globalisasi, neoliberal/kapitalisme, imperialisme, radikalisme, terorisme, kemiskinan, pengangguran, dan keutuhan wilayah.

Gambaran kebijakan strategi yang diambil dari era ke era dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Era Kerajaan Majapahit

Pengimplementasian geostrategi pada era Majapahit dengan menerapkan wawasan nusantara dalam menyatukan nusantara menjadi suatu bangsa yang besar. Lingstra dalam kaitannya dengan geopolitik Mahapatih Gajah Mada dari pernyataannya yakni satunya ucapan dengan perbuatan, keberanian, integritas, dan mengharamkan status quo. Sedangkan dalam rangka ketahanan nasional melalui metode yang digunakan bersifat paksaan. Metode tersebut sangat tepat sesuai situasi yang dihadapi, bahkan perjuangan dengan otot atau fisik telah mengilhami langkah perjuangan selanjutnya.

2) Era Ir. Soekarno (Orde Lama)

Presiden pertama RI, Ir. H. Soekarno menerapkan wawasan nusantara agar mampu mempertahankan kemerdekaan dengan mengintegrasikan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Dengan lingstranya, mampu menjadi corong politik internasional untuk negara berkembang dan negara yang masih terjajah. Pendekatan ketahanan nasional pada era Ir. H. Soekarno, mampu mengambil keputusan yang menggemparkan dunia internasional yaitu keluar dari PBB dan menentang sikap negara kapitalis dan imperialisme yang menggoyang integrasi bangsa (pergolakan PRRI dan Permesta). Mencanangkan program nasional yaitu "*Nation Character Building*" sebagai suatu sikap

politik yang antisipatif dari kemajemukan bangsa yang diubah dari potensi rawan menjadi potensi kekuatan. Kebijakan yang diterapkan dalam masa pemerintahannya termasuk:

- a) Menetapkan bersama UUD NRI 1945 tanggal 18 Agustus 1945;
- b) Penumpasan PKI Madiun 1948;
- c) Presiden Republik Indonesia Serikat (1949) dan pemberlakuan UUD RIS 1949;
- d) Menetapkan bersama berlakunya UUD Sementara 1950;
- e) Pencetus gagasan dan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 dan Dasasila Bandung;
- f) Pencetus dan pendiri Gerakan Non Blok;
- g) Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, menetapkan diberlakukannya kembali UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar NKRI;
- h) Pencetus Ganefo tahun 1963;
- i) Pencetus Demokrasi Terpimpin dan membagi Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila;
- j) Pencetus Manifesto Politik (Manipol dan Usdek) dan Nasionalisme, Agama, dan Komunis (Nasakom);
- k) Penumpasan DI/TII, PRRI Permesta, dan Kahar Muzakar;
- l) Ganyang Malaysia (Dwikora);
- m) Trikora untuk mengembalikan Irian Barat dari Belanda ke pangkuan NKRI;
- n) Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969;
- o) Berdikari (Berdiri di atas Kaki Sendiri) dan keluar dari keanggotaan PBB;
- p) Pembentukan dan peresmian Lemhannas RI dengan kuliah pertama geopolitik;
- q) Indonesia menjadi Negara Kepulauan;
- r) Diterapkannya politik bebas aktif, anti kapitalisme dan imperialisme.

3) Era Pemerintahan Soeharto (Orde Baru)

Presiden kedua RI, Jenderal Besar (Purn) H. M. Soeharto, yang sangat menghayati ketangguhan bangsa di bidang kesejahteraan dan keamanan. Gejolak politik yang meretakkan persatuan dan kesatuan

serta ditandai dengan kemiskinan membelenggu kemajuan bangsa Indonesia, maka beliau mencanangkan “Trilogi Pembangunan” yang dijabarkan melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita) secara bertahap dari Pelita ke Pelita, yang dititikberatkan pada masalah mengatasi kemiskinan dengan program pembangunan “desa tertinggal”. Khusus di dalam mengatasi kemiskinan yang sampai Presiden saat ini masih menjadi fokus dalam pemecahan masalah, Presiden Soeharto pada tanggal 8 September 1997 menyatakan “Jika jumlah penduduk miskin di dunia terus bertambah dari tahun ke tahun, maka di Indonesia mereka yang miskin malah terus berkurang dari waktu ke waktu. Ini membuat kami berbesar hati dan berbahagia, kami tambah percaya diri karena arah dan cara-cara pembangunan kami telah benar”. Kebijakan yang diterapkan dalam masa pemerintahannya antara lain:

- a) Menggelar operasi militer di Timor Timur tahun 1975 dan menerima keinginan sebagian besar rakyat Timor Timur untuk menyatu dengan NKRI dan menjadi provinsi ke-27 tahun 1976;
- b) Mencanangkan gerakan pembangunan nasional dengan sebutan Pelita (Pembangunan Lima Tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dimulai tahun 1971 dengan visi dasar Trilogi Pembangunan;
- c) Menyelesaikan persengketaan dengan Malaysia yang akhirnya menjadi embrio pembentukan ASEAN tahun 1976 dalam Deklarasi Bangkok;
- d) Mencanangkan gerakan Swasembada Pangan dan membentuk Kelompok Usaha Tani serta Kelompok Pendengar dan Wawancara Pemirsa;
- e) Menggagas lahirnya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dikukuhkan dalam Tap MPR Tahun 1978 dengan pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) sebagai badan yang bertanggung jawab;
- f) Menetapkan gugus NKRI sebagai Negara Kepulauan dan pembentukan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk pelayaran internasional (ALKI I, II, dan III) serta ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif);
- g) Kebijakan nasional tentang Penataran Kewaspadaan Nasional dan Pengawasan Melekat;

- h) Penggagas pertemuan negara berkembang dan miskin yang dikenal dengan Negara Selatan;
- i) Kebijakan tentang Pembuatan Satelit Palapa;
- j) Kebijakan tentang Badan Pengendali/Pengawas Industri Strategis (BPIS) yang meliputi antara lain: Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) Bandung; PT. PINDAD Bandung; PT. Dahana; PT. Bosowa Indra untuk alat berat; PT. PAL Surabaya; PT. Inti Telkom; dan PT. Krakatau Steel;
- k) Kebijakan membentuk Zona Industri Strategis antara lain Surabaya, Medan, Jakarta yang dilanjutkan pada beberapa provinsi lainnya;
- l) Kebijakan moneter tentang nilai tukar rupiah mengambang terhadap mata uang asing;
- m) Kebijakan menggelar operasi militer dalam penumpasan;
- n) GPK (GAM) Aceh, GPK (OPM) Irian Jaya, dan Operasi Preman/pelaku kriminal, kesemuanya belum diketahui tentang payung hukumnya baik Perppu maupun Keppres;
- o) Kebijakan tentang Program Keluarga Berencana (KB);
- p) Kebijakan tentang Program Inpres Desa Tertinggal (IDT);
- q) Menerapkan strategi politik bebas aktif dan gerakan anti Partai Komunis Indonesia (PKI);
- r) Menanamkan paham wawasan nusantara sebagai fondasi pembangunan bangsa pada segala aspek kehidupannya;
- s) Kesepakatan NKRI dan Malaysia untuk membawa permasalahan kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan ke *International Court of Justice* di Den Haag.

4) **Era Prof. Dr. B.J. Habibie (Reformasi)**

Periode pemerintahan Prof. Dr. B.J. Habibie merupakan tonggak sejarah berakhirnya era Orde Baru diganti dengan era Reformasi. Berbagai kebijakan dan strategi politik yang diambil dengan berani dan penuh risiko yaitu keterbukaan dan kebebasan terutama di bidang pemberitaan media massa, membuka pintu sebebaskan-bebasnya untuk berpendapat. Beberapa kebijakan beliau terdiri dari:

- a) Kebebasan pers;
- b) Otonomi daerah;
- c) Mencabut dan menarik status daerah operasi Aceh yang ditandai dengan menarik pasukan non-organik, dalam

masalah Timor Timur melaksanakan jajak pendapat yang hasilnya Timor Timur lepas dari NKRI;

- d) Kebijakan tentang demokrasi yang diawali dengan kebebasan pers;
- e) Kebijakan untuk demokrasi dengan menerbitkan Undang-Undang bersama DPR yang jumlahnya cukup banyak di antaranya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU tentang Pemilu tahun 1999 dan UU Anti Korupsi;
- f) Kebijakan tentang Jajak Pendapat di Timor Timur;
- g) Kebijakan tentang sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan melalui Mahkamah Internasional;
- h) Penarikan pasukan non-organik dan pencabutan status daerah operasi militer di Aceh serta pembebasan napi kriminal dan subversi GPK (GAM) Aceh.

5) Era Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid

Kebijakan pemerintahan Presiden RI keempat K.H. Abdurrahman Wahid antara lain:

- a) Kebijakan penyusunan kabinetnya dengan meniadakan/ membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial;
- b) Pemisahan institusi Dephan, TNI, dan Polri;
- c) Mendukung dan menyetujui amandemen UUD NRI 1945;
- d) Kebijakan Rekonsiliasi Nasional dengan mengesampingkan HAPSAK dan perlakuan kesetaraan terhadap anak-anak eks G30S/PKI;
- e) Kebijakan membentuk Komisi Penyelidik Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) dengan mengangkat Yusuf Sakir sebagai Ketua.

6) Era Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

Pada periode pemerintahan Megawati Soekarno Putri, beliau dinilai cukup bijaksana di dalam mengambil langkah penyelesaian dalam kasus separatisme di Aceh, menetapkan status penyempurnaan demokrasi yaitu pelaksanaan pemilihan langsung dalam Pemilu tahun 2004 dan Darurat Militer serta kasus Ambon dalam penetapan darurat sipil. Beberapa kebijakan beliau terdiri dari:

- a) Kebijakan tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi serta membubarkan KPKPN dan menggantinya dengan KPK

(Komisi Pemberantasan Korupsi) yang diketuai oleh Mayjen Pol (Purn) Taufiqurrahman Ruqi;

- b) Merevisi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dengan menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004;
- c) Kebijakan tentang Penyelesaian Poso melalui Malino I dan II, menetapkan Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh sampai menetapkan Status Darurat di Aceh dan Darurat Sipil di P. Ambon;
- d) Kebijakan menyetujui UU Pemilu Tahun 2002 tentang Pemilihan Presiden Secara Langsung;
- e) Kebijakan tentang Pengembangan Provinsi Irian Jaya menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Banten, dan Pengembangan Kab dan Kota.

7) Era Pemerintahan DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Adapun kebijakan dan strategi politik yang ditempuh pada masa pemerintahan beliau antara lain:

- a) Visi Presiden mewujudkan “Indonesia yang Aman, Adil, Damai, dan Sejahtera” melalui konsep pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 Tahunan);
- b) Kebijakan penyelesaian Aceh melalui MoU Helsinki, Finlandia;
- c) Kebijakan penanganan Bencana Alam Nasional Tsunami di Aceh dan P. Nias;
- d) Kebijakan penancangan nasional pemberantasan korupsi;
- e) Kebijakan menaikkan anggaran pendidikan menjadi 20% dan APBN;
- f) Menerapkan *Strategic Partnership*;
- g) Penetapan batas wilayah negara;
- h) Penyelesaian sengketa Ambalat;
- i) Penyelesaian klaim wilayah perbatasan;
- j) LCS;
- k) *Maritime Security*.

8) Era Pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi)

Adapun kebijakan dan strategi yang dijalankan sesuai dengan Sembilan Program Nawa Cita sebagai berikut:

- a) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- b) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan;
- c) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- d) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- e) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektare, program rumah “Kampung Deret” atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019;
- f) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- g) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- h) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia;
- i) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan

kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

b. Geostrategi Indonesia dalam Mewujudkan Cita-Cita Proklamasi

Pada awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah, geostrategi menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama ketahanan nasional. Mengingat geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan sebagainya, geostrategi menjadi amat berbeda wajahnya dengan yang digagaskan oleh Haushofer, Ratzel, Kjellen, dan sebagainya.

Geostrategi Indonesia berawal dari kesadaran bahwa bangsa dan negara ini mengandung sekian banyak unsur pemecah belah yang setiap saat dapat meledak dan mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam era kepemimpinan masa lalu dapat disaksikan dengan jelas bagaimana hal itu terjadi beserta akibatnya. Tidak hanya itu saja, tatkala bangsa kita lemah karena sedang berada dalam suasana tercabik-cabik, serentak pulalah harga diri dan kehormatan dengan mudah menjadi bahan tertawaan di forum internasional. Di situlah ketidakberdayaan kita menjadi tontonan masyarakat internasional, yang apabila kita sekalian sadar, sekaligus menjadi pelajaran berharga. Apabila dikehendaki agar hal itu tidak akan terulang lagi, jangan sekali-kali memberi peluang pada anasir-anasir pemecah belah untuk berkesempatan mencabik-cabik persatuan dan kesatuan nasional.

Sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang membabi-buta harus ditiadakan. Yang mayoritas harus berlapang dada, sedangkan yang minoritas haruslah bersikap proporsional, tanpa harus mengurut dada. Sekali lagi, terbukti bahwa pemimpin yang kuat dan disegani serta mengenal betul watak bangsa Indonesia sangat diperlukan. Di lain pihak, masyarakat perlu menjadi arif serta pandai menahan diri dalam menghadapi provokasi atau rongrongan/iming-iming melalui politik uang (*money politics*). Atas dasar adanya ancaman yang laten terutama dalam bentuk SARA, geostrategi Indonesia sebagai doktrin pembangunan mengandung metode pembentukan keuletan dan pembentukan ketangguhan bangsa dan negara. Kedua kualitas yang harus dibangun dan dimanfaatkan secara konsisten itu tidaklah hanya ditujukan kepada individu warga bangsa, tetapi juga pada sistem, lembaga, dan lingkungan.

Masyarakat bangsa berikut segala prasarananya harus terus dibina keuletannya agar mampu memperlihatkan stamina dalam penangkalan terhadap anasir-anasir pemecah belah bangsa dan negara. Dapat diantisipasi

bahwa hanya anasir-anasir tersebut bersifat laten atau hadir sepanjang masa. Maka, aspek atau kualitas keuletan haruslah dikedepankan. Pembinaannya pun perlu berlanjut agar setiap generasi yang muncul paham akan pentingnya kedua kualitas tersebut. Dapat kita saksikan bersama bahwa tiap generasi baru merupakan lahan yang subur bagi upaya-upaya yang tidak sejalan dengan visi kebangsaan, hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Kemajuan yang bersifat kebendaan, apalagi yang datang dari luar, saat ini lebih memiliki daya tarik terhadap generasi muda jika dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya falsafah dan konsepsional.

Di sisi lain, masyarakat harus dibina ketangguhan atau keuletannya agar secara aktif serta efektif mampu menghadapi bahaya/ancaman yang sifatnya laten tadi. Setidak-tidaknya secara bergotong royong dalam lingkungannya masing-masing mereka mampu mengkonter ancaman atau bahaya laten itu. Ketangguhan atau kekuatan dapat berupa keberanian masyarakat menghadapi apa saja yang mereka anggap dapat berpotensi sebagai anasir pemecah belah bangsa. Itu sudah barang tentu memerlukan kebersamaan dan kekompakan agar lebih efektif sebagai kekuatan penangkalan.

Integrasi bangsa adalah pemaduan berbagai unsur kekuatan bangsa ke dalam satu jiwa kebangsaan dengan aspirasi berbangsa dan bernegara yang sejalan dengan ketentuan konstitusi. Proses integrasi bangsa adalah untuk setiap bangsa yang majemuk, tetapi homogen seperti AS. Proses integrasi dilaksanakan dengan metode larut dalam pot (*melting pot*). Mengapa demikian? Hal itu terjadi karena pada masyarakat AS tidak ada satupun kelompok masyarakat yang berhak mengklaim satu wilayahpun sebagai tempat tinggal nenek moyang mereka terkecuali suku Indian, karena hampir semuanya berasal dari keturunan imigran. Tidaklah mengherankan apabila sebagai akibat tidak adanya hubungan historis atau psikologis pada wilayah, sentimen kedaerahan atau kewilayahan tidak terjadi. Hal yang menguntungkan itu membuat setiap warga negara AS apapun juga asal keturunannya, dapat ditempa menjadi satu dalam kancah apapun dan di manapun. Memang seorang Gubernur negara bagian harus dipilih di antara warga negara bagian itu, tetapi tidak harus dipilih di antara mereka yang dilahirkan di negara bagian yang bersangkutan. Di sini sama sekali tidak ada sentimen kedaerahan yang menonjol.

Lain halnya dengan Indonesia yang masyarakatnya majemuk, tetapi heterogen, metode *melting pot* tidak dapat dilakukan. Setiap suku memiliki kaitan historis dan psikologis dengan daerah tempat tinggal nenek moyangnya. Daerah di Pulau Bali seakan-akan menjadi “milik” orang Bali, padahal Pulau Bali bukan hanya “milik” warga Pulau Bali. Oleh karena itu, tidak hanya orang Bali yang dapat dicalonkan menjadi Gubernur Bali. Logika lanjutannya adalah bahwa hanya orang Bali yang bisa dan mampu memahami budaya, adat istiadat, atau agama di daerah itu. Metode *melting pot* kadang-kadang juga tidak dapat

diterapkan hanya pada tataran antarprovinsi, tetapi kadang-kadang antarkabupaten dalam satu provinsi juga sulit.

Mungkin itu adalah warisan zaman penjajahan dahulu yang kita sekalian lalai menanganinya. Pada zaman Belanda, tapak kultur satu suku bangsa dijadikan provinsi, sedangkan tapak substruktur provinsi dijadikan keresidenan. Demikian politik *divide et impera* yang diterapkan menjadi geopolitik kolonial untuk menciptakan sentimen kedaerahan dan apabila memungkinkan didorong menjadi gesekan antarmasyarakat pada wilayah substruktur atau kultur. Sayangnya, geopolitik kolonial ini diwarisi, diteruskan, dan malah diperberat lagi, misalnya Provinsi Sunda Kecil yang dimekarkan lagi menjadi NTT, NTB, dan Bali. Kini Maluku menjadi dua provinsi, di Papua menjadi dua provinsi. Lalu, apalagi di kemudian hari? Alasan yang digunakan adalah efisiensi manajerial yang dikaitkan dengan luas wilayah.

Di sini jelas tampak bahwa aspek geopolitik tidak diperhatikan. Oleh karena itu, pemekaran wilayah administratif pemerintahan akan sekaligus merupakan tempat penyemaian bibit pertentangan sosial. Kalau pendekatan *melting pot* tidak dapat diterapkan, selayaknya kita kembali pada ide kesatuan yang diletakkan oleh para pendiri republik ini, yaitu pendekatan kekeluargaan yang disublimasikan menjadi asas kekeluargaan dan bahkan dalam negara kekeluargaan. Inilah yang sesungguhnya merupakan turunan (*derivative*) dari harmoni atau keseimbangan. Di dalam satu keluarga dijamin kepentingan anggota keluarga sebagai individu. Namun, kepentingan nasional harus didahulukan daripada kepentingan provinsi dan pada gilirannya kepentingan provinsi didahulukan daripada kepentingan kabupaten. Demikian seterusnya secara berjenjang yang pada ujung terbawahnya berupa kepentingan individu yang harus dikoordinasikan pada kepentingan umum. Itulah idealnya.

Dalam masyarakat yang heterogen yang berasaskan kekeluargaan, kualitas keuletan diwujudkan dalam bentuk kait-mengait secara integratif (bukan secara agregatif) menjadi jaringan kepentingan yang berhierarkis dan berjenjang. Dengan demikian, mengupayakan terwujudnya jaringan integratif (dalam semangat gotong royong) secara berjenjang atau berhierarki yang berskala nasional adalah geostrategi Indonesia untuk mewujudkan dan sekaligus mempertahankan integrasi bangsa. Kualitas ketangguhan atau kekuatan diwujudkan melalui penguatan dari setiap unsur entitas atau pelaku integrasi bangsa. Hal itu diwujudkan melalui pendekatan kekuasaan (dan distribusi kekuasaan) yang terkandung dalam geopolitik, yaitu yang berupa desentralisasi dan dekonsentrasi secara penuh dan konsisten. Bilamana penguatan ini dilaksanakan secara bersungguh-sungguh dan konsisten, ada kemungkinan tidak perlu terburu-buru mengadakan pemekaran wilayah administratif.

Dalam era globalisasi ini muncullah tantangan baru yang lebih canggih yang berupa dengungan ilmiah bahwa negara-bangsa (*nation state*) seperti Indonesia sudah tidak memadai lagi dan harus diganti dengan bentuk lain, misalnya berupa negara suku (*ethnic state*), negara kepentingan (*corporate state*), dan negara agama (*religius state*). Dalam alur pikir demikian itu, pemisahan masa mendatang. Satu pertanyaan yang perlu dipikirkan jawabannya adalah apakah masuknya alur pikir di atas ke Indonesia sekadar merupakan konsekuensi globalisasi ataukah merupakan subversi yang terencana? Geostrategi Indonesia adalah metode yang harus digunakan dalam pencarian jawaban atau pertanyaan di atas, sebab bentuk-bentuk negara sebagai alternatif negara bangsa mempunyai konsekuensi ruang, kekuasaan, dan budaya yang berbeda.

Secara harfiah, disintegrasi bangsa bermakna hilangnya kaitan integratif antar-unsur kekuatan bangsa sehingga hubungan menjadi longgar dan pada gilirannya asas kekeluargaan ditinggalkan. Selama periode antara menjelang Pemilu 1999 dan selesainya SU MPR merupakan periode yang di dalamnya para elite politik mendemonstrasikan secara vulgar cara-cara menyulut disintegrasi bangsa. Terlalu salahkah kalau pengikutnya masing-masing menyanyikan irama serupa? Jika dilihat dari segi geopolitik dan geostrategi, terjadinya disintegrasi bangsa dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal.

1) Faktor Eksternal

Sejak sirnanya Uni Soviet, Barat muncul sebagai pemenang ideologi dan sekaligus merasa sebagai pemenang budaya. Dalam suasana euforia semacam itu muncullah keyakinan dalam masyarakat Barat bahwa nilai-nilai yang mereka anut adalah superior dan harus dipaksakan ke seluruh jagat raya dengan rumusan bahwa sistem nilai yang mereka anut memiliki kebenaran dan validitas universal. Sebagai contoh, salah satu tujuan strategi AS di kawasan Asia Pasifik adalah mendorong dan mendukung proses demokratisasi (tentu saja demokratisasi sesuai dengan yang berlaku di sana). Itu adalah bagian dari dokumen Pentagon yang logikanya hanya berwarna militer. Sudah barang tentu tujuan itu dapat dijabarkan menjadi tindakan nyata dalam bentuk terbuka dan tertutup (subversi) dengan menghalalkan segala cara dan yang paling murah dan paling kecil risiko fisiknya adalah melalui uang.

Tindakan terbuka antara lain memberikan bantuan peningkatan kualitas SDM Indonesia khususnya generasi muda, melalui penyediaan informasi secara luas dan terbuka, bantuan pendidikan di luar negeri, pertukaran siswa, atau tenaga profesional. Upaya terbuka itu dengan

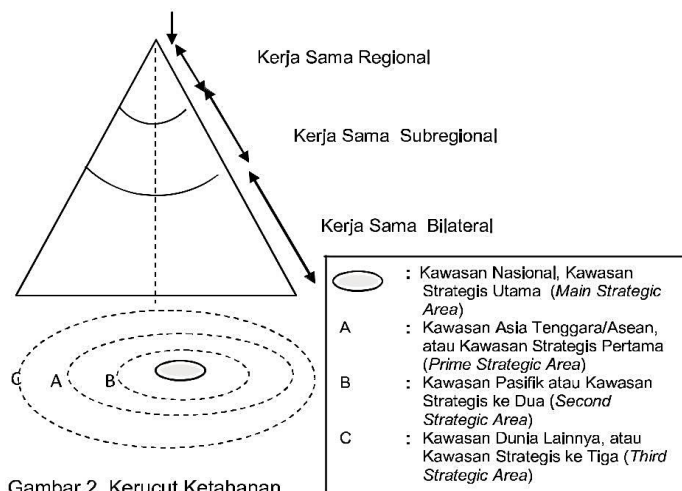
sangat mudah ditumpangi dengan muatan kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat, supremasi budaya Barat, dan sebagainya. Bahkan, pertukaran misi kebudayaanpun dapat dijadikan wahana yang baik untuk maksud tersebut, apalagi film atau sinetron. Adapun tindakan tertutup antara lain dapat berupa pengadudombaan antarkekuatan dalam masyarakat, memengaruhi pemilihan pejabat penting (apa lagi jabatan Presiden), dan perumusan kebijakan.

Usaha merekapun mendapat dukungan berbagai peluang dalam melancarkan tindakan subversi, antara lain adanya bibit pertentangan yang multidimensional di dalam negeri, adanya kebiasaan korupsi, dan politik uang (*money politics*) serta ditambah lagi dengan adanya kenyataan bahwa aparat intelijen serta TNI sedang terus dihujat sehingga tumpul sekali. Pertanyaan lanjutannya adalah, apakah Indonesia akan selalu menjadi sasaran intervensi dan subversi asing? Jawabannya adalah ya, karena beberapa hal sebagai berikut:

- a) Secara geopolitik, Indonesia menduduki *Sea Lanes Of Communication* (SLOC) atau alur pelayaran vital di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia sehingga Indonesia harus dibuat pro Barat dan sekurang-kurangnya akomodatif terhadap kepentingan Barat. Terlebih lagi di antara 7 selat strategis dunia, 4 berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Sudah barang tentu, menurut pandangan geopolitik Alfred Thayer Mahan, Indonesia memiliki *bargaining power* yang kuat berupa *choke points* dalam pengendalian lalu lintas laut yang melewati SLOC;
- b) Dalam suasana kecemasan pihak Barat terhadap perkembangan Islam yang dahsyat, mereka melihat Indonesia merupakan negara yang moderat. Oleh karena itu, ada kepentingan menjaga Indonesia agar tetap moderat dan bersahabat. Untuk itu, harus dilakukan berbagai bentuk subversi;
- c) Potensi Indonesia sebagai penjuru ASEAN (memiliki *power position* di Asia Tenggara) dengan luas wilayah setengah dari seluruh wilayah Asia Tenggara. “Memegang” Indonesia berarti “memegang” ASEAN, dan ini merupakan aset politik yang luar biasa dalam rangka membendung pengaruh Cina yang oleh pihak Barat dipersepsikan sebagai ancaman masa depan;
- d) Oleh karena itu, kita tidak boleh naif dengan menganggap bahwa dalam pemilihan Presiden tidak akan ada intervensi

dari luar. Indonesia terlalu “berharga” untuk dibiarkan jatuh ke dalam lingkaran *sphere of influence* yang tidak atau kurang bersahabat dengan Barat.

Dalam menghadapi anasir-anasir luar perlu disusun satu geostrategi dengan memperhatikan adanya kenyataan bahwa dunia telah saling terkait satu sama lain dengan derajat transparansi yang semakin tinggi. Geostrategi itu juga dilandasi dengan kesadaran bahwa ketahanan nasional saja tidaklah cukup untuk menjamin rasa aman rakyat dan kelangsungan pembangunan nasional apabila tidak didukung oleh ketahanan regional. Atas dasar itu, geostrategi Indonesia secara stereoskopis berbentuk sebagai satu kerucut ketahanan (lihat gambar di bawah).



Gambar 2 Kerucut Ketahanan

Kerucut ketahanan pada dasarnya merupakan satu arsitektur kerja sama yang pada bidang dasarnya adalah visualisasi kerja sama spasial, sedangkan pada bidang vertikalnya adalah visualisasi dari kerja sama struktural yang terproyeksikan secara kawasan.

Kerucut ketahanan harus dibina secara bersama-sama agar manfaatnya dapat terwujud, yaitu berupa “penyangga” atau “selubung” bagi ketahanan nasional kita. Arsitektur itu adalah representasi dari kesadaran ruang yang harus terus dihidupkan agar dapat menjadi acuan visi politik luar negeri (termasuk politik perekonomian) dan politik pertahanan.

Ketahanan tingkat regional yang para unsur pelakunya merupakan negara-negara berdaulat hanya bisa terwujud apabila terdapat saling percaya, saling menghormati yang diwujudkan dalam bentuk kerja sama seerat-eratnya atas dasar manfaat bersama. Kebersamaan yang multidimensional ini meliputi bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan

keamanan. Mengingat luasnya ruang yang ada, arsitektur kerja sama diwujudkan secara tiga dimensional sebagai berikut:

- a) Secara spasial, ruang kepentingan dibagi menjadi kawasan strategis utama, kawasan strategis pertama, kawasan strategis kedua, dan kawasan strategis ketiga. Setiap kawasan strategis memiliki dampak yang berbeda terhadap ketahanan nasional kita. Adalah ASEAN atau Asia Tenggara (Kawasan A) yang kita anggap memiliki dampak paling langsung, seandainya terjadi apa-apa di dalam kawasan tersebut adalah kepentingan kita yang amat vital untuk menciptakan kebersamaan dalam kawasan ini. Oleh karena itu, seyogianyalah kawasan ASEAN atau proses ASEAN pada umumnya dijadikan *corner stone* dari politik luar negeri Indonesia. Demikianlah seterusnya dengan kawasan-kawasan berikutnya, yaitu B dan C yang memiliki tingkat kesegeraan dan dampak yang timbul di setiap kawasan terhadap Indonesia;
- b) Secara fungsional/vertikal, ruang kepentingan dibagi menjadi ruang kerja sama yang saling mendukung dengan ruang kerja sama subregional (misalnya ASEAN) dan pada gilirannya juga harus saling mendukung dengan ruang kerja sama regional (misalnya, *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC), *ASEAN Regional Forum* (ARF), dan sebagainya). Kita mengetahuinya bahwa setiap anggota ASEAN menjamin kerja sama bilateral atau multilateral dengan banyak negara. Akan tetapi, mengingat tiap anggota ASEAN mematuhi traktat ASEAN dan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), diharapkan atau bahkan dapat diasumsikan bahwa berbagai kerja sama yang dilakukan tidak merugikan ASEAN dan bahkan memperkuat posisi ASEAN. Demikian juga pada gilirannya setiap anggota ASEAN juga menjadi anggota ARF atau APEC, diharapkan bahwa kedua forum dalam cakupan ruang yang berbeda luasnya itu dapat saling menjunjung dan menambah kredibilitas ASEAN;
- c) Secara kawasan, apabila pembentukan kerucut ketahanan merupakan geostrategi Indonesia di dalam menangkal anasir-anasir luar, di dalamnya harus dilandasi oleh saling percaya dan saling menghargai tadi. Untuk itu, ketahanan regional pada arsitektur kerucut pada dasarnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Ketahanan nasional setiap negara di dalam kerucut perlu diupayakan seoptimal mungkin agar dapat memberikan kontribusi positif pada kawasannya. Asumsinya adalah bahwa hanya dengan ketahanan nasional yang baik sajalah satu negara akan dapat memberikan peran yang bermakna pada kawasan. Sebaliknya, apabila instabilitas politik dan ekonomi terus mengguncang suatu negara mana mungkin negara bersangkutan menyisakan waktu untuk menopang kepentingan kawasan;
- (2) Komitmen terhadap asosiasi negara sekawasan haruslah utuh dan konsisten (misalnya sesuai TAC) agar dengan demikian kepentingan bersama (misalnya ASEAN) tidak disubordinasikan pada kepentingan *Five Power Defense Arrangement* (FPDA). Komitmen terhadap ASEAN akan menguat apabila organisasi ini dapat memberikan manfaat bagi anggotanya, setidaknya-tidaknya mampu memberikan paparan (*exposure*) internasional yang bergengsi. Sebaliknya, apabila kemanfaatan rendah seperti *South Asia Association for Regional Cooperation* (SAARC), jangan diharapkan terwujud komitmen yang solid. Di sini tampak bahwa manakala komitmen bagus dari seluruh anggota asosiasi, kawasan yang bersangkutan tidak akan kondusif bagi persemaian anasir-anasir negatif bagi tiap negara anggota;
- (3) Kualitas interaksi antar-anggota asosiasi yang komponen-komponennya adalah tingkat kerja sama (dalam arti kualitasnya) dan kemauan untuk mengakomodasikan kepentingan negara anggota lainnya di dalam kebijakan nasional. Terutama yang terakhir ini hanya dapat terwujud apabila sudah terjalin rasa saling percaya. Sebagai contoh, kepentingan Singapura untuk menjamin keselamatan penerbangan dari dan ke Singapura telah diakomodasikan oleh Indonesia dalam bentuk pemberian delegasi atas sebagian *Flight Information Region* (FIR) Indonesia. Selain saling percaya, kualitas interaksi juga menunjukkan adanya komitmen yang kuat;

- (4) Kemampuan adaptasi dari asosiasi terhadap fluktuasi maupun arus perkembangan lingkungan sesungguhnya merupakan indikator terhadap kualitas kebersamaan yang telah terjalin.

2) Faktor Internal

Modernisasi di segala bidang ternyata telah memperlebar belahan sosial (*social cleavage*) di tengah-tengah masyarakat, sesuatu yang selalu menjadi kekhawatiran dan obsesi para pendiri republik ini. Mulai dari pemilihan bahasa nasional, yang bukan berasal dari bahasa daerah suku yang mayoritas, dapat merupakan unsur integratif karena antarsuku bangsa tidak saling iri lagi. Kita harus selalu ingat dan waspada bahwa bangsa kita menegara adalah berkat kesepakatan. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila demi kemajuan demokrasi (agar mendapatkan pujian dari luar negeri) semua kesepakatan diabaikan. Kerawanan yang melekat pada diri bangsa setiap saat dapat mengemuka menjadi unsur disintegrasi yang mematikan. Kerawanan itu antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Ketimpangan pertumbuhan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur dan juga antara Jawa dan luar Jawa. Sesungguhnya hal itu bukan merupakan kesengajaan pemerintah (sejak zaman kolonial), melainkan dapat dipersepsikan secara keliru bahwa ada unsur kesengajaan dari pihak pusat untuk menelantarkan daerah-daerah yang kurang maju. Lebih buruk lagi, ketimpangan yang terjadi diinterpretasikan sebagai ketidakadilan pemerintah pusat.

Bukanlah hal itu pernah memicu berbagai jenis pemberontakan bersenjata pada masa lalu? Apa yang terjadi sekarang ini di Aceh, Maluku, dan Papua merupakan pengulangan dari yang pernah terjadi atau dapat juga dikatakan bahwa pusat tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalunya. Padahal, kalau dilihat secara jernih, faktor curah hujan yang lebih banyak, tanah yang lebih subur, serta tersedianya tenaga terampil yang cukup mendorong Indonesia bagian barat lebih mudah berkembang. Adapun untuk masalah pemasaran, jumlah penduduk yang besar merupakan suatu hal yang mendorong kegiatan perekonomian yang lebih cepat dari Indonesia bagian timur, belum lagi sistem sirkulasi yang baik untuk distribusi dalam negeri dan ekspor. Akan tetapi, memang harus diakui bahwa kenyataan-kenyataan semacam itu akan selalu terbenam di bawah timbunan kemarahan terhadap pemerintah pusat, apalagi kalau dicampuri oleh kehadiran

para provokator seperti di Ambon dan tempat-tempat lainnya. Rasa ketidakadilan (belum tentu seluruhnya benar) di tangan para petualang politik dapat memicu konflik SARA yang memang merupakan belahan sosial bangsa kita.

- b) Mencairnya perekat kesatuan dan persatuan bangsa di bawah tekanan globalisasi dan modernisasi yang lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat kasat mata. Kemajuan yang antara lain ditandai oleh produk nasional bruto (*Gross National Product/GNP*), pendapatan per kapita (*income per capita*), produktivitas dalam ton/jam atau ton/luas tanah, dan sebagainya tidaklah mudah untuk menempatkan atau meyakinkan hal-hal yang bersifat mental ideologis, lebih-lebih dengan tingkah laku para remaja yang sangat menggandrungi budaya global. Masa depan wawasan kebangsaan sebagai perekat sosial kelihatannya tidak terlalu menggembirakan, apalagi kalau dikaitkan dengan adanya kenyataan bahwa lembaga pendidikan hanya menyuguhkan pengajaran. Keadaan semacam itu membuka peluang yang amat luas bagi kemerosotan kedaulatan bangsa dalam menghadapi tantangan mendatang yang antara lain berbentuk individualisme yang sangat diametral dengan asas kekeluargaan. Tidaklah terlalu mengherankan bahwa rasa dikelabui oleh logika dalam kaitannya dengan Pancasila, antara lain dengan mengatakan bahwa ideologi bukanlah merupakan salah satu syarat bagi berdirinya satu negara.

Oleh karena itu, buat apa dipertahankan, apalagi dikeramatkan? Itulah kira-kira argumentasi dari generasi mendatang yang hidup dalam dunia tanpa batas.

- c) Primordialisme sebagai strategi politik bertujuan untuk menekan lawan atau pemaksaan kehendak. Itu adalah pemanfaatan secara licik kerawanan bangsa yang amat mengkhawatirkan oleh kelompok politik yang tidak yakin bahwa tujuan politiknya dapat tercapai apapun penyebabnya. Pada saat kampanye pemilu tiba atau pada saat menjelang dan selama SU MPR terjadilah tontonan yang berupa pemanfaatan kelompok-kelompok primordial sebagai kelompok penekan (*pressure group*) dengan berbagai caranya. Di tingkat daerah terjadi hal yang sama pada saat pemilihan kepala daerah, terutama di provinsi. Apalagi jika kejadian semacam itu berlangsung lama atau

dalam frekuensi yang semakin meninggi, belahan sosial dapat berubah menjadi jurang lebar yang menghalangi persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk mewujudkan pembinaan setiap keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi tuntutan dan tantangan masa depan perlu disusun strategi pembinaan masyarakat dengan jalur pembinaan sebagai berikut:

- (1) Strategi pembinaan setiap individu yang dimaksudkan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan nasional dilaksanakan dengan strategi empat jalur, yaitu sebagai berikut:
 - (a) Jalur pembinaan keluarga, ditujukan untuk menjangkau para pemuda dan remaja dalam menghayati norma-norma moralitas bangsa dalam suasana lingkungan keluarga. Upaya itu diharapkan agar sejak awal dapat menanamkan masalah kebangsaan, rasa kebangsaan, serta kerukunan hidup berkeluarga dan bermasyarakat;
 - (b) Jalur pembinaan pendidikan, ditujukan untuk secara formal membina keuletan dan ketangguhan yang diselaraskan dengan tingkat serta perkembangan daya pikir serta pemikiran anak didik;
 - (c) Jalur pembinaan lingkungan kerja ditujukan untuk menjangkau lapisan masyarakat yang berada pada tingkat umur kerja. Dengan menggunakan pendekatan persuasif dan promotif terhadap pimpinan lingkungan kerja secara tepat, diharapkan jalur ini akan paling efektif. Di sini terdapat kesempatan untuk menjangkau secara luas setiap pekerja atau karyawan selaku karyawan atau selaku kepala keluarga sehingga keberhasilan pada jalur ini akan membantu jalur pembinaan keluarga;
 - (d) Jalur pembinaan lingkungan pergaulan, dimaksudkan untuk menjangkau lapisan masyarakat yang tidak terjangkau melalui ketiga jalur pembinaan lainnya.

- (2) Strategi pembinaan masyarakat dimaksudkan untuk mengendalikan agar perkembangan masyarakat dan pergeserannya tidak menyimpang dari moralitas bangsa serta kondusif bagi terlaksananya kebijakan pokok. Strategi pembinaan dua jalur mencakup hal-hal sebagai berikut:
- (a) Jalur pembinaan langsung, ditujukan untuk memperoleh hasil langsung secara lebih cepat dengan menggunakan atau melalui perangkat organisasi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan yang ada. Peranan pemerintah sangat aktif dan besar dalam rangka pencapaian hasil segera. Metode yang digunakan antara lain berupa tatap muka, pemerataan, pengaturan, perizinan, dan kewenangan-kewenangan lain yang dimiliki pemerintah;
 - (b) Jalur pembinaan tidak langsung, ditujukan untuk merangsang dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Penumbuhan motivasi ini dilaksanakan melalui media massa, tokoh-tokoh pemimpin informal, organisasi masyarakat (ormas), serta organisasi politik (orpol), dan sebagainya.
- (3) Strategi pembinaan kelembagaan, dimaksudkan untuk menciptakan kelancaran pembangunan nasional dan dengan demikian juga pemantapan dan peningkatan ketahanan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional hanya mungkin diwujudkan manakala lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembangunan nasional terintegrasi secara komprehensif integral. Strategi pembinaan kelembagaan ditempuh melalui dua jalur, yaitu sebagai berikut:
- (a) Jalur pembinaan perangkat lembaga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan setiap lembaga yang terlibat dalam proses pembangunan pada semua aspek berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya pengembangan kelengkapan personel,

keahlian personel, mekanisme kerja memantapkan koordinasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Pemantapan peranan setiap lembaga juga mendapatkan prioritas pembinaannya yang terwujud dalam semua mata rantai lembaga yang utuh;

- (b) Jalur pembinaan kemampuan manajerial, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan manajerial bagi setiap pejabat pemerintah atau swasta dalam bidang pekerjaan masing-masing. Khusus untuk menumbuhkan kewiraswastaan di kalangan masyarakat.
- (4) Strategi pembinaan lingkungan, dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pembangunan nasional atau terhadap kehidupan masyarakat. Strategi pembinaan dua jalur meliputi jalur-jalur berikut:
- (a) Jalur pembinaan dampak positif dari lingkungan guna menciptakan dan memperbesar peluang-peluang yang bermanfaat, baik bagi upaya pembangunan maupun bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - (b) Jalur penanggulangan dampak negatif dari lingkungan untuk menekan akibat dari dampak negatif tersebut agar tetap berada di bawah ambang toleransi keamanan dan pengamanan.

BAB III

KETAHANAN NASIONAL

7. Umum

Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala TAHG, baik yang datang dari dalam maupun luar yang dapat membahayakan integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Sebagai sebuah sistem, Tannas terdiri dari berbagai komponen dan masing-masing komponen atau gatra yang memiliki karakteristik yang saling berinteraksi dan berinterkoneksi satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen tersebut menggambarkan keseluruhan dan sistem yang saling berinteraksi satu sama lain sesuai bentuk negara kesatuan, di mana setiap wilayah terkandung aspek Trigatra yang meliputi Geografi, Demografi, SKA, dan aspek Pancagatra yang meliputi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hankam. Kondisi gatra tersebut akan selalu berubah dan memiliki tingkat ketahanan masing-masing sesuai dengan pembinaannya.

8. Filosofi Ketahanan Nasional Indonesia

a. Latar Belakang

Proklamasi 17 Agustus 1945 telah mengantarkan Indonesia ke alam dan suasana kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang merdeka dan berdaulat dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia bertekad mewujudkan cita-citanya dan pencapaian tujuan nasionalnya sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945.

Suatu cita-cita yang mengingatkan adanya kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk itu, bangsa Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kehidupannya dalam suatu sistem kehidupan nasional yang mencerminkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi nasional dan dasar negara, serta UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan sumber dan norma dasar dalam rangka pengamalan Pancasila. Dalam mengatur dan

menyelenggarakan kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksi dengan lingkungannya, baik dalam lingkup global, regional, maupun nasional. Untuk mengembangkan kehidupannya dan merealisasikan berbagai kepentingan nasionalnya, bangsa Indonesia memiliki cara pandang, cara tinjau, cara tanggap indrawi yang dinamakan wawasan nusantara (Wasantara) sebagai wawasan nasional. Wasantara yang berfungsi sebagai pedoman, tuntunan, dan panduan agar segenap upaya bangsa tetap mengarah pada perwujudan cita-cita nasional dan pencapaian tujuan nasionalnya.

Suatu tujuan yang telah menjadi ikrar atau kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia adalah membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam upaya mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai bentuk TAHG, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk itu, diperlukan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam aspek dan dimensi kehidupan nasional yang disebut Tannas.

Tannas perlu ditingkatkan dan dipupuk atau dibina terus-menerus berdasarkan Wasantara melalui upaya pembangunan nasional di segenap aspek dan dimensi kehidupan. Adanya saling keterkaitan antara Wasantara, Tannas, dan pembangunan nasional menempatkan Wasantara berfungsi sebagai pedoman, tuntunan, dan sebagai rambu-rambu pemandu bagi perwujudan Tannas. Keterkaitan Tannas terhadap pembangunan nasional tercermin pada konsepsi Tannas untuk menumbuhkan kondisi kehidupan nasional yang diinginkan melalui pembangunan nasional. Makin meningkatnya intensitas pembangunan nasional akan meningkatkan Tannas. Sebaliknya, kukuhnya Tannas akan mendorong lajunya pembangunan nasional. Secara implisit, Tannas mengandung konsepsi tentang pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam segala aspek dan dimensi kehidupan nasional berdasarkan nilai Pancasila, norma UUD NRI Tahun 1945, dan Wasantara.

Dari pengalaman sejarahnya, bangsa Indonesia makin menyadari hakikat jati diri dan lingkungannya yang serba nusantara berikut kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang dihadapinya. Kesadaran bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh konstelasi geografi dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah, memberikan motivasi, dan dorongan bagi terciptanya suasana damai dan tenteram dalam kehidupan nasional, serta terselenggaranya ketertiban dan keadilan dalam membina hubungan antarbangsa dalam tatanan internasional.

Kehidupan bangsa dan negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak luput dari berbagai gejolak dan ancaman di dalam negeri atau luar negeri yang hampir-hampir membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Meskipun begitu, bangsa dan negara Indonesia selain telah mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya terhadap ancaman dari luar antara lain agresi militer Belanda, juga telah mampu menegakkan wibawa pemerintah terhadap gerakan separatis, pemberontakan PKI, DI/TII, bahkan mampu merebut kembali Papua ke dalam NKRI. Jika ditinjau dari geopolitik dan geostrategis dengan posisi geografis, potensi SKA serta besarnya jumlah dan kemampuan penduduk yang dimilikinya telah menempatkan Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh antarnegara besar dan adikuasa. Hal tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan sehingga dapat memengaruhi, bahkan membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan sebagaimana dikemukakan di atas, NKRI masih tetap tegak berdiri sebagai suatu bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.

Hal tersebut membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk TAHG dari manapun datangnya. Dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa kini dan pada masa yang akan datang, bangsa Indonesia harus tetap memiliki keuletan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan. Kondisi kehidupan nasional yang merupakan pencerminan Tannas didasari oleh landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945, dan landasan konseptual Wasantara.

b. Landasan Idiil Pancasila

Peranan Pancasila sebagai pandangan hidup menyadarkan rakyat Indonesia bahwa hakikat hidup pada dasarnya adalah menganut alam pikiran yang mengungkapkan keterkaitan antara manusia dan Tuhannya, antara manusia dan manusia, serta antara manusia dan lingkungannya. Pancasila yang bulat dan utuh merupakan sumber kejiwaan masyarakat yang memberikan pedoman bahwa kodrat manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, Pancasila merupakan penuntun dan pengikat moral serta merupakan norma sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peranan Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan panggilan hidup dan ikrar segenap bangsa Indonesia dalam upaya untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata

materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam wadah NKRI yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Peranan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila ialah keseimbangan, keserasian dan keselarasan, serta persatuan dan kesatuan. Perpaduan nilai-nilai dasar tersebut telah mampu mewadahi kebhinnekaan aspirasi bangsa Indonesia seluruhnya.

c. Landasan Konstitusional UUD NRI Tahun 1945

Bertitik tolak dari Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum serta mengandung cita-cita hukum, UUD NRI Tahun 1945 merupakan putusan politik nasional yang dituangkan ke dalam norma-norma konstitusional dalam rangka menentukan sistem negara dan pemerintahan negara dengan bentuk-bentuknya secara spesifik. Dengan demikian, seluruh kehidupan bangsa dan negara pada dasarnya tercakup dalam lingkup pengaturan yang tertuang melalui pranata-pranata yang disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan norma-norma konstitusional tersebut.

Republik Indonesia bukanlah negara kekuasaan, dalam arti bahwa penyelenggaraannya didasarkan pada kekuasaan semata-mata sehingga membawa sistem dan pola kehidupan politik yang totaliter, melainkan negara hukum, yakni kekuasaan dibenarkan dan diatur penyelenggaraannya menurut hukum yang berlaku. Adapun hukum sebagai pranata sosial disusun bukan untuk kepentingan golongan atau perseorangan, melainkan untuk kepentingan seluruh rakyat dan bangsa sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan sebesar-besarnya, yaitu menjaga ketertiban bagi seluruh masyarakat.

Republik Indonesia adalah negara yang memiliki UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusinya. Dalam semangat konstitusi tersebut, kekuasaan pemerintah tidak bersifat absolut atau tidak tak terbatas. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan melalui DPR dan DPD serta Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dituangkan lebih lanjut ke dalam kelembagaan tinggi negara dan tata kelembagaan negara. Dengan demikian, sistem negara bersifat demokrasi yang tercermin dalam proses pengambilan putusan yang bersumber dan mengacu kepada kepentingan serta aspirasi rakyat.

d. Landasan Konseptual Wawasan Nusantara

Pengejawantahan Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diaktualisasikan dengan mempertimbangkan wujud konstelasi dan posisi geografi serta segala isi dan potensi yang dimiliki wilayah nusantara serta sejarah perjuangan bangsa. Hal tersebut menimbulkan

rangsangan dan dorongan kepada bangsa Indonesia untuk membina dan mengembangkan potensi dari segala aspek kehidupan nasionalnya secara dinamis, utuh, dan menyeluruh. Agar mampu mempertahankan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup serta pertumbuhannya dalam perjuangan mewujudkan cita-cita nasional.

Dalam menyelenggarakan kehidupan nasionalnya, bangsa Indonesia didorong oleh motivasi untuk mencapai tujuan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dihadapkan pada lingkungan yang serba berubah dan merasa perlu memiliki cara pandang atau wawasan nasional yang dinamakan Wasantara. Wasantara pada hakikatnya merupakan pancaran falsafah Pancasila yang diterapkan dalam kondisi nyata Indonesia. Wasantara melandasi upaya meningkatkan Tannas berdasarkan dorongan untuk mewujudkan cita-cita dan mencapai tujuan nasional serta menjamin kepentingan nasional. Untuk mewujudkan cita-cita nasional dan mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia selain memerlukan cara pandang yang dinamakan Wasantara, juga perlu membina keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional yang dinamakan Tannas.

9. Pengantar Ketahanan Nasional

a. Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala TAHG, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

Dalam pengertian di atas, Tannas adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini terus-menerus dan sinergis, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa suatu konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsepsi tersebut dinamakan Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia. Dengan demikian ciri-ciri Tannas antara lain:

- 1) Ketahanan nasional merupakan prasyarat utama bagi bangsa yang sedang membangun menuju bangsa yang maju dan mandiri dengan semangat tidak kenal menyerah yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang timbul;
- 2) Menuju mempertahankan kelangsungan hidup. Bangsa Indonesia yang baru membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan yang dicita-citakan;
- 3) Ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan dengan menjadikan ciri mengembangkan ketahanan nasional berdasarkan rasa cinta tanah air, setia kepada perjuangan, ulet dalam usaha yang didasarkan pada ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keuletan dan ketangguhan sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dinamika perjuangan, baik dalam pergaulan antarbangsa maupun dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Hakikat Ketahanan Nasional dan Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional

Konsepsi Tannas Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh serta terpadu berlandaskan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Wasantara. Dengan kata lain, konsepsi Tannas Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besar kemakmuran yang adil dan merata, rohaniyah, dan jasmaniah. Sementara itu, keamanan adalah kemampuan bangsa dalam melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar dan dari dalam.

Hakikat Tannas Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat konsepsi Tannas Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

c. Asas Ketahanan Nasional

1) Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar serta esensial, baik sebagai perseorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung sehingga kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri.

Realisasinya, kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada kesejahteraan, tetapi tidak berarti mengabaikan keamanan. Sebaliknya, memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Baik kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada berdampingan pada kondisi apapun. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolok ukur Tannas.

2) Asas Komprehensif Integral (Menyeluruh Terpadu)

Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, Tannas mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu (komprehensif integral).

3) Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar

Sistem kehidupan nasional merupakan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu, diperlukan sikap mawas ke dalam maupun ke luar.

a) Mawas ke Dalam

Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal itu tidak berarti

bahwa Tannas mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit.

b) Mawas ke Luar

Mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Untuk menjamin kepentingan nasional, kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional agar memberikan dampak ke luar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Namun, interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan.

4) Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan dan perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan.

d. Sifat, Kedudukan, dan Fungsi Konsepsi

1) Sifat Ketahanan Nasional

Tannas memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asasnya, yaitu sebagai berikut:

a) Mandiri

Tannas bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian (*independent*) itu merupakan prasyarat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global (*interdependent*).

b) Dinamis

Tannas tidaklah tetap, tetapi dapat meningkat ataupun menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Oleh karena itu, upaya peningkatan Tannas harus senantiasa diorientasikan ke

masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.

c) Wibawa

Keberhasilan pembinaan Tannas Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia.

d) Konsultasi dan Kerja Sama

Lebih pada sikap konsultatif dan kerja sama serta saling menghargai dengan konsepsi Tannas Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistik, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

2) Kedudukan dan Fungsi Konsepsi Ketahanan Nasional

a) Kedudukan

Konsepsi Tannas merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wasantara dan Tannas berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional di dalam paradigma kehidupan nasional.

b) Fungsi

Konsepsi Tannas berdasarkan tuntutan penggunaannya berfungsi sebagai doktrin dasar nasional, metode pembinaan kehidupan nasional Indonesia, dan sebagai pola dasar pembangunan nasional.

- (1) Konsepsi Tannas dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami guna menjamin terjalannya suatu pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja untuk menyatupadukan upaya bersama bangsa yang bersifat interregional (wilayah), intersektoral, dan multidisiplin. Tanpa adanya doktrin dasar nasional dapat terjadi cara berpikir yang terkotak-kotak (sektoral), kesimpangsiuran dalam

arah dan tindakan, serta tidak konsisten dengan falsafah yang telah disepakati sehingga mengakibatkan pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang dapat memicu terjadinya hambatan bahkan penyimpangan dari tujuan dan cita-cita nasional;

- (2) Konsepsi Tannas dalam fungsinya sebagai pola dasar pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang meliputi segenap bidang dan sektor pembangunan secara terpadu yang dilakukan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- (3) Konsepsi Tannas dalam fungsinya sebagai metode pembinaan kehidupan nasional pada hakikatnya merupakan suatu metode komprehensif integral. Dalam merumuskan kebijakan nasional, metode ini merupakan metode umum berdasarkan Astagatra yang meliputi unsur-unsur Geografi, Demografi/ Kependudukan, SKA, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hankam.

10. Dasar, Perincian, dan Hubungan Gatra

a. Dasar Pemikiran Astagatra

- 1) Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa, memberikan keyakinan kepada rakyat Indonesia bahwa dalam kehidupannya manusia adalah sebagai makhluk pribadi sekaligus sebagai makhluk sosial serta memiliki tiga segi hubungan utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu hubungan antara manusia dan Tuhannya, antara manusia dan manusia/masyarakat, serta hubungan antara manusia dan lingkungannya. Dinamika kehidupan hubungan ini akan menumbuhkan berbagai hubungan yang dibina secara harmonis. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia memerlukan ruang hidup. Suatu ruang hidup dengan berbagai dukungan yang menyertainya, baik untuk kepentingan lahiriah (materiel) maupun batiniah (spiritual).
- 2) Bangsa Indonesia mensyukuri akan segala anugerah Tuhan, baik dalam wujud konstelasi dan posisi geografi maupun semua isi dan

potensi yang dimiliki wilayah nusantara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat, harkat, martabat bangsa, dan negara Indonesia dalam pergaulan antarbangsa. Dalam memanfaatkan isi dan potensi SKA, sangat diperlukan adanya kualitas manusia Indonesia, lebih-lebih menghadapi penduduk yang terus bertambah. Adapun bumi atau alam yang menyediakan segala kebutuhan manusia dapat dikatakan relatif tetap atau tidak bertambah. Dengan kata lain, bahwa manusia sebagai objek yang terus menginginkan terpenuhinya kebutuhan yang digali dari SKA dan sangat bergantung pada kondisi geografi merupakan ketiga unsur atau ketiga aspek alamiah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan saling terkait.

- 3) Telah menjadi kesepakatan seluruh rakyat Indonesia bahwa dalam menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk yang relatif besar, SKA yang tersebar di seluruh wilayah nusantara dan kondisi geografi yang cukup strategis terus berusaha menciptakan suatu kondisi seluruh aspek kehidupan nasional yang sesuai dengan perkembangan lingkungan, terutama aspek-aspek kehidupan sosial yang bersifat dinamis.
- 4) Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, manusia Indonesia menyelenggarakan kehidupannya dengan mengadakan hubungan-hubungan yang meliputi hal-hal berikut:
 - a) Hubungan manusia dengan Tuhan menurunkan atau menimbulkan agama;
 - b) Hubungan manusia dengan cita-cita menciptakan ideologi;
 - c) Hubungan manusia dengan kekuasaan menimbulkan kehidupan politik;
 - d) Hubungan manusia dengan pemenuhan kebutuhan menimbulkan kehidupan ekonomi;
 - e) Hubungan manusia dengan manusia mewujudkan kehidupan sosial (masyarakat) dengan segenap perangkatnya, termasuk norma/hukum yang harus dipatuhi;
 - f) Hubungan manusia dengan rasa, cipta, karsa, dan karya mewujudkan budaya;
 - g) Hubungan manusia dengan rasa aman mewujudkan kehidupan pertahanan dan keamanan;

- h) Hubungan manusia dengan pemanfaatan dan penguasaan alam menciptakan lptek.
- 5) Berdasarkan rumusan pengertian Tannas dan kondisi kehidupan nasional Indonesia, sesungguhnya Tannas merupakan gambaran dan kondisi sistem (tata) kehidupan nasional pada saat tertentu. Sebagai kondisi yang bergantung pada waktu, ruang, dan lingkungan, Tannas bersifat dinamis. Tiap-tiap aspek dalam tata kehidupan nasional relatif berubah menurut waktu, ruang, dan lingkungan, terutama pada aspek-aspek dinamis sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang amat sulit dipantau karena sangat kompleks. Dalam rangka pemahaman dan pembinaan tata kehidupan nasional tersebut, diperlukan penyederhanaan tertentu dari berbagai aspek kehidupan nasional dalam bentuk model yang merupakan hasil pemetaan dari keadaan nyata melalui suatu kesepakatan dari hasil analisis mendalam yang dilandasi teori hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan manusia/masyarakat, serta antara manusia dan lingkungan. Di dalam proses penyederhanaan itu, jumlah aspek kehidupan nasional direduksi sampai jumlahnya sesedikit mungkin, tetapi tetap dapat mempresentasikan ciri-ciri utama dari fenomena dan permasalahan yang disebut gatra. Sesungguhnya jumlah gatra yang digunakan di dalam satu model dapat berapa saja, tetapi perlu diwaspadai bahwa jumlah gatra yang terlalu banyak akan mengakibatkan gambaran kehidupan yang kompleks sehingga tujuan penyederhanaan tidak berhasil.
- 6) Berdasarkan pemahaman tentang hubungan manusia dengan alam sekitarnya, diperoleh pemetaan pada tiga gatra (Trigatra) yang relatif statis, yaitu gatra geografi, gatra demografi, dan gatra SKA. Adapun berdasarkan pemahaman tata hubungan manusia dalam kehidupan sosialnya, diperoleh kesepakatan bahwa dalam konsepsi Tannas Indonesia seluruh aspek kehidupan nasional dipetakan dalam lima gatra sosial (Pancagatra) yang bersifat dinamis dan dianggap dominan, yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan keamanan. Walaupun agama tidak dimunculkan sebagai gatra, nilai-nilai agama harus melandasi semua gatra pada Pancagatra. Demikian pula hukum, yang timbul dari interaksi atau hubungan antara manusia dan manusia masuk dalam gatra sosial budaya. Namun, selanjutnya hukum juga diperlukan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan ideologi, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Demikian pula pengembangan lptek yang

dimasukkan dalam gatra sosial budaya sebagai hasil dari rasa, cipta, karsa, dan karya manusia. Adapun pemanfaatan Iptek merupakan unsur dari gatra ekonomi dan sebagai komoditas. Gatra politik serta gatra pertahanan keamanan merupakan unsur pendukung dalam sistem alat peralatan yang digunakan.

Ketiga gatra alamiah (Trigatra) apabila digabungkan dengan lima gatra sosial (Pancagatra) akan menjadi delapan gatra (Astagatra) yang merupakan model pemetaan menyeluruh dari sistem kehidupan nasional bangsa Indonesia. Kedelapan gatra (Astagatra) tersebut satu sama lainnya secara utuh menyeluruh dan terpadu membentuk tata laku masyarakat bangsa dan negara.

b. Perincian Astagatra

1) Trigatra (Gatra Alamiah)

Trigatra atau gatra alamiah meliputi aspek-aspek suatu negara yang memang sudah melekat pada negara itu. Unsur dari setiap aspek tidak pernah sama spesifikasinya untuk setiap negara. Trigatra meliputi gatra geografi, demografi/kependudukan, dan SKA. Ketiga gatra alamiah tersebut mengandung unsur-unsur alamiah yang bersifat relatif tetap atau statis.

2) Pancagatra (Gatra Sosial)

Pancagatra atau gatra sosial adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Pancagatra meliputi gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kelima gatra sosial tersebut mengandung unsur-unsur yang bersifat dinamis. TAHG yang dihadapi oleh bangsa Indonesia selalu ditujukan pada kelima gatra sosial tersebut. Oleh karena itu, penanggulangannya adalah dengan upaya meningkatkan ketahanan dalam gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Kualitas Pancagatra dalam kehidupan nasional Indonesia tersebut secara terintegrasi serta dalam interaksinya dengan Trigatra mencerminkan tingkat ketahanan nasional Indonesia.

c. Hubungan Antargatra dalam Astagatra

1) Hubungan antara Trigatra dan Pancagatra

Antara Trigatra dan Pancagatra serta antargatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat, yang dinamakan korelasi dan interdependensi dalam arti sebagai berikut:

- a) Tannas pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah (Trigatra) sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional (Pancagatra);
- b) Tannas adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu serta terdapat saling hubungan antargatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional (Astagatra);
- c) Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan memengaruhi kondisi secara keseluruhan;
- d) Tannas Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu *resultant* keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

2) Hubungan Antargatra dalam Trigatra

- a) Antara Gatra Geografi dan Gatra Sumber Kekayaan Alam

Karakter geografi sangat memengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam, dan sebaliknya kekayaan alam dapat memengaruhi karakter geografi.

- b) Antara Gatra Geografi dan Gatra Kependudukan/Demografi

Bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi, dan sebaliknya karakter geografi memengaruhi kehidupan dari penduduknya.

- c) Antara Gatra Demografi/Kependudukan dan Gatra Sumber Kekayaan Alam

Kehidupan dan penghidupan penduduk dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam. Demikian pula sebaliknya, jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan, khususnya kekayaan alam yang dapat diperbaharui. Kekayaan alam mempunyai manfaat nyata jika telah diolah penduduk yang memiliki kemampuan dalam iptek.

3) Hubungan Antargatra dalam Pancagatra

Setiap gatra dalam Pancagatra memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain, dan sebaliknya yaitu setiap gatra menerima kontribusi dari gatra-gatra lain secara terintegrasi.

- a) Hubungan antara gatra ideologi dan gatra politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ideologi sebagai falsafah bangsa dan landasan idiil negara merupakan nilai penentu bagi kehidupan nasional yang meliputi seluruh gatra dalam Pancagatra dalam memelihara kelangsungan hidup dan pencapaian tujuan nasional;
- b) Hubungan antara gatra politik dan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kehidupan politik yang mantap dan dinamis menjalankan kebenaran ideologi memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kehidupan politik bangsa dipengaruhi oleh bermacam hal yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Kehidupan politik bangsa dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan dan kesadaran politik, tingkat kemakmuran ekonomi, ketaatan beragama, keakraban sosial, dan rasa keamanannya. Keadaan politik di segala bidang memberikan rasa aman;
- c) Hubungan antara gatra ekonomi dan gatra ideologi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kehidupan ekonomi yang tumbuh dan merata, akan meyakinkan kebenaran ideologi yang dianut, mendinamisasi kehidupan politik dan perkembangan sosial budaya serta mendukung pengembangan pertahanan dan keamanan merata menunjang stabilitas dan peningkatan ketahanan aspek lain;
- d) Hubungan antara gatra sosial budaya dan gatra ideologi, politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Arti kehidupan sosial budaya yang serasi, stabil, dinamis, berbudaya, dan berkepribadian akan meyakinkan kebenaran ideologi yang berbudaya, kehidupan ekonomi yang tetap mementingkan kebersamaan, serta kehidupan pertahanan dan keamanan yang menghormati hak-hak individu. Keadaan sosial yang terintegrasi secara serasi, stabil, dinamis, berbudaya, dan berkepribadian hanya dapat berkembang dalam suasana aman dan damai. Kebesaran dan keseluruhan nilai sosial budaya bangsa mencerminkan

tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional, baik fisik materiel maupun mental spiritual. Keadaan sosial yang timpang dengan kontradiksi di berbagai bidang kehidupan memungkinkan timbulnya ketegangan sosial yang dapat berkembang menjadi gejolak sosial;

- e) Hubungan antara gatra pertahanan keamanan dan gatra ideologi, politik, ekonomi, serta sosial budaya. Kondisi kehidupan pertahanan dan keamanan yang stabil dan dinamis akan meyakinkan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Keadaan pertahanan dan keamanan yang stabil, dinamis, maju, dan berkembang di seluruh aspek kehidupan akan memperkuat dan menunjang kehidupan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

4) Astagatra dalam Pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan

Peranan setiap gatra untuk kesejahteraan dan keamanan bergantung pada sifat setiap gatra itu, yakni sebagai berikut:

- a) Gatra alamiah mempunyai peranan sama besar, baik untuk kesejahteraan maupun keamanan;
- b) Gatra ideologi, politik, dan sosial budaya mempunyai peranan sama besar untuk kesejahteraan dan keamanan;
- c) Gatra ekonomi relatif mempunyai peranan lebih besar untuk kesejahteraan daripada peranan untuk keamanan;
- d) Gatra pertahanan dan keamanan relatif mempunyai peranan lebih besar untuk keamanan daripada peranan untuk kesejahteraan.

11. Konsepsi Ketahanan Nasional

a. Gatra Geografi

1) Kondisi dan Unsur Dominan

Dari geografi dapat diketahui tempat NKRI di atas bumi yang memberikan gambaran tentang bentuk ke dalam dan bentuk ke luarnya. Bentuk ke dalam menempatkan corak, wujud, dan tata susunan serta bentuk ke luar dapat diketahui situasi dan kondisi lingkungan serta hubungan timbal balik antara negara dan lingkungannya. Negara Indonesia sebagai wadah bangsa Indonesia dengan batas-batas

nasionalnya memberikan ciri yang membedakannya dengan negara lain dan memberikan kemungkinan untuk melangsungkan serta mengembangkan peri kehidupan nasionalnya. Kedudukan yang secara geografis berada pada posisi silang memberikan kepada Indonesia peranan yang sangat penting dalam persoalan global yang dapat berdampak positif dan negatif. Beberapa kondisi umum gatra geografis adalah sebagai berikut:

a) Topografi

Wilayah NKRI berbentuk kepulauan dan terdiri atas ± 17.508 buah pulau. Luas seluruh wilayah kedaulatan $\pm 7,3$ juta km dan dengan wilayah daratan sekitar 1.919,17 km serta dengan memperhitungkan ZEE, luas wilayah daratan dan wilayah lautan adalah satu berbanding empat (1:4). Bagian barat wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau besar, sedangkan bagian timur merupakan kumpulan pulau-pulau kecil, kecuali Jayapura. Pantai-pantai yang berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik pada umumnya lebih curam dan terjal apabila dibandingkan dengan pantai-pantai landai yang berbatasan dengan laut pedalaman Indonesia.

b) Posisi Astronomis

Indonesia terletak di antara 95 dan 141 Bujur Timur, antara 6 Lintang Utara dan 11 Lintang Selatan, serta Indonesia berada di daerah tropik *geostationary orbiter* (GSO), yang terletak di atas khatulistiwa merupakan ruang wilayah yang sangat strategis sebagai tempat kedudukan satelit. Wilayah Indonesia merupakan wilayah khatulistiwa terpanjang di dunia.

Karena letaknya di daerah tropik, iklim Indonesia secara umum panas dan lembab serta banyak gunung berapi. Tumbuh-tumbuhan subur dan hutan terdapat di pulau-pulau sebelah barat, sedangkan semakin ke timur hutan semakin jarang, kecuali di Papua. Di pulau-pulau Sumba, Sumbawa, dan sekitarnya terdapat padang-padang rumput yang luas. Iklim tersebut berpengaruh terhadap aspek peri kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga terhadap pertahanan dan keamanan.

Sebelah timur wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik, wilayah Papua Nugini, dan Australia. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah India (Andaman, Nikobar), Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam. Sebelah barat dan selatan dengan Samudra Hindia.

2) Analisis

- a) Wilayah NKRI adalah wilayah negara kepulauan dengan luas laut 4x luas daratan dan terdiri atas ribuan pulau sehingga masalah komunikasi dan transportasi menjadi sangat vital. Lalu lintas internasional banyak melintasi laut dan udara wilayah Indonesia. Hal itu memberi kemungkinan kepada Indonesia untuk memainkan peranan sebagai “pengawas” dan “pengatur” lalu lintas tersebut sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.
- b) Wilayah sebagai ruang hidup belum dimanfaatkan secara proporsional. Persebaran penduduk Indonesia masih kurang proporsional. Pulau Jawa sangat vital dan strategis sehingga sangat memerlukan perhatian. Penduduk Indonesia yang mendiami pulau-pulau sebelah utara sangat sedikit jika dibandingkan dengan penduduk negara tetangga yang besar, seperti Jepang, RRC, dan India. Sedangkan negara tetangga di sebelah selatan yaitu Australia, penduduknya lebih sedikit. Dengan demikian, daerah-daerah Indonesia yang relatif kosong beserta kekayaan alamnya yang potensial dan melimpah dapat dijadikan sasaran bagi pencarian lebensraum oleh kekuatan-kekuatan dari luar.

3) Arah Pembinaan

- a) Wilayah kedaulatan dan yurisdiksi NKRI harus jelas dan diketahui oleh seluruh bangsa di dunia. Perbatasan wilayah kedaulatan dan yurisdiksi ditetapkan melalui perjanjian dengan negara tetangga yang berbatasan langsung. Pada bagian wilayah yang tidak berbatasan dengan negara lain (di Samudra Hindia dan Pasifik) ditetapkan sesuai dengan ketentuan internasional.
- b) Indonesia menjamin kepentingan bangsa-bangsa di dunia bagi kepentingan lintas damai, baik melalui laut maupun udara sesuai dengan ketentuan. Udara di sepanjang wilayah khatulistiwa mempunyai arti penting bagi pemanfaatan GSO secara maksimal.
- c) Pemanfaatan wilayah yang didasarkan atas konsepsi tata ruang dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan mempertahankan adanya pelestarian alam dan lingkungan hidup yang layak dalam wilayah ruang hidup bangsa Indonesia dan dengan memperhatikan ciri khas potensi wilayah.

- d) Pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh, seimbang, dan merata guna menekan kesenjangan spasial (antarwilayah/antardaerah).
- e) Untuk mewujudkan kesatuan wilayah, perlu penyediaan sarana dan prasarana komunikasi, transportasi yang menjamin mobilitas informasi, orang, barang dan jasa, serta pelaksanaan pembangunan nasional secara utuh menyeluruh.
- f) Indonesia menanamkan kesadaran masyarakat sedini mungkin tentang konstelasi geografis Indonesia, baik kerawanan maupun potensinya.

b. Gatra Demografi/Kependudukan

1) Kondisi dan Unsur Dominan

Penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu tempat atau wilayah tertentu dalam waktu yang tertentu. Demografi atau kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, susunan, persebaran, pertumbuhan, ciri-ciri, kualitas, kesejahteraan penduduk, serta kondisi lingkungannya dengan unsur-unsur dominannya meliputi hal-hal berikut:

a) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayah. Jadi, jumlah penduduk berubah akibat proses mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Dengan total populasi sekitar 255 juta penduduk, Indonesia adalah negara penduduk terpadat nomor empat di dunia.

b) Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk adalah susunan penduduk berdasarkan suatu pendekatan tertentu, misalnya menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, dan tingkat pendidikan. Dua suku bangsa terbesar adalah Jawa (41% dari total populasi) dan Sunda (15% dari total populasi).

c) Persebaran Penduduk

Persebaran penduduk yang ideal adalah persebaran yang sekaligus dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu persebaran dan mobilitas yang proporsional. Persebaran penduduk Indonesia tidak merata, Jawa (dihuni sekitar 57,5% jumlah penduduk), Sumatra (dihuni sekitar 21,3% jumlah

penduduk), selebihnya tersebar di daerah lain Indonesia.

d) Kualitas Penduduk

Faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk ialah faktor fisik dan nonfisik. Faktor fisik terdiri atas kesehatan, gizi, dan kebugaran. Faktor nonfisik ialah mentalitas dan intelektualitas.

2) Analisis

a) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang sangat besar, apabila dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif, akan merupakan modal yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha pembangunan di segala bidang. Jika tidak demikian, akan timbul pengangguran, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dan problem sosial dapat melemahkan Tannas.

b) Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Pengaruh mortalitas relatif kecil karena terhadap pria dan wanita relatif sama. Begitu juga dengan faktor migrasi karena tidak dilaksanakan secara besar-besaran dan diperlukan dukungan biaya yang tidak sedikit. Sebaliknya, fertilitas sangat besar pengaruhnya terutama terhadap komposisi umur dan jenis kelamin penduduk golongan muda. Bertambahnya penduduk golongan muda menimbulkan persoalan penyediaan fasilitas pendidikan, perluasan lapangan kerja, dan sebagainya. Apabila persoalan tersebut tidak diatasi, akan timbul kegoncangan sosial.

c) Persebaran Penduduk

Kenyataan menunjukkan bahwa manusia bertempat tinggal di daerah yang aman serta memungkinkan jaminan kehidupan ekonomis semaksimal mungkin, yaitu di daerah yang ekonomis dan strategis, terutama di daerah yang sudah digarap atau telah dipersiapkan sebelumnya. Konsekuensinya ialah bahwa di daerah tertentu terlampau padat, sedangkan di daerah lainnya menjadi jarang, bahkan tidak berpengaruh sama sekali.

d) Kualitas Penduduk

Untuk mengatasi masalah penduduk, kebijakan pemerintah yang mengatur, mengendalikan, atau menciptakan iklim yang dengan jumlah, komposisi, persebaran, dan penduduk melalui berbagai cara seperti pusat-pusat pertumbuhan, keluarga

berencana, transmigrasi, di samping meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental serta pengembangan sosial ekonomi. Semua itu dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kenaikan jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan persebaran penduduk yang proporsional serta keserasian dan keamanan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan.

3) Arah Pembinaan

Pembangunan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan harus didukung dengan pengaturan pertumbuhan dan persebaran penduduk secara serasi serta peningkatan kualitas penduduk yang memadai dengan memperhatikan komposisi penduduk yang ada.

- a) Pengaturan laju pertumbuhan penduduk dirumuskan dalam kebijakan gerakan keluarga berencana (KB) nasional dan program di luar keluarga (*beyond family planning program*) yang mendukungnya secara terpadu.
- b) Pengaturan penyebaran penduduk dapat dilakukan dengan jalan peningkatan usaha transmigrasi yang terpadu dengan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam hal ini, perlu didorong timbulnya transmigrasi swakarsa.
- c) Pengaturan kualitas penduduk dilakukan dengan cara peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta derajat dan manfaat yang dapat disejajarkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia secara fisik, antara lain meningkatkan derajat kesehatan, perbaikan mutu, dan kebugaran fisik dengan peningkatan keahlian keterampilan sumber daya manusia secara terarah dan berlanjut, peningkatan keimanan dan ketakwaan.
- d) Pengaturan laju penduduk dilakukan dengan memberi kesempatan dan pemberdayaan penduduk khususnya wanita dan generasi muda. Pelaksanaan kebijakan tersebut di atas harus didukung oleh partisipasi aktif masyarakat.

c. **Gatra Sumber Kekayaan Alam**

1) Kondisi dan Unsur Dominan

- a) Kekayaan alam menurut jenisnya dibedakan dalam delapan golongan sebagai berikut:

- (1) Hewan (fauna) dan nabati (flora);
 - (2) Mineral (minyak bumi, uranium, bijih besi, batu bara, dan lain-lain);
 - (3) Tanah (tempat tinggal, tempat berpijak, tempat bercocok tanam);
 - (4) Udara (sinar matahari, oksigen, karbondioksida);
 - (5) Potensi ruang angkasa;
 - (6) Energi alami (gas alam, panas alam, air artetis, geotermis); serta
 - (7) Air dan lautan.
- b) Kekayaan alam menurut sifatnya dibedakan dalam tiga golongan, yaitu yang dapat diperbaharui, yang tidak dapat diperbaharui, dan yang tetap.
 - c) Kekayaan alam Indonesia adalah segala sumber dan potensi alam di permukaan serta di dalam bumi, laut, dan dirgantara yang berada di wilayah kekuasaan dan yurisdiksi nasional NKRI.

Pasal 33 UUD 1945 menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Konsep penguasaan oleh negara tersebut berarti bahwa warga negara Indonesia (WNI) boleh mengusahakan serta memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Sumber-sumber kekayaan alam sebagai karunia Tuhan adalah untuk memberi kehidupan kepada makhluknya dan kekayaan wilayah Indonesia, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Hanya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak tidak diizinkan diusahakan perseorangan. Tujuan pengelolaan kekayaan alam adalah untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari segenap potensi sumber alam yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan bangsa dan rakyat Indonesia secara berlanjut berlandaskan Wasantara.

2) Analisis

- a) Lokasi dan konsentrasi SKA tidak merata di seluruh wilayah Indonesia dan tidak sesuai dengan persebaran dan kemampuan penduduk Indonesia sehingga dapat menimbulkan kesenjangan spasial;

- b) Seiring dengan meningkatnya intensitas pembangunan nasional, akan meningkatkan pula eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Khusus untuk kekayaan alam yang tidak terbarukan, eksploitasi yang terus-menerus akan mengakibatkan kekayaan alam tersebut menjadi komoditas langka sehingga nilainya menjadi strategis dan dapat mengundang kekuatan dari luar untuk menguasainya;
 - c) Pemanfaatan kekayaan alam secara optimal memerlukan modal, pengetahuan, teknologi, serta tenaga yang terampil dan kondisi pasar di dalam dan luar negeri;
 - d) Pelestarian daya dukung kekayaan alam dipengaruhi oleh kesadaran dan tanggung jawab semua pihak.
- 3) Arah Pembinaan
- a) Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh dan untuk bangsa Indonesia dengan cara-cara yang tidak merusak tata lingkungan hidup manusia dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Dalam keadaan kemampuan nasional masih terbatas, dapat dilakukan kerja sama dengan perusahaan asing dengan syarat yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional;
 - b) Pemanfaatan kekayaan alam komoditas yang mempunyai nilai ekonomis harus didasarkan pada prinsip peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk setempat dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sehingga mengurangi kesenjangan spasial dan peningkatan pembangunan daerah. Pemanfaatan kekayaan alam sebagai sumber energi harus diarahkan pada upaya menghemat pemakaian sumber minyak dan gas bumi serta menggantikannya dengan sumber nonminyak seperti batu bara, tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga nuklir, serta energi nonkonvensional seperti biogas, biomas, tenaga angin, dan tenaga surya. Sumber energi yang *transportable* (mudah diangkut) dimanfaatkan untuk ekspor;
 - c) Pemerintah melindungi serta mengelola kekayaan alam dengan cara tepat, terarah, dan bijaksana serta lebih mementingkan manfaat untuk rakyat banyak dengan meningkatkan kemampuan teknologi tepat guna dan meningkatkan kualitas SDM yang mampu mengelola;

- d) Pemerintah melakukan inventarisasi tentang jumlah, mutu jenis, dan persebaran kekayaan alam untuk mengetahui potensi riil yang dapat dimanfaatkan;
- e) Pemerintah membina kesadaran nasional untuk pemanfaatan dan pelestarian kekayaan alam serta penggarapan secara tersinkronisasi dan terintegrasi oleh berbagai pihak guna pencapaian hasil yang optimal serta pengamanan yang maksimal sehingga tetap terjaga kondisi kelestarian dan keharmonisan lingkungan.

d. Gatra Ideologi

1) Konsepsi tentang Ketahanan Ideologi

Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi juga terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Kemampuan suatu ideologi bergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat.

Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala TAHG yang datang dari luar atau dari dalam, yang langsung atau tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan ideologi tersebut, diperlukan kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta pengamalannya yang konsisten dan berlanjut. Kelima sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung nilai spiritual memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia. Nilai itu berfungsi sebagai kekuatan mental spiritual dan landasan etik dalam Tannas. Dengan demikian, atheisme tidak berhak hidup di bumi Indonesia dalam kerukunan dan kedamaian hidup beragama.

Sila Persatuan Indonesia, dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik mengandung nilai persatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang merupakan faktor pengikat dan menjamin keutuhan nasional atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nilai ini menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sebaliknya, kepentingan pribadi dan golongan diserasikan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara.

Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, mengandung nilai bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat (demokrasi) yang dijielmakan oleh persatuan nasional yang riil dan wajar. Nilai ini mengutamakan kepentingan negara bangsa dengan tetap menghargai kepentingan pribadi dan golongan, musyawarah untuk mufakat, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung nilai sikap adil, menghormati hak orang, dan sikap gotong royong, yang menjamin keadilan dan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh dan merata.

Pancasila merupakan ideologi nasional, dasar negara, sumber hukum, serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Untuk mencapai ketahanan ideologi, diperlukan penghayatan dan pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuen, baik objektif maupun subjektif. Pelaksanaan objektif adalah bagaimana pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersurat atau paling tidak tersirat dalam UUD 1945 dan segala peraturan perundang-undangan di bawahnya serta segala kegiatan penyelenggaraan negara. Pelaksanaan subjektif adalah bagaimana nilai-nilai tersebut dilaksanakan oleh pribadi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara. Pancasila mengandung sifat idealistik, realistik, dan fleksibilitas sehingga terbuka terhadap perkembangan yang terjadi sesuai dengan realitas perkembangan kehidupan, tetapi sesuai dengan idealisme yang terkandung di dalamnya.

2) Analisis Permasalahan

Faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan ideologi antara lain adalah sebagai berikut:

a) Kemajemukan Masyarakat Indonesia

Secara sosiologis, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan adat istiadat, bahasa, pandangan hidup, serta agama dan kepercayaan

yang berbeda-beda. Masing-masing mempunyai norma kehidupan yang berbeda. Perbedaan itu dapat memperkaya dan memperkuat kepribadian dan kebudayaan bangsa. Akan tetapi di pihak lain, hal itu dapat merupakan titik-titik rawan yang menimbulkan primordialisme sempit yang mengarah pada perpecahan bangsa. Dalam masyarakat yang majemuk ini perlu selalu ditumbuhkembangkan faktor-faktor perekat persatuan bangsa, yaitu tekad dan semangat untuk secara bersama-sama mewujudkan cita-cita bersama.

b) Perkembangan Dunia

Pesatnya perkembangan iptek, terutama teknologi komunikasi atau informasi dan transportasi menyebabkan dunia terasa semakin sempit, transparan, dan tanpa batas yang semakin mengglobal. Proses globalisasi ini tercermin dalam globalisasi informasi dan globalisasi ekonomi, yang membawa sistem nilai baik yang bersifat positif yang mendorong ke arah kemajuan dan modernisasi, maupun yang bersifat negatif yang dapat memengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa serta sendi-sendi kehidupan di seluruh aspek kehidupan nasional, bahkan juga menjungkirbalikkan nilai-nilai dasar yang telah berakar dan telah mapan dalam NKRI. Dalam perkembangan dunia seperti ini, bangsa Indonesia harus berpegang teguh pada identitas dan integritas nasional serta tidak terpengaruh pada nilai global yang bertentangan dengan Pancasila.

c) Kepemimpinan

Peranan kepemimpinan, baik formal maupun informal dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menduduki tempat yang sangat strategis dan menentukan dalam masyarakat Indonesia. Penonjolan sikap dan tingkah laku seorang pemimpin dan kerabat keluarganya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila akan memberi pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat lingkungannya. Pengamalan nilai-nilai ini untuk masyarakat Indonesia ditentukan oleh suri teladan para pemimpin yang menjadi panutan masyarakat. Lunturnya nilai-nilai Pancasila dapat dilihat dari setiap pelaksanaan pemilihan pemimpin saat ini yang cenderung ditentukan melalui cara pemungutan suara (voting) daripada melalui musyawarah mufakat.

d) Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata

materiel dan spiritual dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional dilandasi oleh moral dan etika yang sesuai dengan sistem nilai yang telah disepakati bersama berdasarkan Pancasila. Pembangunan yang berhasil akan lebih memantapkan Pancasila sebagai ideologi nasional dan dasar negara. Kegagalan pembangunan nasional akan membuka kemungkinan bangsa Indonesia yang berpaling dari Pancasila dan mencoba membangun masa depannya dan didasari oleh ideologi lain seperti liberalisme atau komunisme. Dengan Pancasila, gerak dan laju pembangunan Indonesia harus dapat memberikan kehidupan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan bersama.

3) Pembinaan Ketahanan Ideologi

Untuk memperkuat ketahanan ideologi, perlu langkah pembinaan sebagai berikut:

- a) Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif terus dikembangkan;
- b) Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara selaras dengan peradaban dunia yang berubah dengan cepat, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia;
- c) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan konsep Wasantara yang bersumber dari Pancasila harus tetap dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan bangsa dan negara. Di samping itu, perlu dituntut sikap yang wajar dari anggota masyarakat dan pemerintah memberikan penghormatan dan penghargaan yang wajar terhadap kebhinnekaan;
- d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan nasional serta cita-cita Indonesia, khususnya oleh setiap penyelenggaraan negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan serta setiap WNI, dalam hal ini suri teladan para pemimpin merupakan hal yang sangat perlu;
- e) Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus menunjukkan keseimbangan fisik materiel dengan

pembangunan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme. Dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia, strategi pembangunan harus adil dan merata di seluruh wilayah untuk memupuk rasa persatuan bangsa dan kesatuan wilayah;

- f) Pendidikan Moral Pancasila (PMP) ditanamkan pada diri anak didik dengan cara dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sebagai materi pokok serta mengintegrasikannya dalam mata pelajaran lain, seperti Pendidikan Budi Pekerti, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Bahasa Indonesia, dan Kepramukaan. PMP juga perlu diberikan kepada masyarakat luas secara nonformal.

e. Gatra Politik

1) Konsepsi tentang Ketahanan Politik

Politik adalah satu aspek kehidupan nasional yang di satu sisi berkaitan dengan kekuasaan atau kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan di sisi lain berkaitan dengan penyaluran aspirasi rakyat sebagai wujud dari kedaulatan di tangan rakyat. Ketahanan politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi TAHG yang datang dari luar dan dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan politik, diperlukan kehidupan politik bangsa yang sehat dan dinamis yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Stabilitas politik yang sehat dan dinamis diwujudkan oleh adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hubungan antara penyelenggaraan pemerintahan negara dan masyarakat. Hubungan ini tercermin dalam fungsi pemerintahan negara sebagai penentu kebijakan serta aspirasi dan tuntutan masyarakat sebagai tujuan yang ingin diwujudkan sehingga kebijakan pemerintahan negara tersebut haruslah serasi dan selaras dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks Tannas ini, masalah politik meliputi dua bagian utama, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri.

a) Politik Dalam Negeri

Politik dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem yang unsur-unsurnya terdiri atas struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik, dan partisipasi politik.

- (1) Struktur politik merupakan wadah penyaluran aspirasi berupa kepentingan masyarakat dan sekaligus wadah dalam menjaring atau pengaderan pemimpin nasional;
- (2) Proses politik merupakan suatu rangkaian pengambilan keputusan tentang berbagai kepentingan masyarakat, baik kepentingan politik, kepentingan umum yang bersifat nasional, dan penentuan dalam pemilihan pemimpin, yang puncaknya terselenggara pemilu;
- (3) Budaya politik merupakan pencerminan dari aktualisasi hak dan kewajiban rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilaksanakan secara sadar dan rasional, baik melalui pendidikan politik maupun kegiatan-kegiatan politik yang sesuai dengan disiplin nasional;
- (4) Komunikasi politik berupa suatu hubungan timbal balik semua pihak yang terlibat dalam proses politik secara jujur dan terbuka yang memungkinkan terselenggaranya sosialisasi politik dengan baik;
- (5) Partisipasi politik adalah wujud kedaulatan rakyat dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik rakyat sebagai sumber aspirasi maupun sebagai sumber pimpinan nasional.

b) Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antarbangsa. Politik luar negeri Indonesia berlandaskan pada Pembukaan UUD NRI 1945, yakni melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta anti

penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

(1) Sebagai Bagian Integral dari Strategi Nasional

Politik luar negeri merupakan proyeksi kepentingan nasional ke dalam kehidupan antarbangsa. Dengan dijiwai oleh falsafah negara Pancasila sebagai tuntutan moral dan etika, politik luar negeri Indonesia diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk pembangunan nasional. Dengan demikian, politik luar negeri merupakan bagian integral dari strategi nasional dan secara keseluruhan merupakan salah satu sarana pencapaian tujuan nasional.

(2) Garis Politik Luar Negeri

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Aktif dalam pengertian tidak pasif, yaitu peranan Indonesia dalam percaturan internasional tidak bersifat reaktif dan tidak menjadi percaturan internasional, tetapi berperan serta atas dasar cita-cita bangsa yang tercermin dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Karena heterogenitas kepentingan bangsa-bangsa di dunia, politik luar negeri harus bersifat kental, dalam arti bersikap moderat dalam hal kurang prinsipil atau tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar seperti yang ditentukan dalam pembukaan UUD NRI 1945. Politik luar negeri juga harus lincah. Dengan dinamika perubahan-perubahan hubungan antarbangsa yang cepat dan tidak menentu di dunia, diperlukan daya penyesuaian yang tinggi demi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan-perkembangan itu.

Dalam menjalankan politik luar negeri, Republik Indonesia berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan berlandaskan falsafah Pancasila, UUD NRI 1945, dan RPJM. Situasi internasional yang selalu berkembang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan politik luar negeri yang memerlukan penanganan dan penyesuaian. Perkembangan dan kemungkinan gejolak dunia, baik politik maupun ekonomi harus diikuti secara saksama agar dapat diantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat

memengaruhi stabilitas nasional dan menghambat pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mengamankan dan memanfaatkan peluang dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

(3) Permasalahan Dominan yang Dihadapi

- (a) Adanya kecenderungan dan dominasi dari negara adidaya yang selalu memaksakan kehendaknya merupakan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan politik luar negeri. Negara-negara yang kuat cenderung menerapkan pandangan-pandangan politik serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakatnya kepada negara lain dalam hal modal, teknologi, dan pasar. Pembangunan hubungan luar negeri merupakan tantangan bagi Indonesia untuk mengatasi ancaman bentuk baru dalam rangka mempertahankan kedaulatan, kepribadian, dan kemandirian bangsa;
- (b) Kecenderungan proteksionisme dan meningkatnya masalah perdagangan yang mempunyai dimensi politik merupakan hambatan bagi Indonesia untuk memperluas kegiatan perdagangan global. Sebaliknya, globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi mengakibatkan hubungan ekonomi internasional dan ekonomi nasional semakin tidak dapat dipisahkan karena adanya saling ketergantungan. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana dapat mengatasi dampak negatif proteksionisme serta kemampuan memanfaatkan peluang hubungan ekonomi luar negeri;
- (c) Dalam rangka pencapaian tujuan nasional serta perwujudan penataan tata dunia baru diperlukan optimalisasi persahabatan dan kerja sama antar bangsa-bangsa dengan memanfaatkan forum dan organisasi internasional. Di samping itu, diperlukan pula kemampuan berperan dalam upaya

restrukturisasi, revitalisasi demokratisasi PBB, serta meningkatkan citra politik Indonesia di forum internasional. Dalam kaitan ini, permasalahan yang dihadapi adalah pada kemampuan SDM dalam berdiplomasi dan aspek-aspek kelembagaan serta sarana penunjang lainnya.

2) Analisis Permasalahan

a) Analisis Politik Dalam Negeri

Berdasarkan berbagai faktor dinamika kehidupan politik serta konsepsi dan permasalahannya, pelaksanaan politik dipengaruhi berbagai faktor, baik dalam maupun luar negeri sebagai berikut:

(1) Kepemimpinan Nasional

Dalam sistem pemerintahan, yang sangat dominan adalah faktor kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional yang kuat tidak hanya mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, pandai, tangguh, ulet, sehat lahir dan batin, jujur, bersih, dan berwibawa, tetapi juga memiliki seni kepemimpinan yang mampu menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras serta memiliki visi ke masa depan. Di samping itu, kepemimpinan nasional juga harus dapat menjaga dinamika kehidupan politik dalam kondisi paradigma nasional (Pancasila, UUD NRI 1945, Wasantara, dan Tannas), serta mampu mengambil kebijakan yang serasi antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat. Dengan kepemimpinan nasional yang demikian, sistem pemerintahan tidak menjurus pada pemusatan kekuasaan yang cenderung otoriter, tetapi juga tidak mengarah pada sistem politik yang liberal yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Kepemimpinan nasional yang terpilih secara demokrasi akan mendapat dukungan kuat dari rakyat sehingga rakyat akan rela dan bersedia untuk turut melaksanakan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Untuk menghindarkan terjadinya deviasi ke arah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang merugikan rakyat banyak, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden perlu dibatasi. Di samping itu, pelaksanaan sistem

pemerintahan juga sangat ditentukan oleh moral, etika, semangat, dan dedikasi para pengelola negara serta dihormatinya supremasi hukum dan kontrol nasional.

(2) Pemilihan Pembantu Presiden

Dalam sistem kabinet Presidensial, Presiden mempunyai hak prerogatif untuk memilih pembantunya. Kemutlakan hak prerogatif itu dapat mengakibatkan pemilihan pembantunya dengan pertimbangan subjektif Presiden. Seyogianya Presiden mendengar dan memperhatikan saran dari DPR/DPD serta sedapat mungkin mengikutsertakan berbagai kekuatan sosial politik yang ada sehingga kekuatan-kekuatan tersebut merasa ikut memiliki dan merasa turut bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan.

(3) Pemilihan Umum

Pelaksanaan sistem pemilihan umum (Pemilu) yang dipergunakan hendaknya dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan menghayati aspirasi rakyat yang diwakilinya serta mampu menyalurkan dan memperjuangkannya. Pemilu dituntut dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER), serta jujur dan adil (JURDIL). Dengan demikian, pelaksanaan Pemilu akan memuaskan semua pihak sehingga masyarakat secara sadar termotivasi dan bergairah berpartisipasi dalam Pemilu. Sebaliknya Pemilu yang diwarnai oleh kecurangan, rekayasa serta manipulasi kehidupan politiknya dapat berkembang ke arah apatisme, atau ke arah ketidakpuasan, berakumulasi pada keresahan dan gejolak sosial.

(4) Wadah Penyalur Aspirasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam politik dapat tumbuh apabila aspirasinya dapat disalurkan melalui kelembagaan penyalur pendapat masyarakat, mulai dari tingkat desa sampai di tingkat pusat, melalui media massa, dan melalui kelembagaan lain. Tersumbatnya wadah penyalur aspirasi ini akan mengakibatkan komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah tidak berjalan dengan lancar dan tidak transparan sehingga kedua belah pihak tidak memahami inisiatif dan aspirasi masing-masing. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dapat tidak serasi dengan

tuntutan masyarakat. Hal itu dapat menyebabkan terjadinya keserasian yang menjurus pada gejolak sosial.

(5) Kesamaan Visi dan Persepsi

Apabila belum terbentuk kesamaan visi dan persepsi antarfraksi dalam lembaga perwakilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan sulit dicari konsensus dalam pengambilan putusan. Oleh karena itu, perlu terus digalang adanya visi dan persepsi yang harmonis antarfraksi dan lembaga perwakilan agar konsensus yang rasional dapat diciptakan dan diselenggarakannya fungsi kontrol dengan sebaik-baiknya.

(6) Disiplin Nasional dan Sistem Hukum Nasional

Disiplin nasional merupakan faktor dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa disiplin yang kuat, dinamika kehidupan dapat menyimpang ke arah yang tidak menentu, bahkan dapat membahayakan peri kehidupan bangsa dan negara. Dengan disiplin, dapat diwujudkan ketertiban hukum, baik tertib administrasi, tertib politik, maupun tertib sosial. Sangat erat kaitan antara disiplin dan sistem hukum nasional, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum atau *law enforcement*. Dengan pemantapan sistem hukum yang meliputi materi hukum, aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, serta kesadaran hukum masyarakat, kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berjalan dalam landasan hukum yang mantap serta masyarakat merasa terayomi, terangkat harkat dan martabat bangsanya, hidup dengan keteraturan, meningkatnya kesadaran politik rakyat akan hak dan kewajibannya, serta terlepas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan perlakuan yang tidak adil. Dengan demikian, lembaga peradilan dapat menjadi benteng terakhir untuk mencari keadilan.

(7) Pembauran Bangsa

Pembinaan pembauran bangsa menyangkut tiga pihak, yaitu pemerintah, WNI pada umumnya, serta WNI keturunan etnis lain atau asing. WNI keturunan etnis asing hendaknya menyadari bahwa mereka adalah WNI yang hidup dan mencari kehidupan di bumi Indonesia. Budaya asing yang dibawanya dapat diselaraskan dengan budaya daerah tempat mereka hidup sehingga dapat memberikan

peran serta yang positif terhadap perkembangan budaya nasional, yang terutama adanya kesadaran ikut memiliki (*sense of belonging*).

Dengan demikian, akan tumbuh kesadaran untuk berpartisipasi dan saling menjaga (*sense of participation and sense of security*) sehingga tidak hidup secara eksklusif, tetapi hidup dalam kebersamaan. Untuk mewujudkan pembauran itu, pemerintah harus berpegang pada prinsip kebersamaan yang rasialistis. Dengan demikian, pembauran dapat terwujud dan terhindar masalah SARA serta primordialisme yang sempit yang merawankan persatuan bangsa.

(8) Pemerataan Hasil Pembangunan

Pemerataan partisipasi politik rakyat dilakukan untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam kerangka NKRI. Penerapan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota dan dapat merupakan sarana pemerataan partisipasi politik rakyat untuk melaksanakan pembangunan di daerah itu sendiri.

(9) Keresahan Masyarakat

Dari analisis sebelumnya, keresahan masyarakat terutama keresahan di kalangan generasi muda dan mahasiswa, apabila tidak diakomodasi dan diatasi, dapat menimbulkan gejolak sosial. Keresahan yang mudah timbul dalam negara yang sedang membangun, antara lain disebabkan oleh kesenjangan di berbagai bidang kehidupan, kesempatan memperoleh pendidikan, kesempatan memperoleh pekerjaan, kesempatan mengeluarkan pendapat, dan kesempatan dalam berpartisipasi di bidang politik sehingga terjadinya kesenjangan antara tuntutan dan kenyataan. Untuk mengatasinya, diperlukan komunikasi dan dialog secara terbuka antara pihak-pihak yang terkait.

b) Analisis Politik Luar Negeri

Politik luar negeri dalam memperjuangkan serta mengamankan kepentingan nasional dan turut serta dalam upaya mewujudkan tatanan dunia baru didasarkan prinsip kepada politik luar negeri bebas dan aktif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan kemampuan diplomasi proaktif guna memperjuangkan kepentingan nasional dalam berbagai forum internasional.

Dalam menghadapi tantangan pada tingkat global, antara lain adanya dominasi negara adidaya yang memaksakan kehendaknya berdampak negatif bagi kepentingan negara-negara berkembang perlu ditingkatkan kewaspadaan, keteguhan sikap, dan kemantapan ideologi dalam memelihara Tannas.

Kerja sama dan persahabatan antarbangsa perlu memanfaatkan berbagai forum dan organisasi internasional, meningkatkan peranan Indonesia dalam upaya restrukturisasi, revitalisasi, dan demokratisasi PBB, serta meningkatkan kerja sama antarnegara ASEAN, Asia Pasifik, Gerakan Non Blok, OKI, dan kerja sama antarkawasan. Di samping itu, hubungan luar negeri perlu dikembangkan untuk meningkatkan citra Indonesia yang positif di luar negeri, meningkatkan investasi, meningkatkan pasar komoditas ekspor Indonesia, dan melindungi kepentingan dan hak-hak WNI di luar negeri serta aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan di luar negeri.

3) Pembinaan Ketahanan Politik

a) Ketahanan Politik Dalam Negeri

- (1) Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum tidak berdasarkan kekuasaan yang bersifat absolut, tetapi kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD NRI 1945;
- (2) Mekanisme politik memungkinkan adanya perbedaan pendapat, tetapi perbedaan pendapat tersebut tidak menyangkut nilai dasar sehingga tidak antagonistik yang dapat menjurus pada konflik atau bentrokan fisik. Di samping itu, harus dicegah timbulnya diktator mayoritas dan tirani minoritas;
- (3) Kepemimpinan nasional mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat dengan tetap dalam lingkup Pancasila, UUD NRI 1945, dan Wasantara;
- (4) Terjalin komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dan masyarakat serta antarkelompok atau golongan dalam masyarakat dalam rangka mencapai tujuan nasional dan kepentingan nasional.

b) Ketahanan Politik Luar Negeri

- (1) Hubungan luar negeri ditujukan untuk lebih

meningkatkan kerja sama internasional di berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan, meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri, memantapkan persatuan kesatuan bangsa, dan keutuhan NKRI;

- (2) Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerja sama antarnegara berkembang dan antara negara berkembang dan negara maju sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan nasional. Peranan Indonesia dalam membina dan mempererat persahabatan dan kerja sama antarbangsa yang saling menguntungkan perlu terus diperluas dan ditingkatkan. Kerja sama negara anggota ASEAN, baik pemerintah maupun masyarakat, terutama di bidang ekonomi, iptek, dan sosbud terus dilanjutkan dan dikembangkan. Peran aktif Indonesia dalam Gerakan Non Blok dan OKI serta mengembangkan hubungan demi kerja sama antarnegara di kawasan Asia Pasifik perlu terus ditingkatkan;
- (3) Citra positif Indonesia terus ditingkatkan dan diperluas, antara lain melalui promosi, peningkatan diplomasi, dan lobi internasional, pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa, serta kegiatan olahraga. Perkembangan, perubahan, dan gejolak dunia terus diikuti dan dikaji dengan saksama agar secara dini dapat diperkirakan terjadinya dampak negatif yang dapat memengaruhi stabilitas nasional serta yang menghambat kelancaran pembangunan dan pencapaian tujuan nasional;
- (4) Langkah bersama negara berkembang untuk memperkecil ketimpangan dan mengurangi ketidakadilan dengan negara industri maju perlu ditingkatkan dengan melaksanakan perjanjian perdagangan internasional serta kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional;
- (5) Perjuangan mewujudkan tatanan dunia baru dan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui penggalangan dan pemupukan solidaritas dan

kesamaan sikap serta kerja sama internasional dengan memanfaatkan berbagai forum regional dan global. Peran aktif Indonesia dalam pelucutan senjata dan dalam pengiriman serta pelibatan pasukan perdamaian dan peran serta di dalam penyelesaian konflik antarbangsa perlu terus ditingkatkan. Upaya restrukturisasi PBB terutama Dewan Keamanan terus dilaksanakan agar efektif, efisien, dan demokratis.

- (6) Peningkatan kualitas SDM perlu dilaksanakan dengan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan, pelatihan, dan penyuluh calon diplomat agar dapat menjawab tantangan tugas yang dihadapi. Selain itu, perlu ditingkatkan aspek-aspek kelembagaan dan sarana penunjang lainnya;
- (7) Perjuangan bangsa Indonesia di dunia yang menyangkut kepentingan nasional seperti melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain dan hak-hak WNI di luar negeri perlu ditingkatkan.

f. Gatra Ekonomi

1) Konsepsi Ketahanan Ekonomi

Ekonomi adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan.

Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala TAHG, baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan yang langsung atau tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan pada mantapnya ketahanan ekonomi melalui terciptanya iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan iptek, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup, serta meningkatnya daya saing dalam lingkup perekonomian global.

2) Analisis Permasalahan

Faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan ekonomi antara lain adalah sebagai berikut:

a) Sifat Keterbukaan Sistem Perekonomian

Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara akan memberi corak atau warna terhadap kehidupan ekonomi dari negara tersebut. Sistem ekonomi liberal dengan orientasi pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Di lain pihak, sistem ekonomi sosialis dengan sifat perencanaan serta pengendalian penuh oleh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh dari luar. Namun, tidak berarti bahwa sistem ini tetap stabil serta mampu menciptakan perekonomian yang lancar dan maju. Pada dasarnya sistem ekonomi suatu negara tak dapat dipisahkan dari ideologi yang dianut.

Kini tidak ada lagi sistem ekonomi liberal murni atau sistem ekonomi sosialis murni. Sistem liberal yang terdapat di dunia kapitalis sudah menyerap beberapa unsur dari sosialisme, sedangkan negara-negara komunis sudah mulai memasukkan beberapa aspek kapitalisme meskipun dengan modifikasi tertentu. Sistem ekonomi Indonesia terbuka terhadap perkembangan sistem ekonomi dunia yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam sistem yang berdasarkan Pancasila.

b) Manajemen

Kegiatan ekonomi memerlukan penerapan manajemen yang tepat dan memadai untuk meningkatkan produktivitas dan mutu produksi barang dan jasa. Jenis manajemen manapun yang dipakai perlu ada dukungan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki motivasi, disiplin, dan etos kerja. Yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya diciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis sehingga menggairahkan kalangan dunia usaha.

c) Hubungan Ekonomi Luar Negeri

Perkembangan perekonomian tiap negara tidak dapat terlepas dari saling ketergantungan dari negara lain, terutama

dalam era globalisasi. Namun, hubungan ekonomi dan perdagangan baik secara bilateral maupun multilateral tidak saling menguntungkan pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana yang diharapkan. Faktor-faktor penyebabnya terutama terletak pada perbedaan dalam hal kekayaan, kemampuan, dan kesempatan, karena perbedaan itulah timbul negara kaya dan negara miskin. Dalam lingkup internasional, masalah itu antara lain menjadi terkenal masalah Utara-Selatan atau Selatan-Selatan.

d) Diversifikasi Pemasaran

Peningkatan produksi perlu diikuti dengan perkembangan pasar, baik di pasar domestik maupun di pasar luar negeri. Menjual hasil produksi di pasar dalam negeri atau di pasar luar negeri akan menghadapi persaingan yang tidak ringan karena timbulnya kejenuhan pasar, persaingan harga, kualitas, dan pelayanan. Oleh karena itu, perlu senantiasa dicarikan pemasaran baru bagi produk yang dihasilkan. Artinya, diversifikasi pemasaran merupakan satu keharusan agar produksi terus bisa diperluas hingga ekspor dapat meningkat dan perolehan devisa akan meningkat pula.

e) Teknologi

Dalam kehidupan ekonomi, teknologi merupakan faktor penting bagi upaya peningkatan berbagai kegiatan ekonomi, tetapi tidak dapat menciptakan lapangan kerja langsung secara luas. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kemampuan perekonomian negara. Akan tetapi, di sisi lain teknologi dapat juga menimbulkan kerawanan karena ketergantungan yang besar terhadap pihak luar serta kurangnya kemampuan penguasaan teknologi serta pemanfaatannya. Negara berkembang pada umumnya menghadapi masalah pengangguran. Untuk itu, diperlukan pemilihan teknologi yang tepat guna, selain dapat memberikan nilai tambah dapat pula memberikan kesempatan kerja. Karena tuntutan kebutuhan, perlu pemanfaatan teknologi mutakhir dalam rangka memperoleh nilai tambah.

f) Struktur Ekonomi

Di negara-negara industri maju, sektor industri merupakan kontribusi yang cukup besar pada PDB yang menentukan stabilitas serta kondisi perekonomiannya. Adapun di negara-negara berkembang, perekonomian didominasi oleh sektor non-industri, terutama sektor pertanian dengan nilai perdagangan (*terms of trade*) yang hanya menguntungkan negara industri. Di negara berkembang, di samping diperlukan sektor industri guna

peningkatan nilai tambah, diperlukan juga sektor pertanian yang tangguh. Oleh karena itu, struktur ekonomi yang belum seimbang antara pertanian dan perindustrian mengandung berbagai kerawanan.

g) Infrastruktur (Sarana dan Prasarana)

Kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, perdagangan, dan jasa akan terhambat bahkan dapat macet tanpa adanya sarana dan prasarana yang memungkinkan kelancaran arus bahan, barang, dan jasa. Angkutan melalui darat, laut, dan udara yang dikelola secara terpadu dan didukung oleh jaringan komunikasi yang luas serta lembaga-lembaga keuangan yang mumpuni merupakan syarat mutlak bagi perkembangan ekonomi melalui produksi barang dan jasa yang ditunjang oleh distribusi dan perdagangan yang lancar.

h) Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

SDM yang berkualitas serta berjiwa kewirausahaan mempunyai arti positif bagi peningkatan ketahanan ekonomi. SDM Indonesia yang jumlahnya cukup besar dengan kualitas relatif masih rendah dengan persebaran yang tidak merata dan struktur yang tidak menguntungkan merupakan beban dan sumber kerawanan sosial ekonomi. Untuk itu, diperlukan pembinaan yang serasi terhadap manusia Indonesia sebagai objek dan sekaligus subjek pembangunan ekonomi.

i) Potensi dan Pengelolaan Sumber Dana

Dana yang berasal dari dalam dan luar negeri sangat penting bagi upaya meningkatkan pembangunan dan pengembangan ekonomi. Dana dari luar yang terlalu besar dengan penggunaan yang tidak produktif serta menimbulkan ketergantungan negara akan mengakibatkan kerawanan sehingga dapat menghambat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan mobilitas dana dalam negeri melalui sistem perpajakan di samping dana tabungan masyarakat sebagai salah satu sumber pembangunan ekonomi yang didukung oleh kebijakan moneter yang mantap.

3) Pembinaan Ketahanan Ekonomi

a) Sistem ekonomi harus dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah nusantara melalui ekonomi kerakyatan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan

hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

- b) Ekonomi kerakyatan harus menghindari hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Sistem persaingan bebas (*free fight liberalism*) yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi kuat dan tidak memungkinkan ekonomi kerakyatan berkembang;
 - (2) Sistem etatisme, dalam arti bahwa negara beserta aparaturnya ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara; dan
 - (3) Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
- c) Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antarsektor pertanian dengan perindustrian dan jasa.
- d) Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan di bawah pengawasan anggota masyarakat, serta memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. Harus diusahakan keterkaitan dan kemitraan antara para pelaku dalam wadah kegiatan ekonomi, yaitu pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), koperasi, badan usaha swasta, dan sektor informal untuk mewujudkan pertumbuhan pemerataan dan stabilitas ekonomi.
- e) Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa dilaksanakan melalui keseimbangan dan keserasian pembangunan antarwilayah dan antarsektor.
- f) Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis dalam mempertahankan serta meningkatkan eksistensi dan kemandirian perekonomian nasional dengan memanfaatkan sumber daya nasional secara optimal dengan sarana iptek tepat guna dalam menghadapi setiap permasalahan serta dengan tetap memperhatikan kesempatan kerja.

Dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa berlandaskan

Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi.

g. Gatra Sosial Budaya

1) Konsepsi Ketahanan Sosial Budaya

Istilah sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama, yaitu segi sosial manusia demi kelangsungan hidupnya harus mengadakan kerja sama dengan sesama manusia dan segi budaya yang merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manifestasinya tampak dalam tingkah dan hasil tingkah laku yang terlembagakan. Dengan demikian, pengertian sosial pada hakikatnya pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai dan norma kebersamaan. Rasa senasib dan sepenanggungan, tertib sosial, dan solidaritas merupakan unsur pemersatu. Adapun hakikat budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan pencipta, rasa, dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan yang menghasilkan karya. Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik sosial budaya bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala TAHG, baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya, bangsa, dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila. Ketahanan sosial budaya mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia, yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Esensi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia adalah pengembangan kondisi sosial budaya ketika setiap warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusiawinya yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang akan diwujudkan sebagai ukuran tuntutan sikap dan tingkah laku bagi bangsa dan negara Indonesia akan memberikan landasan semangat dan

jiwa secara khas serta merupakan ciri elemen-elemen sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia.

2) Analisis Permasalahan

a) Kebudayaan Daerah

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan sub-etnis yang masing-masing memiliki kebudayaannya sendiri. Karena suku-suku bangsa tersebut mendiami daerah-daerah tertentu, kebudayaannya sering disebut sebagai kebudayaan daerah. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan daerah sebagai suatu sistem nilai yang menuntun sikap, perilaku, dan gaya hidup merupakan identitas dan menjadi kebanggaan dari suatu bangsa yang bersangkutan. Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai-nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing, atau sering disebut sebagai *local genius* yang mempunyai kemampuan beradaptasi dengan budaya asing tanpa kehilangan identitasnya. *Local genius* inilah pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralkan pengaruh negatif budaya asing.

Kebudayaan suku-suku yang mendiami wilayah nusantara ini telah lama saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam kesetaraan. Dalam kehidupan bernegara saat ini, dapat dikatakan bahwa kebudayaan daerah merupakan kerangka dari kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, perkembangan kehidupan sosial budaya bangsa tidak akan terlepas dari perkembangan sosial budaya daerah.

b) Kebudayaan Nasional

Mengingat bangsa Indonesia dibentuk dari persatuan suku-suku bangsa yang mendiami bumi nusantara, kebudayaan bangsa Indonesia (kebudayaan nasional) merupakan hasil (*resultant*) interaksi dari budaya-budaya suku bangsa (budaya daerah) yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa.

Kebudayaan nasional juga dapat merupakan hasil interaksi dari nilai-nilai budaya yang telah ada dengan budaya luar (asing) yang kemudian juga diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Hal yang penting adalah bahwa interaksi budaya tersebut harus berjalan secara wajar dan alamiah. Tidak ada unsur pemaksaan dan dominasi budaya satu daerah tertentu terhadap budaya daerah lainnya. Dengan demikian, kebudayaan nasional akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan berkembangnya budaya daerah.

Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Mengingat bangsa Indonesia telah sepakat menggunakan Pancasila sebagai falsafah hidupnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan menjadi tuntutan dasar dari segenap sikap, perilaku, dan gaya hidup bangsa Indonesia. Secara umum, gambaran identitas bangsa Indonesia berdasarkan tuntutan Pancasila adalah manusia dan masyarakat yang memiliki sifat-sifat dasar, meliputi sifat religius, sifat kekeluargaan, sifat hidup serba selaras, dan sifat kerakyatan.

c) Integrasi Nasional

Komunikasi dan integrasi sosial yang dilakukan oleh suku-suku bangsa yang mendiami bumi nusantara ini pada tahun 1928 telah mampu menghasilkan aspirasi bersama untuk hidup bersama sebagai satu bangsa di satu tanah air. Aspirasi ini terwujud secara hukum dan diakui oleh bangsa-bangsa lain di dunia melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa keanekaragaman budaya justru merupakan hikmah bagi bangsa Indonesia dan pada masa lalu telah mampu memunculkan faktor-faktor perekat persatuan dan integrasi bangsa. Pada masa depan, upaya untuk melestarikan keberadaan faktor perekat persatuan bangsa, yaitu keinginan dan semangat untuk hidup bersama dan meraih cita-cita bersama akan menjadi tugas seluruh warga bangsa.

d) Kehidupan Beragama

Sila Pertama dari Pancasila menuntun setiap warga bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupannya berdasarkan keyakinan terhadap agama tertentu yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan tersebut harus diamalkan dalam setiap sikap, perilaku, dan gaya hidup warga bangsa. Pengamalan dari ajaran agama secara benar akan menumbuhkan suasana kehidupan masyarakat yang sangat baik.

e) Pendidikan

Pendidikan adalah upaya secara sadar dan tertib untuk merubah dan mengembangkan sikap, perilaku, dan nilai sosial budaya ke arah yang dikehendaki. Interaksi dengan budaya baru diperoleh melalui pendidikan iptek. Sistem pendidikan yang mantap serta penguasaan iptek akan membentuk budaya bangsa sangat tangguh.

3) Pembinaan Ketahanan Sosial Budaya

a) Pengembangan Sosial Budaya

Pengembangan sosial budaya bangsa Indonesia berjalan bersama dengan pengembangan sosial budaya daerah. Kebhinnekaan budaya daerah yang merupakan kekayaan bangsa justru menuntut agar pengembangan sosial budaya daerah mendapatkan prioritas. Dengan berkembangnya sosial budaya daerah, sosial budaya bangsa yang merupakan hasil atau resultan sosial budaya daerah akan berkembang pula.

b) Pembinaan Kehidupan Beragama

Pembinaan kehidupan beragama tidak hanya mencakup penghayatan dan pengamalan ajaran agama untuk diri manusia pemeluknya, tetapi harus disertai pemahaman dan penghormatan terhadap keberadaan agama lain beserta masyarakat pemeluknya.

c) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan iptek sebagai perwujudan budaya bangsa. Sesuai dengan kekhasan budaya bangsa yang terdiri atas unsur-unsur budaya daerah yang beraneka ragam, bangsa Indonesia seharusnya mampu melahirkan cabang-cabang ilmu pengetahuan baru atau teknologi yang sesuai dengan identitas bangsa.

h. Gatra Pertahanan dan Keamanan

1) Konsepsi Ketahanan Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem pertahanan dan keamanan negara dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan NKRI.

Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, dan menggerakkan potensi nasional, termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah dan negara Republik Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai intinya guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan Tannas Indonesia.

Ketahanan pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Kondisi yang dinamik itu juga dalam menghadapi dan mengatasi segala TAHG yang datang dari luar atau dari dalam serta yang langsung dan tidak langsung membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Wujud ketahanan pertahanan dan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat. Daya tangkal itu mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara, dan menangkal segala bentuk ancaman. Dengan beranalog pada pengertian Tannas, ketahanan pertahanan dan keamanan pada hakikatnya adalah keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara, suatu perjuangan rakyat semesta. Pada saat seluruh potensi dan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer, dan kepolisian disusun dan dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, dan terkoordinasi untuk menjamin penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), dapat terjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang ditandai hal-hal berikut:

a) Pandangan Bangsa Indonesia tentang Perang dan Damai

Bangsa Indonesia cinta damai dan ingin bersahabat dengan semua bangsa negara di dunia serta tidak dikehendaki terjadinya sengketa bersenjata atau perang. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berhasrat dalam setiap penyelesaian pertikaian, baik nasional maupun internasional selalu mengutamakan cara-cara damai. Walaupun cinta damai, bangsa Indonesia lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh untuk mempertahankan ideologi dan dasar negara Pancasila, kemerdekaan, dan kedaulatan negara Republik Indonesia serta keutuhan bangsa.

b) Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan NKRI dilandasi oleh landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD NRI 1945, dan landasan visional Wasantara. Pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban

bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, terpeliharanya keamanan nasional, dan tercapainya tujuan nasional.

- (1) Usaha pembelaan negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta kerelaan berjuang dan berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, tanpa kenal menyerah. Upaya pertahanan dan keamanan negara yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional tersebut dirumuskan ke dalam doktrin yang selama ini disebut Doktrin Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia;
- (2) Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia diselenggarakan sishankamrata yang bersifat total, kerakyatan, dan kewilayahan. Pendayagunaan potensi nasional dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan negara dilakukan secara optimal dan terkoordinasi untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan negara dalam keseimbangan dan keserasian antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan;
- (3) Segenap kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta diorganisasikan ke dalam satu wadah tunggal yang dinamakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). TNI harus tetap memegang jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional untuk tetap mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2) Analisis dan Permasalahan

Faktor-faktor penting yang memengaruhi upaya peningkatan ketahanan pertahanan dan keamanan, antara lain adalah sebagai berikut:

a) Geografi

Untuk dapat mempertahankan negara sesuai dengan sifat geografi Indonesia yang berupa kepulauan nusantara, diperlukan kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia yang bermutu, mahir dalam melaksanakan operasi-operasi gabungan, dan memiliki kemampuan strategis yang memadai sebagai faktor

penangkal dengan kemampuannya untuk menguasai dan melindungi setiap titik, setiap jengkal tanah, dan wilayah perairan di setiap penjuru tanah air serta wilayah udara di atasnya.

b) Demografi

Pemerataan, persebaran, dan kepadatan penduduk kurang proporsional sehingga banyak terdapat daerah-daerah strategis yang relatif terlalu jarang dan terlalu padat penduduknya. Kualitas penduduk yang mampu berperan positif dalam keamanan nasional sangat menentukan karena ketahanan pertahanan dan keamanan merupakan usaha integral rakyat.

c) Sumber Kekayaan Alam

SKA pada umumnya makin lama semakin langka, sedangkan kebutuhan manusia terus meningkat seolah-olah tidak ada batasnya. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian antara kebutuhan dan SKA yang ada. Salah satu pengaruh yang dapat mengancam ketahanan nasional yaitu kekayaan alam seperti sumber daya energi. Bila kita mencermati kelangkaan energi yang terjadi saat ini, dapat menjadi sebuah ancaman yang serius bagi NKRI di masa yang akan datang.

Karena tidak adanya kepastian masa depan, upaya pertahanan dan keamanan negara (hankamneg) harus senantiasa diarahkan untuk memperhitungkan apa yang bakal terjadi pada masa depan. Selanjutnya, harus selalu dirumuskan jalan dan tindakan apa yang perlu dipilih untuk menghadapi setiap perubahan. Dengan demikian, diharapkan ketidakpastian dapat ditekan serendah-rendahnya dengan perjuangan, perhitungan, dan kesiagaan untuk menghadapi setiap kemungkinan.

d) Kondisi Internasional

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pada hakikatnya pertentangan-pertentangan internasional merupakan refleksi dari kepentingan-kepentingan nasional setiap negara. Kondisi internasional menunjukkan tidak adanya polarisasi perimbangan kekuatan yang tidak lagi didasarkan atas sistem bipolar. Akan tetapi, hal itu lebih merupakan perimbangan kekuatan yang bersifat polisentris dengan kepentingan-kepentingan nasional bangsa-bangsa yang bersangkutan berupa regionalisme dan koeksistensi yang sangat menonjol. Adanya tekanan-tekanan internasional yang dalam kelanjutannya dapat terwujud dan berakibat timbulnya konflik-konflik bersenjata.

e) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan iptek yang sangat cepat di negara-negara maju mengakibatkan ketinggalan dan ketergantungan Indonesia dalam iptek. Perlu diambil langkah yang konkret untuk mengurangi lebarnya jurang ketinggalan tersebut. Dalam upaya di bidang hankamneg, perlu diusahakan peningkatan kemampuan nasional dalam iptek, penelitian dan pengembangan, khususnya dalam mendukung sistem senjata teknologi (sistek).

f) Kepemimpinan dan Manajemen

Berhasil atau gagalnya bangsa Indonesia di bidang hankamneg akan sangat dipengaruhi oleh adanya kepemimpinan yang kuat, bersih, berwibawa, dan dinamis serta mendapat kepercayaan rakyat, terutama pada masa-masa kritis ketika kepemimpinan diperlukan untuk dapat menjamin kelangsungan bangsa dan negara. Kemampuan manajemen sesuai dengan kepribadian Indonesia pada semua eselon perlu ditingkatkan. Anggaran pertahanan dan keamanan sangat terbatas akan lebih memerlukan tingkat efisiensi manajemen yang tinggi dan kearifan dalam memperjuangkan anggaran yang lebih memadai.

3) Pembinaan Ketahanan Pertahanan dan Keamanan

a) Pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara yang berisi ketangguhan, kemampuan, dan kekuatan melalui penyelenggaraan sishankamrata untuk menjamin keseimbangan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

b) Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan mengamankan kedaulatan negara yang mencakup wilayah tanah air beserta segenap isinya merupakan suatu kehormatan demi martabat bangsa dan negara. Oleh karena itu, haruslah diselenggarakan dengan mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri.

c) Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan dimanfaatkan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan untuk kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

- d) Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus dilindungi dan segala ancaman dan gangguan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin bagi segenap lapisan masyarakat bangsa Indonesia.
- e) Perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kekuatan serta kemampuan pertahanan dan keamanan sedapat mungkin harus dihasilkan oleh industri dalam negeri. Pengadaan dari luar negeri dilakukan karena terpaksa dan industri dalam negeri masih terbatas kemampuannya. Oleh karena itu, harus ditingkatkan kemampuannya.
- f) Pembangunan dan penggunaan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan haruslah diselenggarakan oleh manusia-manusia yang berbudi luhur, arif bijaksana, menghormati hak asasi manusia (HAM), dan menghayati makna nilai serta hakikat perang dan damai. Kelangsungan hidup dan perkembangan hidup bangsa memerlukan dukungan manusia-manusia yang bermutu tinggi, tanggap dan tangguh serta bertanggung jawab, serta kerelaan berjuang dan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan dan pribadi.
- g) Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan NKRI. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan dan negara Republik Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai intinya. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan Tannas Indonesia.
- h) Sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional, TNI berpedoman pada Sapta Marga yang merupakan penjabaran Pancasila. Sebagai kekuatan pertahanan dalam keadaan damai, TNI dikembangkan dengan kekuatan kecil, profesional, efektif, efisien, dan modern bersama segenap kekuatan perlawanan bersenjata dalam wadah tunggal TNI disusun dalam sishankamrata dengan strategi penangkalan.

- i) Sebagai kekuatan inti keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polri berpedoman pada Tribrata dan Catur Prasetia dan dikembangkan sebagai kekuatan yang mampu melaksanakan penegakan hukum, memelihara, dan mewujudkan kamtibmas.
- j) Masyarakat secara terus-menerus perlu ditingkatkan kesadaran dan ketaatannya pada hukum. Dengan demikian, ketahanan pertahanan dan keamanan yang diinginkan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas hankamneg yang dinamis, mengamankan rakyat pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

i. Implementasi Konsepsi Ketahanan Nasional dalam Pembangunan Nasional

1) Relevansi Ketahanan Nasional dengan Pembangunan Nasional

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional, diperlukan keuletan dan ketangguhan yang terintegrasi dari seluruh kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh serta terpadu berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945, dan Wasantara. Oleh karena itu, penggunaan konsepsi Tannas yang tepat diharapkan mampu mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional.

Sebagai suatu pedoman, konsepsi Tannas pada dasarnya sangat penting untuk diimplementasikan dalam seluruh penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara lebih konkret, konsepsi Tannas digunakan sebagai pedoman dalam

penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah/wilayah mulai tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan serta tahap evaluasinya. Untuk implementasinya, konsepsi Tannas perlu dijabarkan dalam kerangka pemikiran yang lebih teknis operasional, tetapi tetap mengacu pada kaidah yang terkandung dalam konsepsi termaksud.

Relevansi Tannas dengan pembangunan nasional tercermin pada konsepsi Tannas untuk menumbuhkan kondisi kehidupan nasional yang diinginkan melalui pembangunan nasional. Makin meningkatnya intensitas pembangunan nasional, akan meningkatkan Tannas. Sebaliknya, kukuhnya Tannas akan mendorong lajunya pembangunan nasional. Secara implisit, Tannas mengandung konsepsi tentang pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam segala aspek dan dimensi kehidupan nasional berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945, dan Wasantara.

2) Kriteria Implementasi

Kriteria dimaksud adalah nilai-nilai praktis yang merupakan cerminan dari kaidah-kaidah konsepsional yang terkandung dalam konsepsi Tannas. Nilai-nilai tersebut harus secara substantif terlihat dalam pelaksanaan pembangunan nasional/daerah. Kriteria atau nilai tersebut adalah sebagai berikut:

a) Keseluruhan (*Comprehensive*)

Maksud dari keseluruhan adalah bahwa semua aspek yang terkait dengan pokok masalah harus diperhatikan dan dipertimbangkan keterkaitannya. Untuk masalah yang berskala nasional, pengertian keseluruhan mencakup kelima gatra dinamis, yaitu gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Untuk masalah dengan skala yang lebih sempit, pengertian keseluruhan dapat dibatasi dengan aspek-aspek yang terkait saja, gambaran yang utuh tentang rangkaian keterkaitan dari seluruh aspek.

b) Keuletan dan Ketangguhan

Pengembangan faktor keuletan dan ketangguhan merupakan inti dari penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

c) Keseimbangan antara Kepentingan Kesejahteraan dan Keamanan

Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang

mendasar serta esensial, baik bagi perseorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan yang serasi mencerminkan keuletan dan ketangguhan Tannas.

d) Dinamis

Kedinamisan mempertimbangkan kecenderungan perubahan lingkungan luar dan dalam. Lingkungan luar berasal dari luar sistem pembangunan nasional, sedangkan lingkungan dalam adalah kondisi yang dihasilkan dari penyelenggaraan pembangunan tersebut atau merupakan umpan balik (*feedback*).

e) Kemandirian

Percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian (*independence*) ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global.

f) Partisipatif

Tannas merupakan resultan dari kinerja segenap komponen bangsa, baik pada suprastruktur, infrastruktur, maupun substruktur. Kerja sama yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom beserta seluruh masyarakat Indonesia.

3) Realisasi Implementasi

Pengaruh arus globalisasi dengan segala dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan keniscayaan yang harus diterima dan tidak dapat dihindari, yang dengan sendirinya menuntut keuletan dan ketangguhan dari seluruh komponen bangsa yang dalam dirinya memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi berbagai macam TAHG yang dari manapun datangnya terutama yang membahayakan kepentingan nasional. Untuk meningkatkan kondisi tersebut diperlukan pembinaan dan implementasi Tannas yang terus-menerus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

a) Implementasi dalam Kehidupan Bermasyarakat

Materi Tannas telah diajarkan dan dimasyarakatkan melalui jalur pendidikan maupun luar sekolah. Namun, karena berbagai kendala baik dari regulasi, kelembagaan, serta besarnya jumlah

penduduk dan luasnya wilayah Indonesia serta pengaruh lingkungan strategis yang begitu cepat, sangat mempengaruhi pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap konsepsi Tannas. Kehidupan bermasyarakat masih mengandung kerawanan masalah SARA, primordialisme, dan potensi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Sampai saat ini masih dirasakan kecenderungan yang dapat memicu terjadinya kerusuhan massal yang bersumber pada masalah SARA ditambah dengan masalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial ekonomi. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa kerukunan hidup bermasyarakat, kerukunan hidup intra dan antarumat beragama, serta solidaritas sosial sebagai penopang persatuan dan kesatuan masih belum mantap. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab turut bermain dengan memanfaatkan kerawanan tersebut untuk kepentingannya atau kepentingan sponsornya.

Masalah primordialisme, masalah SARA, masalah ketidakadilan, masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta masalah kesenjangan sosial ekonomi secara bertahap dapat diatasi apabila seluruh warga masyarakat Indonesia memahami, menghayati, dan mengamalkan Wasantara dan Tannas sebagai daya tangkal terhadap TAHG. Implementasi Tannas hendaknya dimulai dari setiap pribadi yang memahami pengetahuan konsepsi Tannas, berlanjut pada perubahan sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang kemudian meningkat ke lingkungan keluarga, kelompok, dan golongan masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan dengan selalu menanamkan dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam konsepsi Tannas, terutama bagaimana untuk selalu meningkatkan kemampuan menjadi ulet dan tangguh dalam seluruh aspek kehidupan, dan tidak bertindak kontraproduktif terhadap Tannas (tindakan yang justru melemahkan Tannas).

b) Implementasi dalam Kehidupan Berbangsa

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, didasarkan pada kesamaan cita-cita yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Namun, cita-cita proklamasi kemerdekaan tersebut tidaklah mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan berbangsa. Kecenderungan terjadinya konflik dan perpecahan dalam kehidupan berbangsa sampai saat ini masih

saja terjadi. Kondisi ini antara lain bersumber dari adanya perbedaan pada cita-cita dan/atau ideologi negara, seperti DI/TII, NII, atau PRRI yang berkeinginan mengubah bentuk negara menjadi negara federal atau negara Islam. Bahkan, ada yang berkeinginan memisahkan diri dari NKRI, seperti Papua Merdeka, Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan, serta perbedaan kepentingan kekuatan politik, khususnya pada saat menjelang dan masa kampanye pemilu. Demokrasi politik yang dihasilkan era reformasi, di samping memiliki sisi positif yaitu menuntut berbagai pembenahan khususnya di bidang politik, ekonomi, dan hukum, juga memiliki sisi negatif apabila tidak ada hukum dan pembenahan yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.

Sumber-sumber perpecahan tersebut di atas akan secara bertahap dapat diatasi apabila seluruh komponen bangsa, terutama para penyelenggara negara, elite politik, dan generasi muda bangsa menghayati cita-cita dan tujuan nasional serta konsepsi nasional Wasantara dan Tannas.

Kekuatan politik hendaknya menyerap aspirasi masyarakat dan mengartikulasikan ke dalam kepentingan golongan/parpol untuk selanjutnya disalurkan pada suprastruktur dan diperjuangkan dengan didasari budaya politik Pancasila. Di antaranya adanya musyawarah untuk mufakat, demokratis, tidak memaksakan kehendak, dan tidak adu kekuasaan/kekuatan, serta lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi dan golongan/parpol, sehingga negara bangsa yang dicita-citakan pendiri dapat diwujudkan.

c) Implementasi dalam Kehidupan Bernegara

Tannas merupakan doktrin nasional bagi bangsa Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu ajaran atau konsensus bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan falsafah Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan Wasantara guna menjamin pola berpikir, bertindak dalam menyatupadukan usaha bersama dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Sebagai ajaran nasional, sudah seharusnya konsepsi Tannas yang merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia dijadikan pedoman bagi perumusan penyusunan berbagai aturan perundangan, perumusan kebijakan dan strategi pada tingkat pusat dan daerah. Sebagai metode yang menggunakan pemikiran komprehensif integral (utuh menyeluruh) hubungan antargatra saling terkait dalam perumusan berbagai kebijakan nasional dan

pemecahan berbagai permasalahan bernegara. Sebagai doktrin dasar, dapat dijadikan sebagai landasan dalam membuat berbagai aturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan yang dapat menyatupadukan upaya bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektor untuk menghindari cara berpikir yang terkotak-kotak. Begitu juga sebagai pola dasar pembangunan nasional, merupakan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional secara terpadu di segala bidang kehidupan.

d) Implementasi dalam Era Globalisasi

Kata “globalisasi” atau “kesejagatan” dewasa ini menjadi kata sehari-hari yang diucapkan di mana-mana. Kata globalisasi tersebut menunjukkan gejala menyatunya kehidupan manusia di planet bumi ini tanpa mengenal batas-batas fisik geografi dan sosial yang kita kenal sekarang ini. Globalisasi berkembang melalui proses yang dipicu dan dipacu oleh kemajuan pesat “revolusi” di bidang teknologi komunikasi atau informasi, transportasi, dan perdagangan.

Globalisasi ini membawa angin perubahan baru dalam kehidupan kita, baik sebagai individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Angin perubahan sebagai dampak kesejagatan tersebut di satu sisi dapat membawa kemajuan, namun di sisi lain dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat.

Latar belakang Tannas dalam era globalisasi ditandai dengan perdagangan bebas di mana produk dari suatu negara dengan bebas dapat masuk dan diperjualbelikan di negara lain. Kenyataan itu tentu menimbulkan tantangan bagi semua negara untuk mampu bersaing dalam meningkatkan kualitas produk industrinya. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik tentu memiliki rasa bangga terhadap produk dalam negeri.

Di era globalisasi, persaingan begitu ketat dan tajam pada semua aspek kehidupan seperti di bidang ideologi, kehancuran komunisme di Eropa Timur memungkinkan liberalisme kapitalisme mendominasi dunia; di bidang politik, pengaruh negara-negara besar sulit dielakkan; di bidang ekonomi, perdagangan bebas menyebabkan produksi lokal terpental; di bidang sosial budaya, pola hidup dan budaya maunya enak dan senang saja mewarnai semua lapisan masyarakat; dan di bidang pertahanan keamanan, penguasaan teknologi persenjataan bukan lagi jaminan keamanan melainkan cenderung sebagai ancaman.

Dalam kondisi seperti itu, maka hanya bangsa dan negara yang memiliki kualitas sajalah yang berpeluang memenangkan persaingan tersebut dan kunci untuk mencapai itu adalah SDM yang berkualitas dan didukung oleh teguhnya pendirian, loyal pada bangsa dan negara.

- (1) Ciri era globalisasi di mana kehidupan penuh persaingan, perdagangan bebas, dan hubungan antarbangsa yang semakin terbuka, untuk itu diperlukan persiapan matang dan memadai antara lain: kualitas SDM yang tinggi, tercermin dari kemampuan profesionalismenya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan; semakin andalnya sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri yang berarti semakin kecil ketergantungan pada sumber pembiayaan dari luar negeri; kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang paling pokok agar tidak menimbulkan berbagai keraguan; ketahanan ekonomi yang tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi; serta etos kerja dan disiplin masyarakat.

Perlu diperhatikan juga situasi internasional baik situasi politik, ekonomi, maupun keamanan, karena hal itu akan dapat memengaruhi perkembangan kehidupan baik langsung maupun tidak langsung, dan pada akhirnya akan mengganggu tercapainya tujuan nasional. Era globalisasi akan selalu memberikan kejutan peristiwa yang berdampak luas baik dalam lingkungan lokal, regional, maupun internasional. Seperti contoh, peristiwa aktual penyerangan AS dan Inggris ke Irak, rencana *preemptive strike* Jepang kepada silo-silo rudal di Korea Utara, peristiwa demi peristiwa silih berganti dan mengejutkan dunia, semua itu adalah fenomena sosial maupun politik yang terus berubah, baik di lingkungan dekat maupun yang jauh di sana.

Fenomena sosial yang mencuat yakni tumbuhnya sifat interkoneksi, interdependensi antarbangsa dan sifat-sifat saling mempengaruhi kian lama makin menguat. Hal lain yang perlu juga mendapat perhatian dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional adalah lingkungan hidup. Dalam era globalisasi dan pengalaman buruk yang terjadi seperti “efek rumah kaca” akibat pembakaran yang melepaskan karbondioksida (CO₂), menipisnya lapisan ozon.

Lebih-lebih lagi, kecepatan berlangsungnya perubahan dalam penggunaan sumber daya meninggalkan sedikit waktu untuk mengantisipasi dan mencegah dampak yang tidak diharapkan.

(2) Upaya menghadapi era globalisasi dan perkembangan lptek yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:

(a) Kebijakan bidang ekonomi:

- ✓ Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil/kerajinan rakyat;
- ✓ Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan persaingan global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat, dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan SDM dengan menghapus segala bentuk diskriminatif.

(b) Kebijakan bidang politik:

- ✓ Menegaskan arah politik luar negeri yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan kepada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat;

- ✓ Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC dan WTO;
 - ✓ Memperkuat kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana penerangan khususnya di luar negeri dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional.
- (c) Kebijakan bidang agama:
- ✓ Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama, sehingga lebih terpadu dan integrasi dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai;
 - ✓ Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa dan negara.
- (d) Kebijakan bidang pendidikan:
- ✓ Meningkatkan kemampuan akademik dan kesejahteraan tenaga kependidikan sebagai tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat wibawa lembaga dan tenaga pendidikan;
 - ✓ Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan lptek dan seni.

(e) Kebijakan bidang sosial budaya:

- ✓ Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal, termasuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- ✓ Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar, dan pemakai;
- ✓ Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif, terutama bahaya penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, dan narkoba lainnya melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba;
- ✓ Membangun masyarakat Indonesia modern sesuai budaya bangsa dengan berpedoman pada Pancasila, sehingga terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai iptek, serta berdisiplin.

Perlu diperhatikan juga situasi internasional baik situasi politik, ekonomi, maupun keamanan, karena hal itu akan dapat memengaruhi perkembangan kehidupan baik langsung maupun tidak langsung, dan pada akhirnya akan mengganggu tercapainya tujuan nasional. Era globalisasi akan selalu mengundang teka-teki karena sukar diprediksi. Berbagai antisipasi dilakukan suatu bangsa menghadapi perkembangan politik, ekonomi, budaya dan keamanan

cenderung meleset. Contoh isu sentral tentang HAM, demokratisasi, dan lingkungan hidup yang dahulu dipelopori oleh bangsa-bangsa barat atau Eropa dengan menempatkan dirinya seolah-olah sebagai negara maju (*champion*) HAM dan demokrasi. Ternyata di awal abad 21 ini semuanya memudar dan diingkari sendiri, contoh adalah serangan AS dan sekutunya terhadap Irak, yang cenderung tidak mengenal batas-batas kemanusiaan, tidak berlandaskan hukum internasional/tidak mematuhi seruan PBB sebagai pertanda bahwa adikuasa menerapkan hukum rimba dengan leluasa, tidak lagi memperhatikan dan menghormati HAM dan menghancurkan negara berdaulat. Pada sisi lain terjadi ironi demokratisasi, sementara orang berpikir dan berharap banyak tentang nuansa demokratisasi yang serba sehat, bebas, dan dijamin hak asasinya, tetapi nyatanya tidak membuat masyarakat menjadi sejahtera dan tenteram hidupnya.

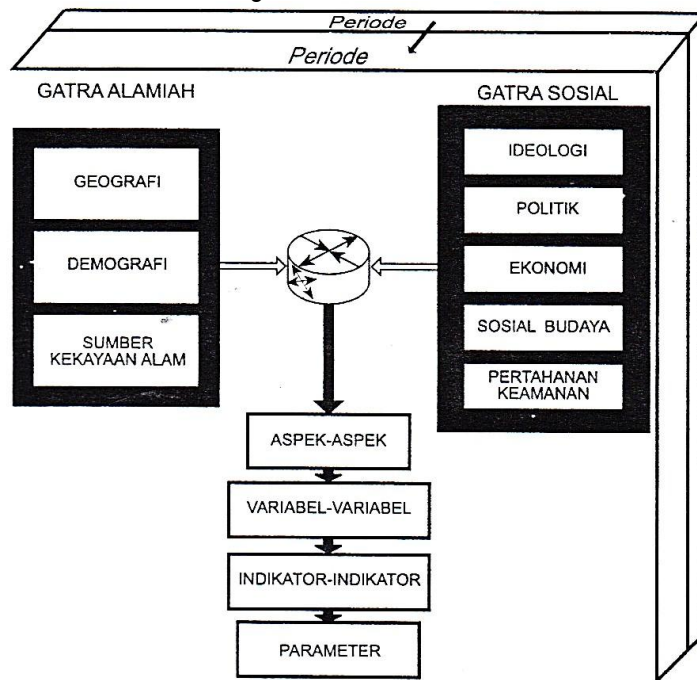
BAB IV

SISTEM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL

12. Model Pengukuran Ketahanan Nasional

Dalam Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional, setiap gatra dirinci menjadi beberapa aspek. Aspek dirinci menjadi beberapa variabel, dan variabel dirinci lagi menjadi beberapa indikator. Setiap indikator dinilai berdasarkan parameter yang terukur. Ilustrasi skematis pengukuran ketahanan nasional dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1
Model Pengukuran Ketahanan Nasional



Secara umum, dinamika dan setiap variabel diukur dengan melihat dua indikator penting, yaitu indikator kebijakan dan indikator kinerja. Oleh karena itu, dalam setiap variabel selalu ada indikator kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang merupakan implikasi dari kebijakan tersebut.

Penentuan bobot. Setiap indikator, variabel, dan gatra diberi bobot sesuai dengan kontribusi masing-masing terhadap Tannas. Bobot indikator ditentukan sesuai dengan besarnya kontribusi indikator tersebut terhadap ketahanan suatu variabel. Bobot variabel ditentukan sesuai dengan kontribusi variabel tersebut terhadap ketahanan suatu gatra. Demikian juga bobot gatra ditentukan sesuai dengan kontribusi gatra tersebut terhadap Tannas atau Tannas di daerah, sehingga bobot masing-masing wilayah dapat berbeda dengan bobot nasional tergantung dari karakteristiknya.

Ada tiga metode yang digunakan untuk menentukan bobot gatra, variabel, maupun indikator. *Pertama*, metode ranking atau skala prioritas (Pidd: 2003; Robert, dkk: 1989); *kedua*, metode *expert judgement* (penilaian pakar); dan *ketiga*, metode kombinasi.

Metode ranking, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: *Pertama*, ditentukan ranking gatra, variabel, atau indikator. *Kedua*, dilakukan konversi terhadap ranking skala prioritas tersebut. *Ketiga*, ditentukan bobotnya. Berikut ini dapat dilihat penentuan bobot gatra berdasarkan ranking (Tabel 3.1).

Tabel 3.1
Penentuan Bobot Gatra Berdasarkan Ranking

No	Gatra	Urutan Skala Prioritas	Konversi Urutan	Bobot (%)
1	Geografi	8	1	$(1/36) \times 100 = 2,78$
2	Demografi	6	3	$(3/36) \times 100 = 8,33$
3	Sumber Kekayaan Alam	7	2	$(2/36) \times 100 = 5,56$
4	Ideologi	5	4	$(4/36) \times 100 = 11,11$
5	Politik	4	5	$(5/36) \times 100 = 13,89$
6	Ekonomi	1	8	$(8/36) \times 100 = 22,22$
7	Sosial Budaya	3	6	$(6/36) \times 100 = 16,67$
8	Pertahanan dan Keamanan	2	7	$(7/36) \times 100 = 19,44$
			Jumlah = 36	Jumlah = 100

Dengan cara yang sama dapat ditentukan bobot untuk variabel dan indikator. Metode ini mengandung kelemahan yaitu dimungkinkan adanya perbedaan besaran yang ekstrem antara bobot untuk ranking pertama dengan bobot ranking terakhir manakala jumlah gatra, variabel, atau indikatornya banyak.

Metode *expert judgement*, dengan metode ini bobot ditentukan secara langsung melalui *judgement* pakar (dalam hal ini adalah dewan pakar) yang telah teruji dan diakui kepakarannya. Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan di dalam metode ranking. Kelemahan utama dari metode ini adalah tergantung dari objektivitas dan kompetensi dari para pakar. Oleh karena itu, metode ini harus dilakukan melalui *Focus*

Group Discussion (FGD) yang melibatkan para pemangku kepentingan dan para pakar berlandaskan pada fakta serta pengalaman dan pengetahuan masing-masing peserta FGD.

Metode kombinasi dilakukan dengan mengkombinasikan antara metode ranking dengan *expert judgement*. Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari kedua metode sebelumnya. Prosedur metode ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, penentuan bobot dilakukan berdasarkan metode ranking; *Kedua*, bobot yang dihasilkan berdasarkan metode ranking tersebut divalidasi kembali oleh para pakar.

Penentuan skor (peringkat). Setiap indikator dinilai dan diberi skor (peringkat), yaitu: (1) Rawan; (2) Kurang tangguh; (3) Cukup tangguh; (4) Tangguh; dan (5) Sangat tangguh, dengan menggunakan parameter terukur. Penentuan peringkat dilakukan dengan menggunakan *benchmark* dengan “*competitors*” norma atau perbandingan dengan masa lalu.

Secara konkret, metode penentuan bobot dan skor pada berbagai indikator, variabel, dan gatra dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Penentuan Bobot dan Skor

No	Variabel	Bobot Variabel (%)	Indikator	Bobot Indikator (%)	Skor (Peringkat) Ketahanan	Bobot X Skor
					1 2 3 4 5	
1	Variabel G_1	V_1	1.1 Indikator 1.1	W_{11}	X_{11}	$W_{11}X_{11}$
						
			1.t Indikator 1.t	W_{1t}	X_{1t}	$W_{1t}X_{1t}$
....						
k	Variabel G_k	V_k	k.1 Indikator k.1	W_{k1}	X_{k1}	$W_{k1}X_{k1}$
						
			k.n Indikator k.n	W_{kn}	X_{kn}	$W_{kn}X_{kn}$

Misalkan suatu gatra memiliki k variabel yang diberi nama Variabel G_1 hingga Variabel G_k . Variabel tersebut masing-masing diberi bobot (dalam persen) V_1 hingga V_k . Total bobot untuk gatra tersebut dapat dihitung melalui persamaan (3.1):

$$V_1 + V_2 + \dots + V_k = 100 \dots\dots\dots (3.1)$$

Variabel G_1 memiliki t indikator yaitu Indikator 1.1 hingga Indikator 1.t dengan bobot indikator (dalam persen) masing-masing W_{11} hingga W_{1t} . Total bobot untuk variabel tersebut dapat dihitung melalui persamaan (3.2):

$$W_{11} + W_{12} + \dots + W_{1t} = 100 \quad (3.2)$$

Begitu pula untuk variabel G_k yang memiliki n indikator yaitu Indikator k.1 hingga Indikator k.n dengan bobot indikator masing-masing W_{k1} hingga W_{kn} . Total bobot untuk variabel tersebut dapat dihitung melalui persamaan (3.3):

$$W_{k1} + W_{k2} + \dots + W_{kn} = 100 \quad (3.3)$$

Peringkat ketahanan masing-masing indikator X_{ij} diperoleh dengan cara mengonversikan nilai indikator yang didapatkan dari pengukuran ke dalam peringkat 1 (rawan), 2 (kurang tangguh), 3 (cukup tangguh), 4 (tangguh), dan 5 (sangat tangguh) sesuai dengan parameternya masing-masing.

Setelah peringkat ketahanan masing-masing indikator dipetakan ke skor 1 sampai dengan 5, maka sub indeks untuk masing-masing variabel dapat dihitung. Sub indeks untuk Variabel G_i diberikan oleh persamaan (3.4):

$$G_i = \sum_{j=1}^{m_i} W_{ij} X_{ij} \quad (3.4)$$

Keterangan:

$i = 1, 2, \dots, k$

k = banyaknya variabel pada gatra

m_i = banyaknya indikator pada variabel G_i

W_{ij} = bobot untuk indikator x_{ij}

X_{ij} = peringkat indikator (1, 2, 3, 4, atau 5)

G_i = sub indeks untuk variabel G_i

Selanjutnya indeks Tannas setiap gatra diberikan oleh rumus (3.5):

$$\text{Indeks Gatra} = \frac{\sum_{i=1}^k V_i G_i}{100} \quad (3.5)$$

Keterangan:

k = banyaknya variabel dalam gatra

V_i = bobot variabel G_i

G_i = sub indeks untuk variabel G_i

Indeks Tannas dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (3.6):

$$\begin{aligned} \text{Indeks Tannas} = & a_1 (\text{Indeks Geografi}) + a_2 (\text{Indeks Demografi}) + \\ & a_3 (\text{Indeks SKA}) + a_4 (\text{Indeks Ideologi}) + \\ & a_5 (\text{Indeks Politik}) + a_6 (\text{Indeks Ekonomi}) + \\ & a_7 (\text{Indeks Sosbud}) + a_8 (\text{Indeks Hankam}) \dots\dots\dots (3.6) \end{aligned}$$

Keterangan:

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_8$ = bobot gatra geografi, demografi, ..., hankam

$a_1 + a_2 + \dots + a_8 = 100$

Dengan cara yang sama dapat dihitung indeks Tannas masing-masing provinsi dengan menggunakan bobot yang relevan bagi masing-masing provinsi. Untuk menentukan indeks ketahanan pada level variabel, gatra, dan agregat digunakan indeks yang dihitung melalui konversi. Konversi indeks tersebut dilakukan untuk mengakomodasi perubahan pengukuran dari yang bersifat diskret ke kontinu. Rumus yang digunakan untuk konversi adalah sebagai berikut:

$$\text{Dispersi angka konversi} = \Delta (nt-nr) / N \dots\dots\dots (3.7)$$

Keterangan:

nt = nilai tertinggi, dalam hal ini = 5, yang mencerminkan peringkat sangat tangguh

nr = nilai terendah, dalam hal ini = 1, yang mencerminkan peringkat rawan

$\Delta (nt-nr)$ = selisih nilai tertinggi (5) dengan nilai terendah (1), yaitu: $5 - 1 = 4$

N = banyaknya kategori peringkat, dalam hal ini berjumlah 5

Jadi, dispersi angka konversi = $4/5 = 0,8$

Setelah dihasilkan dispersi angka konversi berdasarkan persamaan (3.7), maka hasil konversi indeks adalah sebagai berikut:

Rawan	:	1,00 s.d. 1,80
Kurang Tangguh	:	> 1,80 s.d. 2,60
Cukup Tangguh	:	> 2,60 s.d. 3,40
Tangguh	:	> 3,40 s.d. 4,20
Sangat Tangguh	:	> 4,20 s.d. 5,00

a. Aspek, Variabel, dan Indikator dalam Gatra

Aspek, variable, dan indikator masing-masing gatra berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan peran dan fungsi masing-masing gatra dalam sistem Tannas. Jumlah aspek, variable, dan indikator untuk setiap gatra dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Jumlah Aspek, Variabel dan Indikator dalam Gatra

No	Gatra	Aspek	Variabel	Indikator
1	Geografi	7	9	52
2	Demografi	3	7	47
3	Sumber Kekayaan Alam	3	8	146
4	Ideologi	5	14	99
5	Politik	6	18	108
6	Ekonomi	5	20	127
7	Sosial Budaya	4	12	132
8	Pertahanan dan Keamanan	4	20	110
Jumlah		37	108	821*

b. Makna Hasil Pengukuran

Indeks Tannas terdiri atas 5 peringkat, yaitu: 1) rawan, 2) kurang tangguh, 3) cukup tangguh, 4) tangguh, dan 5) sangat tangguh. Melalui pendekatan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*), makna dari kelima peringkat tersebut adalah sebagai berikut:

Rawan. Tannas dikatakan rawan apabila kondisi dinamik nasional yaitu keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi dan mengatasi segala TAHG, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, berada pada kondisi yang sangat lemah. Dalam kondisi ini, ancaman sekecil apapun akan membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kondisi ini disebut juga *alert*.

Kurang Tangguh. Tannas dikatakan kurang tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi lemah. Maknanya adalah dalam jangka pendek negara masih dapat bertahan dari berbagai macam ancaman dan gangguan, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Namun apabila tidak segera ada perbaikan yang signifikan terhadap keuletan dan ketangguhan bangsa, maka dalam jangka panjang ancaman dan gangguan tersebut akan menggoyahkan stabilitas nasional. Kondisi ini disebut juga *warning*.

Cukup Tangguh. Tannas dikatakan cukup tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi cukup memadai dalam menghadapi ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Setiap pilar kehidupan berbangsa dan bernegara juga cukup memadai dalam merespons berbagai tuntutan perubahan yang muncul. Namun ada beberapa kelemahan internal yang perlu segera diperbaiki agar ancaman dan gangguan tidak sampai melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini merupakan tahap awal dari kondisi *moderate*.

Tangguh. Tannas dikatakan tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi baik. Dalam kondisi ini segenap ancaman dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam dapat diatasi. Setiap pilar kehidupan berbangsa dan bernegara berada pada posisi baik dalam merespons berbagai tuntutan perubahan yang muncul. Akan tetapi harus tetap diwaspadai adanya gangguan dan ancaman yang berkepanjangan baik dari luar maupun dari dalam, yang akan melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini lebih baik dari kondisi cukup tangguh, masih berada di kelompok *moderate*, dalam pemantapan menuju ke *sustainable*.

Sangat Tangguh. Tannas dikatakan sangat tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi sangat baik dan prima. Dalam kondisi ini segenap ancaman dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam yang mengancam integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara dapat diatasi dengan baik. Ancaman dan gangguan tersebut tidak akan menggoyahkan Tannas, bahkan dapat diubah menjadi peluang (*opportunity*). Kondisi ini disebut juga *sustainable*.

13. Pengembangan Instrumen Pengukuran

Agar indikator-indikator pada gatra alamiah dan sosial dapat diukur secara operasional, diperlukan instrumen pengukuran. Pengukuran dilakukan pada data kuantitatif dan data kualitatif yang dikuantitatifkan. Data yang digunakan adalah data sekunder maupun data primer. Data primer yang dimaksud meliputi data yang diperoleh

melalui pengamatan/observasi secara langsung, melalui wawancara mendalam (*depth interview* atau *grounded research*) dan FGD. Data sekunder adalah data yang berasal dari berbagai institusi, seperti Kementerian terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), TNI, Polri, Bappenas, BMKG, Pemerintah Provinsi, dan DPRD Provinsi. Pengembangan instrumen pengukuran dilakukan dengan mempertimbangkan tuntutan model, ketersediaan, kelengkapan, dan akurasi data. Instrumen pengukuran selengkapnya dapat dilihat pada buku masing-masing gatra.

14. Bentuk Keluaran (*Output*) Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional

Dengan menggunakan metode seperti yang diuraikan di atas, maka sistem pengukuran Tannas akan menghasilkan keluaran (*output*) sebagai berikut:

- a. Tabel Indeks Ketahanan Nasional pada periode t
- b. Grafik Indeks Ketahanan Nasional pada periode t
- c. Peta Indeks Ketahanan Nasional pada periode t
- d. Tabel Indeks Ketahanan Gatra pada periode t
- e. Grafik Indeks Ketahanan Gatra pada periode t
- f. Peta Indeks Ketahanan Gatra pada periode t
- g. Tabel Indeks Ketahanan Variabel pada periode t
- h. Grafik Indeks Ketahanan Variabel pada periode t
- i. Peta Indeks Ketahanan Variabel pada periode t
- j. Tabel Indeks Ketahanan Indikator pada periode t
- k. Grafik Indeks Ketahanan Indikator pada periode t
- l. Peta Indeks Ketahanan Indikator pada periode t
- m. Profil Ketahanan Nasional pada periode t
- n. Profil Ketahanan Nasional di Wilayah pada periode t

Berikut ini adalah tabel-tabel *output* sistem pengukuran Tannas yang menunjukkan skor ketahanan dan peringkatnya:

Tabel 3.4
Indeks Ketahanan Nasional pada Periode t

No	Wilayah	Indeks Ketahanan Nasional	
		Skor	Rank
1	Nasional	IKN_t	-
2	Aceh	IKP_{1t}	R_{1t}
3	Sumatera Utara	IKP_{2t}	R_{2t}
4	Sumatera Barat	IKP_{3t}	R_{3t}
5	Bengkulu	IKP_{4t}	R_{4t}
6	Jambi	IKP_{5t}	R_{5t}
7	Riau	IKP_{6t}	R_{6t}
8	Kepulauan Riau	IKP_{7t}	R_{7t}
9	Sumatera Selatan	IKP_{8t}	R_{8t}
10	Lampung	IKP_{9t}	R_{9t}
11	Bangka Belitung	IKP_{10t}	R_{10t}
12	Banten	IKP_{11t}	R_{11t}
13	DKI Jakarta	IKP_{12t}	R_{12t}
14	Jawa Barat	IKP_{13t}	R_{13t}
15	Jawa Tengah	IKP_{14t}	R_{14t}
16	DI Yogyakarta	IKP_{15t}	R_{15t}
17	Jawa Timur	IKP_{16t}	R_{16t}
18	Bali	IKP_{17t}	R_{17t}
19	NTB	IKP_{18t}	R_{18t}
20	NTT	IKP_{19t}	R_{19t}
21	Kalimantan Barat	IKP_{20t}	R_{20t}
22	Kalimantan Tengah	IKP_{21t}	R_{21t}
23	Kalimantan Timur	IKP_{22t}	R_{22t}
24	Kalimantan Selatan	IKP_{23t}	R_{23t}
25	Sulawesi Selatan	IKP_{24t}	R_{24t}
26	Sulawesi Tenggara	IKP_{25t}	R_{25t}
27	Sulawesi Barat	IKP_{26t}	R_{26t}
28	Sulawesi Tengah	IKP_{27t}	R_{27t}
29	Sulawesi Utara	IKP_{28t}	R_{28t}
30	Gorontalo	IKP_{29t}	R_{29t}
31	Maluku	IKP_{30t}	R_{30t}
32	Maluku Utara	IKP_{31t}	R_{31t}
33	Papua	IKP_{32t}	R_{32t}
34	Papua Barat	IKP_{33t}	R_{33t}

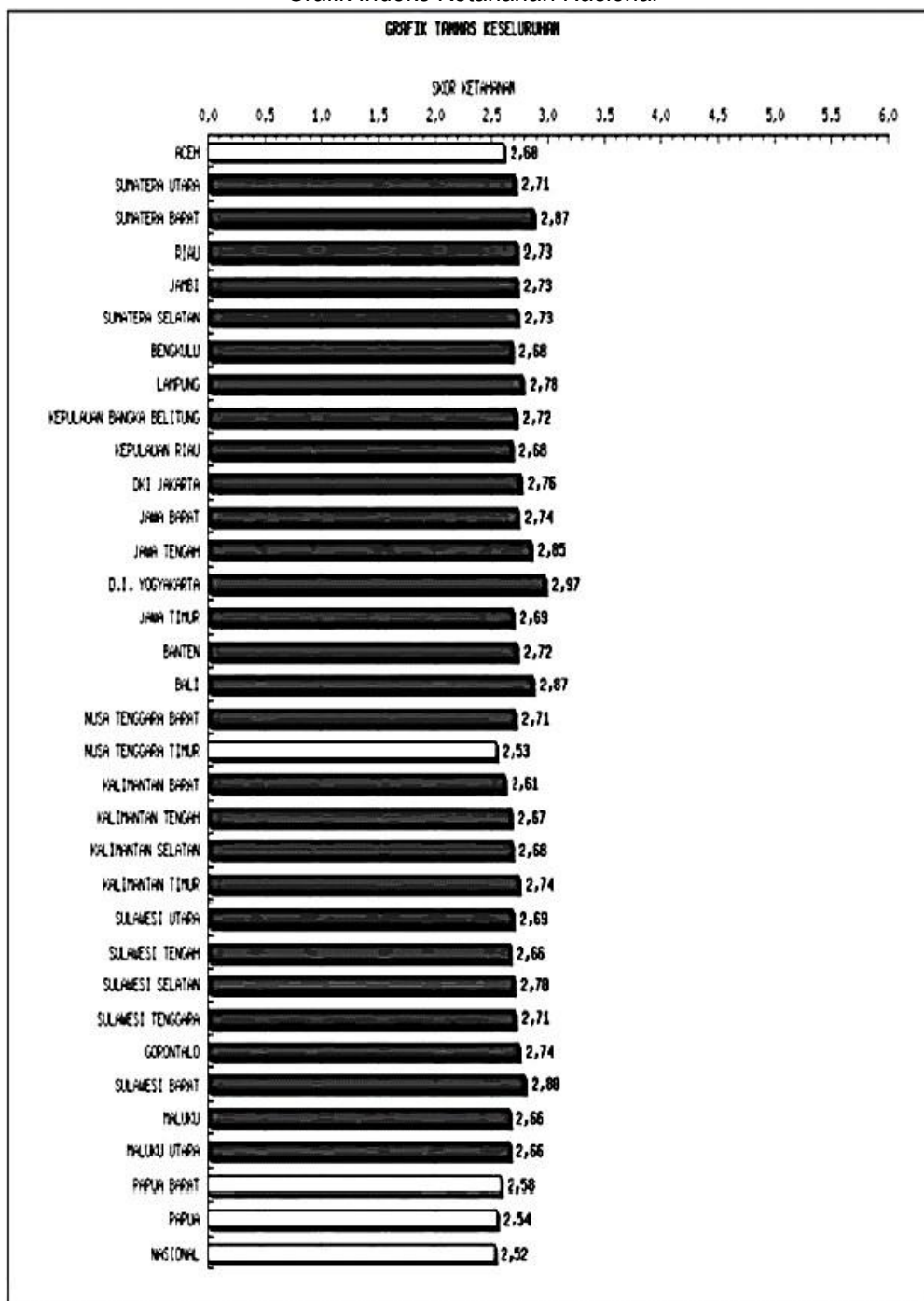
Keterangan:

IKN_t = Indeks Ketahanan Nasional pada periode t

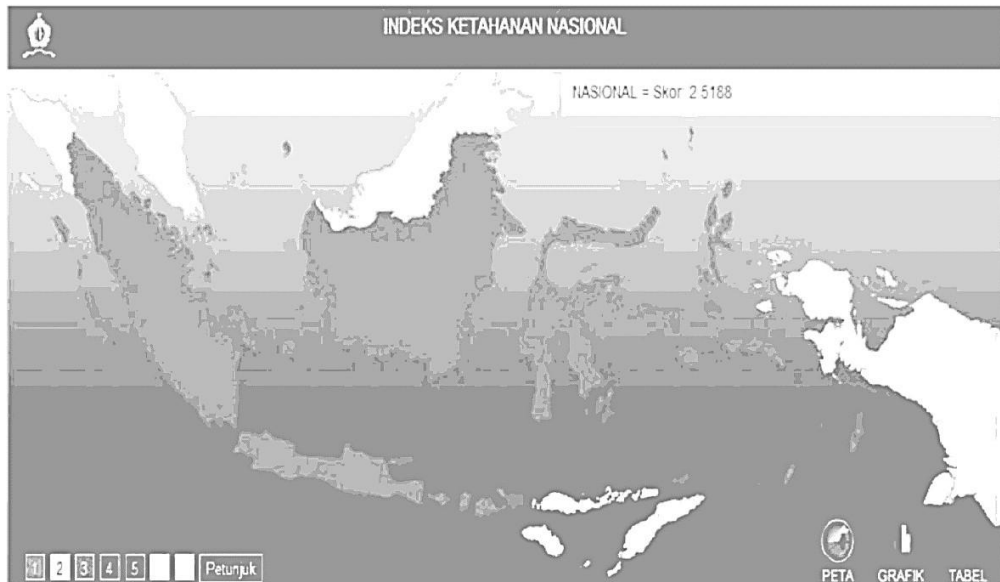
IKP_{it} = Indeks Ketahanan Nasional provinsi ke-i pada periode t

R_{it} = rank Indeks Ketahanan Nasional provinsi ke-i pada periode t

Gambar 3.2
Grafik Indeks Ketahanan Nasional



Gambar 3.3
Peta Indeks Ketahanan Nasional



Tabel 3.5
Indeks Ketahanan Nasional Gatra pada Periode t

Wilayah	Indeks Ketahanan Nasional		Indeks Ketahanan Nasional Gatra															
			Geografi		Demografi		SKA		Ideologi		Politik		Ekonomi		Sosial Budaya		Hankam	
	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor
Nasional	-	IKN _t	-	G _t	-	D _t	-	A _t	-	I _t	-	P _t	-	E _t	-	S _t	-	H _t
Aceh	R _{1t}	IKP _{1t}	RG _{1t}	G _{1t}	RD _{1t}	D _{1t}	RA _{1t}	A _{1t}	RI _{1t}	I _{1t}	RP _{1t}	P _{1t}	RE _{1t}	E _{1t}	RS _{1t}	S _{1t}	RH _{1t}	H _{1t}
Sumatera Utara	R _{2t}	IKP _{2t}	RG _{2t}	G _{2t}	RD _{2t}	D _{2t}	RA _{2t}	A _{2t}	RI _{2t}	I _{2t}	RP _{2t}	P _{2t}	RE _{2t}	E _{2t}	RS _{2t}	S _{2t}	RH _{2t}	H _{2t}
Sumatera Barat	R _{3t}	IKP _{3t}	RG _{3t}	G _{3t}	RD _{3t}	D _{3t}	RA _{3t}	A _{3t}	RI _{3t}	I _{3t}	RP _{3t}	P _{3t}	RE _{3t}	E _{3t}	RS _{3t}	S _{3t}	RH _{3t}	H _{3t}
Bengkulu	R _{4t}	IKP _{4t}	RG _{4t}	G _{4t}	RD _{4t}	D _{4t}	RA _{4t}	A _{4t}	RI _{4t}	I _{4t}	RP _{4t}	P _{4t}	RE _{4t}	E _{4t}	RS _{4t}	S _{4t}	RH _{4t}	H _{4t}
Jambi	R _{5t}	IKP _{5t}	RG _{5t}	G _{5t}	RD _{5t}	D _{5t}	RA _{5t}	A _{5t}	RI _{5t}	I _{5t}	RP _{5t}	P _{5t}	RE _{5t}	E _{5t}	RS _{5t}	S _{5t}	RH _{5t}	H _{5t}
Riau	R _{6t}	IKP _{6t}	RG _{6t}	G _{6t}	RD _{6t}	D _{6t}	RA _{6t}	A _{6t}	RI _{6t}	I _{6t}	RP _{6t}	P _{6t}	RE _{6t}	E _{6t}	RS _{6t}	S _{6t}	RH _{6t}	H _{6t}
Kepulauan Riau	R _{7t}	IKP _{7t}	RG _{7t}	G _{7t}	RD _{7t}	D _{7t}	RA _{7t}	A _{7t}	RI _{7t}	I _{7t}	RP _{7t}	P _{7t}	RE _{7t}	E _{7t}	RS _{7t}	S _{7t}	RH _{7t}	H _{7t}
Sumatera Selatan	R _{8t}	IKP _{8t}	RG _{8t}	G _{8t}	RD _{8t}	D _{8t}	RA _{8t}	A _{8t}	RI _{8t}	I _{8t}	RP _{8t}	P _{8t}	RE _{8t}	E _{8t}	RS _{8t}	S _{8t}	RH _{8t}	H _{8t}

Tabel 3.5
(Lanjutan)

Wilayah	Indeks Ketahanan Nasional		Indeks Ketahanan Nasional Gatra															
			Geografi		Demografi		SKA		Ideologi		Politik		Ekonomi		Sosial Budaya		Hankam	
	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor
Lampung	R _{9t}	IKP _{9t}	RG _{9t}	G _{9t}	RD _{9t}	D _{9t}	RA _{9t}	A _{9t}	RI _{9t}	I _{9t}	RP _{9t}	P _{9t}	RE _{9t}	E _{9t}	RS _{9t}	S _{9t}	RH _{9t}	H _{9t}
Bangka Belitung	R _{10t}	IKP _{10t}	RG _{10t}	G _{10t}	RD _{10t}	D _{10t}	RA _{10t}	A _{10t}	RI _{10t}	I _{10t}	RP _{10t}	P _{10t}	RE _{10t}	E _{10t}	RS _{10t}	S _{10t}	RH _{10t}	H _{10t}
Banten	R _{11t}	IKP _{11t}	RG _{11t}	G _{11t}	RD _{11t}	D _{11t}	RA _{11t}	A _{11t}	RI _{11t}	I _{11t}	RP _{11t}	P _{11t}	RE _{11t}	E _{11t}	RS _{11t}	S _{11t}	RH _{11t}	H _{11t}
DKI Jakarta	R _{12t}	IKP _{12t}	RG _{12t}	G _{12t}	RD _{12t}	D _{12t}	RA _{12t}	A _{12t}	RI _{12t}	I _{12t}	RP _{12t}	P _{12t}	RE _{12t}	E _{12t}	RS _{12t}	S _{12t}	RH _{12t}	H _{12t}
Jawa Barat	R _{13t}	IKP _{13t}	RG _{13t}	G _{13t}	RD _{13t}	D _{13t}	RA _{13t}	A _{13t}	RI _{13t}	I _{13t}	RP _{13t}	P _{13t}	RE _{13t}	E _{13t}	RS _{13t}	S _{13t}	RH _{13t}	H _{13t}
Jawa Tengah	R _{14t}	IKP _{14t}	RG _{14t}	G _{14t}	RD _{14t}	D _{14t}	RA _{14t}	A _{14t}	RI _{14t}	I _{14t}	RP _{14t}	P _{14t}	RE _{14t}	E _{14t}	RS _{14t}	S _{14t}	RH _{14t}	H _{14t}
DI Yogyakarta	R _{15t}	IKP _{15t}	RG _{15t}	G _{15t}	RD _{15t}	D _{15t}	RA _{15t}	A _{15t}	RI _{15t}	I _{15t}	RP _{15t}	P _{15t}	RE _{15t}	E _{15t}	RS _{15t}	S _{15t}	RH _{15t}	H _{15t}
Jawa Timur	R _{16t}	IKP _{16t}	RG _{16t}	G _{16t}	RD _{16t}	D _{16t}	RA _{16t}	A _{16t}	RI _{16t}	I _{16t}	RP _{16t}	P _{16t}	RE _{16t}	E _{16t}	RS _{16t}	S _{16t}	RH _{16t}	H _{16t}
Bali	R _{17t}	IKP _{17t}	RG _{17t}	G _{17t}	RD _{17t}	D _{17t}	RA _{17t}	A _{17t}	RI _{17t}	I _{17t}	RP _{17t}	P _{17t}	RE _{17t}	E _{17t}	RS _{17t}	S _{17t}	RH _{17t}	H _{17t}
NTB	R _{18t}	IKP _{18t}	RG _{18t}	G _{18t}	RD _{18t}	D _{18t}	RA _{18t}	A _{18t}	RI _{18t}	I _{18t}	RP _{18t}	P _{18t}	RE _{18t}	E _{18t}	RS _{18t}	S _{18t}	RH _{18t}	H _{18t}
NTT	R _{19t}	IKP _{19t}	RG _{19t}	G _{19t}	RD _{19t}	D _{19t}	RA _{19t}	A _{19t}	RI _{19t}	I _{19t}	RP _{19t}	P _{19t}	RE _{19t}	E _{19t}	RS _{19t}	S _{19t}	RH _{19t}	H _{19t}
Kalimantan Barat	R _{20t}	IKP _{20t}	RG _{20t}	G _{20t}	RD _{20t}	D _{20t}	RA _{20t}	A _{20t}	RI _{20t}	I _{20t}	RP _{20t}	P _{20t}	RE _{20t}	E _{20t}	RS _{20t}	S _{20t}	RH _{20t}	H _{20t}
Kalimantan Tengah	R _{21t}	IKP _{21t}	RG _{21t}	G _{21t}	RD _{21t}	D _{21t}	RA _{21t}	A _{21t}	RI _{21t}	I _{21t}	RP _{21t}	P _{21t}	RE _{21t}	E _{21t}	RS _{21t}	S _{21t}	RH _{21t}	H _{21t}
Kalimantan Timur	R _{22t}	IKP _{22t}	RG _{22t}	G _{22t}	RD _{22t}	D _{22t}	RA _{22t}	A _{22t}	RI _{22t}	I _{22t}	RP _{22t}	P _{22t}	RE _{22t}	E _{22t}	RS _{22t}	S _{22t}	RH _{22t}	H _{22t}
Kalimantan Selatan	R _{23t}	IKP _{23t}	RG _{23t}	G _{23t}	RD _{23t}	D _{23t}	RA _{23t}	A _{23t}	RI _{23t}	I _{23t}	RP _{23t}	P _{23t}	RE _{23t}	E _{23t}	RS _{23t}	S _{23t}	RH _{23t}	H _{23t}
Sulawesi Selatan	R _{24t}	IKP _{24t}	RG _{24t}	G _{24t}	RD _{24t}	D _{24t}	RA _{24t}	A _{24t}	RI _{24t}	I _{24t}	RP _{24t}	P _{24t}	RE _{24t}	E _{24t}	RS _{24t}	S _{24t}	RH _{24t}	H _{24t}
Sulawesi Tenggara	R _{25t}	IKP _{25t}	RG _{25t}	G _{25t}	RD _{25t}	D _{25t}	RA _{25t}	A _{25t}	RI _{25t}	I _{25t}	RP _{25t}	P _{25t}	RE _{25t}	E _{25t}	RS _{25t}	S _{25t}	RH _{25t}	H _{25t}
Sulawesi Barat	R _{26t}	IKP _{26t}	RG _{26t}	G _{26t}	RD _{26t}	D _{26t}	RA _{26t}	A _{26t}	RI _{26t}	I _{26t}	RP _{26t}	P _{26t}	RE _{26t}	E _{26t}	RS _{26t}	S _{26t}	RH _{26t}	H _{26t}
Sulawesi Tengah	R _{27t}	IKP _{27t}	RG _{27t}	G _{27t}	RD _{27t}	D _{27t}	RA _{27t}	A _{27t}	RI _{27t}	I _{27t}	RP _{27t}	P _{27t}	RE _{27t}	E _{27t}	RS _{27t}	S _{27t}	RH _{27t}	H _{27t}
Sulawesi Utara	R _{28t}	IKP _{28t}	RG _{28t}	G _{28t}	RD _{28t}	D _{28t}	RA _{28t}	A _{28t}	RI _{28t}	I _{28t}	RP _{28t}	P _{28t}	RE _{28t}	E _{28t}	RS _{28t}	S _{28t}	RH _{28t}	H _{28t}
Gorontalo	R _{29t}	IKP _{29t}	RG _{29t}	G _{29t}	RD _{29t}	D _{29t}	RA _{29t}	A _{29t}	RI _{29t}	I _{29t}	RP _{29t}	P _{29t}	RE _{29t}	E _{29t}	RS _{29t}	S _{29t}	RH _{29t}	H _{29t}
Maluku	R _{30t}	IKP _{30t}	RG _{30t}	G _{30t}	RD _{30t}	D _{30t}	RA _{30t}	A _{30t}	RI _{30t}	I _{30t}	RP _{30t}	P _{30t}	RE _{30t}	E _{30t}	RS _{30t}	S _{30t}	RH _{30t}	H _{30t}
Maluku Utara	R _{31t}	IKP _{31t}	RG _{31t}	G _{31t}	RD _{31t}	D _{31t}	RA _{31t}	A _{31t}	RI _{31t}	I _{31t}	RP _{31t}	P _{31t}	RE _{31t}	E _{31t}	RS _{31t}	S _{31t}	RH _{31t}	H _{31t}
Papua	R _{32t}	IKP _{32t}	RG _{32t}	G _{32t}	RD _{32t}	D _{32t}	RA _{32t}	A _{32t}	RI _{32t}	I _{32t}	RP _{32t}	P _{32t}	RE _{32t}	E _{32t}	RS _{32t}	S _{32t}	RH _{32t}	H _{32t}
Papua Barat	R _{33t}	IKP _{33t}	RG _{33t}	G _{33t}	RD _{33t}	D _{33t}	RA _{33t}	A _{33t}	RI _{33t}	I _{33t}	RP _{33t}	P _{33t}	RE _{33t}	E _{33t}	RS _{33t}	S _{33t}	RH _{33t}	H _{33t}

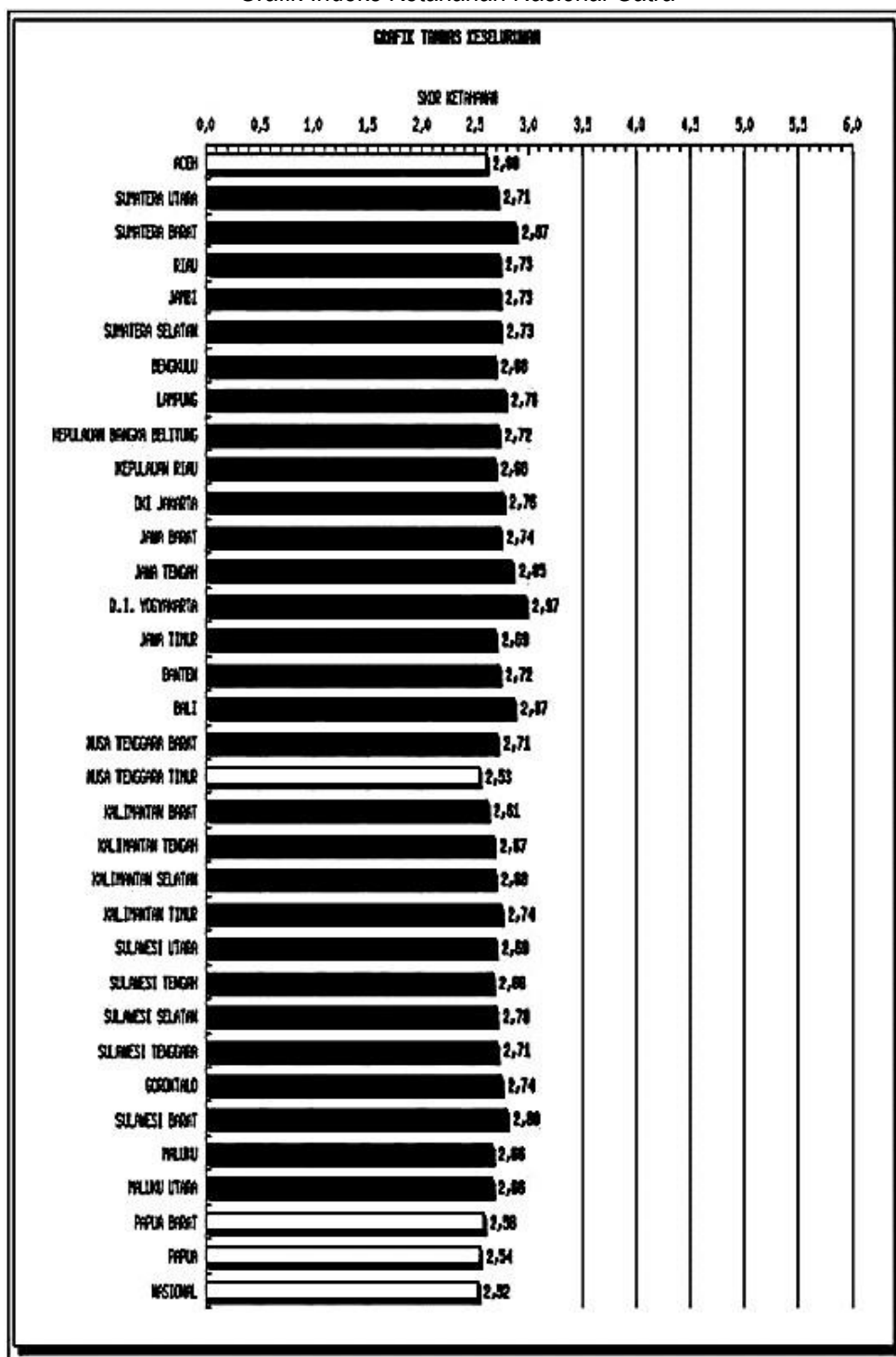
Keterangan:

IKNt = Indeks Ketahanan Nasional pada periode t

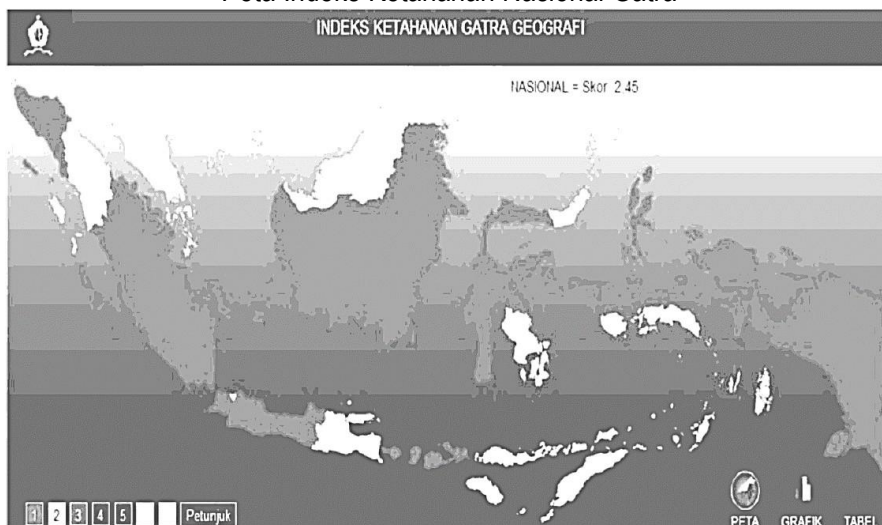
IKPit = Indeks Ketahanan Nasional provinsi ke-i pada periode t

Rit = rank Indeks Ketahanan Nasional provinsi ke- i pada periode t
 Gt = Indeks Ketahanan Nasional Gatra Geografi pada periode t
 Git = Indeks Ketahanan Nasional Gatra Geografi provinsi ke- i pada periode t
 Rgit = rank Indeks Ketahanan Nasional Gatra Geografi provinsi ke- i pada periode t
 Dt = Indeks Ketahanan Nasional Gatra Demografi pada periode t
 Dit = Indeks Ketahanan Nasional Gatra Demografi provinsi ke- i pada periode t
 Rdit = rank Indeks Ketahanan Nasional Gatra Demografi provinsi ke- i pada periode t
 At = Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sumber Kekayaan Alam pada periode t
 Ait = Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sumber Kekayaan Alam provinsi ke- i pada periode t
 Rait = rank Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sumber Kekayaan Alam provinsi ke- i pada periode t
 It = Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi pada periode t
 Lit = Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi provinsi ke- i pada periode t
 Rlit = rank Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi provinsi ke- i pada periode t
 Pt = Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik pada periode t
 Pit = Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik provinsi ke- i pada periode t
 Rpit = rank Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik provinsi ke- i pada periode t
 Et = Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi pada periode t
 Eit = Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi provinsi ke- i pada periode t
 Reit = rank Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi provinsi ke- i pada periode t
 St = Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya pada periode t
 Sit = Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya provinsi ke- i pada periode t
 RSit = rank Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya provinsi ke- i pada periode t
 Ht = Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan pada periode t
 Hit = Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan provinsi ke- i pada periode t
 RHit = rank Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan provinsi ke- i pada periode t

Gambar 3.4
Grafik Indeks Ketahanan Nasional Gatra



Gambar 3.5
Peta Indeks Ketahanan Nasional Gatra



Tabel 3.6
Indeks Ketahanan Nasional Variabel pada Periode t

No	Wilayah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra		Indeks Ketahanan Nasional Variabel							
				Variabel 1		Variabel 2			Variabel m		
		Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor		Rank	Skor	
1	Nasional	-	Ga _t	-	V _{1t}	-	V _{2t}		-	V _{mt}	
2	Aceh	RGa _{1t}	GA _{1t}	R _{1,1t}	V _{1,1t}	R _{1,2t}	V _{1,2t}		R _{1,mt}	V _{1,mt}	
3	Sumatera Utara	RGa _{2t}	GA _{2t}	R _{2,1t}	V _{2,1t}	R _{2,2t}	V _{2,2t}		R _{2,mt}	V _{2,mt}	
4	Sumatera Barat	RGa _{3t}	GA _{3t}	R _{3,1t}	V _{3,1t}	R _{3,2t}	V _{3,2t}		R _{3,mt}	V _{3,mt}	
5	Bengkulu	RGa _{4t}	GA _{4t}	R _{4,1t}	V _{4,1t}	R _{4,2t}	V _{4,2t}		R _{4,mt}	V _{4,mt}	
6	Jambi	RGa _{5t}	GA _{5t}	R _{5,1t}	V _{5,1t}	R _{5,2t}	V _{5,2t}		R _{5,mt}	V _{5,mt}	
7	Riau	RGa _{6t}	GA _{6t}	R _{6,1t}	V _{6,1t}	R _{6,2t}	V _{6,2t}		R _{6,mt}	V _{6,mt}	
8	Kepulauan Riau	RGa _{7t}	GA _{7t}	R _{7,1t}	V _{7,1t}	R _{7,2t}	V _{7,2t}		R _{7,mt}	V _{7,mt}	
9	Sumatera Selatan	RGa _{8t}	GA _{8t}	R _{8,1t}	V _{8,1t}	R _{8,2t}	V _{8,2t}		R _{8,mt}	V _{8,mt}	
10	Lampung	RGa _{9t}	GA _{9t}	R _{9,1t}	V _{9,1t}	R _{9,2t}	V _{9,2t}		R _{9,mt}	V _{9,mt}	
11	Bangka Belitung	RGa _{10t}	GA _{10t}	R _{10,1t}	V _{10,1t}	R _{10,2t}	V _{10,2t}		R _{10,mt}	V _{10,mt}	
12	Banten	RGa _{11t}	GA _{11t}	R _{11,1t}	V _{11,1t}	R _{11,2t}	V _{11,2t}		R _{11,mt}	V _{11,mt}	
13	DKI Jakarta	RGa _{12t}	GA _{12t}	R _{12,1t}	V _{12,1t}	R _{12,2t}	V _{12,2t}		R _{12,mt}	V _{12,mt}	
14	Jawa Barat	RGa _{13t}	GA _{13t}	R _{13,1t}	V _{13,1t}	R _{13,2t}	V _{13,2t}		R _{13,mt}	V _{13,mt}	
15	Jawa Tengah	RGa _{14t}	GA _{14t}	R _{14,1t}	V _{14,1t}	R _{14,2t}	V _{14,2t}		R _{14,mt}	V _{14,mt}	
16	DI Yogyakarta	RGa _{15t}	GA _{15t}	R _{15,1t}	V _{15,1t}	R _{15,2t}	V _{15,2t}		R _{15,mt}	V _{15,mt}	
17	Jawa Timur	RGa _{16t}	GA _{16t}	R _{16,1t}	V _{16,1t}	R _{16,2t}	V _{16,2t}		R _{16,mt}	V _{16,mt}	
18	Bali	RGa _{17t}	GA _{17t}	R _{17,1t}	V _{17,1t}	R _{17,2t}	V _{17,2t}		R _{17,mt}	V _{17,mt}	
19	NTB	RGa _{18t}	GA _{18t}	R _{18,1t}	V _{18,1t}	R _{18,2t}	V _{18,2t}		R _{18,mt}	V _{18,mt}	
20	NTT	RGa _{19t}	GA _{19t}	R _{19,1t}	V _{19,1t}	R _{19,2t}	V _{19,2t}		R _{19,mt}	V _{19,mt}	

Tabel 3.6
(Lanjutan)

No	Wilayah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra		Indeks Ketahanan Nasional Variabel							
				Variabel 1		Variabel 2			Variabel m		
		Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor		Rank	Skor	
21	Kalimantan Barat	RGa _{20t}	GA _{20t}	R _{20.1t}	V _{20.1t}	R _{20.2t}	V _{20.2t}		R _{20.mt}	V _{20.mt}	
22	Kalimantan Tengah	RGa _{21t}	GA _{21t}	R _{21.1t}	V _{21.1t}	R _{21.2t}	V _{21.2t}		R _{21.mt}	V _{21.mt}	
23	Kalimantan Timur	RGa _{22t}	GA _{22t}	R _{22.1t}	V _{22.1t}	R _{22.2t}	V _{22.2t}		R _{22.mt}	V _{22.mt}	
24	Kalimantan Selatan	RGa _{23t}	GA _{23t}	R _{23.1t}	V _{23.1t}	R _{23.2t}	V _{23.2t}		R _{23.mt}	V _{23.mt}	
25	Sulawesi Selatan	RGa _{24t}	GA _{24t}	R _{24.1t}	V _{24.1t}	R _{24.2t}	V _{24.2t}		R _{24.mt}	V _{24.mt}	
26	Sulawesi Tenggara	RGa _{25t}	GA _{25t}	R _{25.1t}	V _{25.1t}	R _{25.2t}	V _{25.2t}		R _{25.mt}	V _{25.mt}	
27	Sulawesi Barat	RGa _{26t}	GA _{26t}	R _{26.1t}	V _{26.1t}	R _{26.2t}	V _{26.2t}		R _{26.mt}	V _{26.mt}	
28	Sulawesi Tengah	RGa _{27t}	GA _{27t}	R _{27.1t}	V _{27.1t}	R _{27.2t}	V _{27.2t}		R _{27.mt}	V _{27.mt}	
29	Sulawesi Utara	RGa _{28t}	GA _{28t}	R _{28.1t}	V _{28.1t}	R _{28.2t}	V _{28.2t}		R _{28.mt}	V _{28.mt}	
30	Gorontalo	RGa _{29t}	GA _{29t}	R _{29.1t}	V _{29.1t}	R _{29.2t}	V _{29.2t}		R _{29.mt}	V _{29.mt}	
31	Maluku	RGa _{30t}	GA _{30t}	R _{30.1t}	V _{30.1t}	R _{30.2t}	V _{30.2t}		R _{30.mt}	V _{30.mt}	
32	Maluku Utara	RGa _{31t}	GA _{31t}	R _{31.1t}	V _{31.1t}	R _{31.2t}	V _{31.2t}		R _{31.mt}	V _{31.mt}	
33	Papua	RGa _{32t}	GA _{32t}	R _{32.1t}	V _{32.1t}	R _{32.2t}	V _{32.2t}		R _{32.mt}	V _{32.mt}	
34	Papua Barat	RGa _{33t}	GA _{33t}	R _{33.1t}	V _{33.1t}	R _{33.2t}	V _{33.2t}		R _{33.mt}	V _{33.mt}	

Keterangan:

Gat = Indeks Ketahanan Nasional Gatra nasional pada periode t

Gait = Indeks Ketahanan Nasional Gatra provinsi ke-i pada periode t

Rgait = rank Indeks Ketahanan Nasional Gatra provinsi ke-i pada periode t

Vmt = Indeks Ketahanan Nasional Variabel m nasional pada periode t

Vimt = Indeks Ketahanan Nasional Variabel m provinsi ke-i pada periode t

Rimt = rank Indeks Ketahanan Nasional Variabel m provinsi ke-i pada periode t

Gambar 3.6
Peta Indeks Ketahanan Variabel



Tabel 3.7
Indeks Ketahanan Indikator pada Periode t

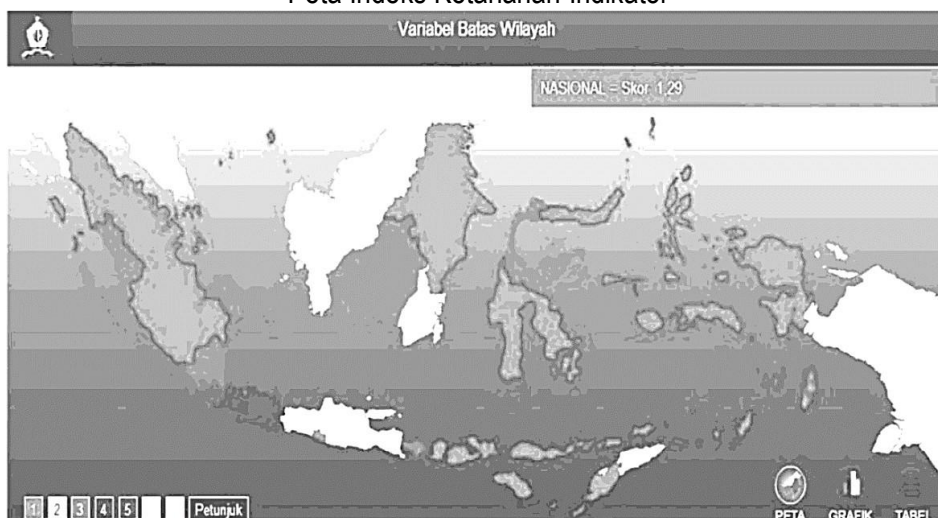
No	Wilayah	Indeks Ketahanan Variabel ...		Indeks Ketahanan Indikator							
		Rank	Skor	Indikator 1		Indikator 2			Indikator n		
				Rank	Skor	Rank	Skor		Rank	Skor	
1	Nasional	-	V_t	-	I_{1t}	-	I_{2t}		-	I_{nt}	
2	Aceh	R_{1t}	V_{1t}	$RI_{1.1t}$	$I_{1.1t}$	$RI_{1.2t}$	$I_{1.2t}$		$RI_{1.nt}$	$I_{1.nt}$	
3	Sumatera Utara	R_{2t}	V_{2t}	$RI_{2.1t}$	$I_{2.1t}$	$RI_{2.2t}$	$I_{2.2t}$		$RI_{2.nt}$	$I_{2.nt}$	
4	Sumatera Barat	R_{3t}	V_{3t}	$RI_{3.1t}$	$I_{3.1t}$	$RI_{3.2t}$	$I_{3.2t}$		$RI_{3.nt}$	$I_{3.nt}$	
5	Bengkulu	R_{4t}	V_{4t}	$RI_{4.1t}$	$I_{4.1t}$	$RI_{4.2t}$	$I_{4.2t}$		$RI_{4.nt}$	$I_{4.nt}$	
6	Jambi	R_{5t}	V_{5t}	$RI_{5.1t}$	$I_{5.1t}$	$RI_{5.2t}$	$I_{5.2t}$		$RI_{5.nt}$	$I_{5.nt}$	
7	Riau	R_{6t}	V_{6t}	$RI_{6.1t}$	$I_{6.1t}$	$RI_{6.2t}$	$I_{6.2t}$		$RI_{6.nt}$	$I_{6.nt}$	
8	Kepulauan Riau	R_{7t}	V_{7t}	$RI_{7.1t}$	$I_{7.1t}$	$RI_{7.2t}$	$I_{7.2t}$		$RI_{7.nt}$	$I_{7.nt}$	
9	Sumatera Selatan	R_{8t}	V_{8t}	$RI_{8.1t}$	$I_{8.1t}$	$RI_{8.2t}$	$I_{8.2t}$		$RI_{8.nt}$	$I_{8.nt}$	
10	Lampung	R_{9t}	V_{9t}	$RI_{9.1t}$	$I_{9.1t}$	$RI_{9.2t}$	$I_{9.2t}$		$RI_{9.nt}$	$I_{9.nt}$	
11	Bangka Belitung	R_{10t}	V_{10t}	$RI_{10.1t}$	$I_{10.1t}$	$RI_{10.2t}$	$I_{10.2t}$		$RI_{10.nt}$	$I_{10.nt}$	
12	Banten	R_{11t}	V_{11t}	$RI_{11.1t}$	$I_{11.1t}$	$RI_{11.2t}$	$I_{11.2t}$		$RI_{11.nt}$	$I_{11.nt}$	
13	DKI Jakarta	R_{12t}	V_{12t}	$RI_{12.1t}$	$I_{12.1t}$	$RI_{12.2t}$	$I_{12.2t}$		$RI_{12.nt}$	$I_{12.nt}$	
14	Jawa Barat	R_{13t}	V_{13t}	$RI_{13.1t}$	$I_{13.1t}$	$RI_{13.2t}$	$I_{13.2t}$		$RI_{13.nt}$	$I_{13.nt}$	
15	Jawa Tengah	R_{14t}	V_{14t}	$RI_{14.1t}$	$I_{14.1t}$	$RI_{14.2t}$	$I_{14.2t}$		$RI_{14.nt}$	$I_{14.nt}$	
16	DI Yogyakarta	R_{15t}	V_{15t}	$RI_{15.1t}$	$I_{15.1t}$	$RI_{15.2t}$	$I_{15.2t}$		$RI_{15.nt}$	$I_{15.nt}$	
17	Jawa Timur	R_{16t}	V_{16t}	$RI_{16.1t}$	$I_{16.1t}$	$RI_{16.2t}$	$I_{16.2t}$		$RI_{16.nt}$	$I_{16.nt}$	
18	Bali	R_{17t}	V_{17t}	$RI_{17.1t}$	$I_{17.1t}$	$RI_{17.2t}$	$I_{17.2t}$		$RI_{17.nt}$	$I_{17.nt}$	
19	NTB	R_{18t}	V_{18t}	$RI_{18.1t}$	$I_{18.1t}$	$RI_{18.2t}$	$I_{18.2t}$		$RI_{18.nt}$	$I_{18.nt}$	
20	NTT	R_{19t}	V_{19t}	$RI_{19.1t}$	$I_{19.1t}$	$RI_{19.2t}$	$I_{19.2t}$		$RI_{19.nt}$	$I_{19.nt}$	
21	Kalimantan Barat	R_{20t}	V_{20t}	$RI_{20.1t}$	$I_{20.1t}$	$RI_{20.2t}$	$I_{20.2t}$		$RI_{20.nt}$	$I_{20.nt}$	
22	Kalimantan Tengah	R_{21t}	V_{21t}	$RI_{21.1t}$	$I_{21.1t}$	$RI_{21.2t}$	$I_{21.2t}$		$RI_{21.nt}$	$I_{21.nt}$	
23	Kalimantan Timur	R_{22t}	V_{22t}	$RI_{22.1t}$	$I_{22.1t}$	$RI_{22.2t}$	$I_{22.2t}$		$RI_{22.nt}$	$I_{22.nt}$	
24	Kalimantan Selatan	R_{23t}	V_{23t}	$RI_{23.1t}$	$I_{23.1t}$	$RI_{23.2t}$	$I_{23.2t}$		$RI_{23.nt}$	$I_{23.nt}$	
25	Sulawesi Selatan	R_{24t}	V_{24t}	$RI_{24.1t}$	$I_{24.1t}$	$RI_{24.2t}$	$I_{24.2t}$		$RI_{24.nt}$	$I_{24.nt}$	
26	Sulawesi Tenggara	R_{25t}	V_{25t}	$RI_{25.1t}$	$I_{25.1t}$	$RI_{25.2t}$	$I_{25.2t}$		$RI_{25.nt}$	$I_{25.nt}$	
27	Sulawesi Barat	R_{26t}	V_{26t}	$RI_{26.1t}$	$I_{26.1t}$	$RI_{26.2t}$	$I_{26.2t}$		$RI_{26.nt}$	$I_{26.nt}$	
28	Sulawesi Tengah	R_{27t}	V_{27t}	$RI_{27.1t}$	$I_{27.1t}$	$RI_{27.2t}$	$I_{27.2t}$		$RI_{27.nt}$	$I_{27.nt}$	
29	Sulawesi Utara	R_{28t}	V_{28t}	$RI_{28.1t}$	$I_{28.1t}$	$RI_{28.2t}$	$I_{28.2t}$		$RI_{28.nt}$	$I_{28.nt}$	
30	Gorontalo	R_{29t}	V_{29t}	$RI_{29.1t}$	$I_{29.1t}$	$RI_{29.2t}$	$I_{29.2t}$		$RI_{29.nt}$	$I_{29.nt}$	
31	Maluku	R_{30t}	V_{30t}	$RI_{30.1t}$	$I_{30.1t}$	$RI_{30.2t}$	$I_{30.2t}$		$RI_{30.nt}$	$I_{30.nt}$	
32	Maluku Utara	R_{31t}	V_{31t}	$RI_{31.1t}$	$I_{31.1t}$	$RI_{31.2t}$	$I_{31.2t}$		$RI_{31.nt}$	$I_{31.nt}$	
33	Papua	R_{32t}	V_{32t}	$RI_{32.1t}$	$I_{32.1t}$	$RI_{32.2t}$	$I_{32.2t}$		$RI_{32.nt}$	$I_{32.nt}$	
34	Papua Barat	R_{33t}	V_{33t}	$RI_{33.1t}$	$I_{33.1t}$	$RI_{33.2t}$	$I_{33.2t}$		$RI_{33.nt}$	$I_{33.nt}$	

Keterangan:

- V_t = Indeks Ketahanan Nasional Variabel nasional pada periode t
 V_{it} = Indeks Ketahanan Nasional Variabel provinsi ke-i pada periode t
 R_{it} = rank Indeks Ketahanan Nasional Variabel provinsi ke-i pada periode t
 I_{nt} = Indeks Ketahanan Nasional Indikator n nasional pada periode t
 I_{int} = Indeks Ketahanan Nasional Indikator n provinsi ke-i pada periode t

R_{lint} = rank Indeks Ketahanan Nasional Indikator n provinsi ke-i pada periode t

Gambar 3.7
Peta Indeks Ketahanan Indikator



Tabel 3.8
Profil Ketahanan Nasional pada Periode t

	Nilai	Skor
Indeks Ketahanan Nasional	-	IKN_t
1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Geografi	-	G_{1t}
1.1 Variabel 1	-	V_{1t}
1. Indikator 1	NI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	I_{2t}
.....		
n.Indikatorn	NI_{nt}	I_{nt}
.....		
1.n Variabel n	-	V_{nt}
1. Indikator 1	NI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	I_{2t}
.....		
n. Indikatorn	NI_{nt}	I_{nt}
2. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Demografi	-	D_{1t}
2.1 Variabel 1	-	V_{1t}
1. Indikator 1	NI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	I_{2t}
.....		
n. Indikatorn	NI_{nt}	I_{nt}
.....		
2.n Variabel n	-	V_{nt}
1. Indikator 1	NI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	I_{2t}
.....		
n. Indikatorn	NI_{nt}	I_{nt}

Tabel 3.8
(Lanjutan)

	Nilai	Skor
3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra SKA	-	A_{1t}
3.1 Variabel 1	-	V_{1t}
1. Indikator 1	NI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	I_{2t}
n. Indikator n	NI_{nt}	I_{nt}
3.n Variabel n	-	V_{nt}
1. Indikator 1	NI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	I_{2t}
n. Indikator n	NI_{nt}	I_{nt}
4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	-	I_{1t}
4.1 Variabel 1	-	V_{1t}
1. Indikator 1	NI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	I_{2t}
n. Indikator n	NI_{nt}	I_{nt}
4.n Variabel n	-	V_{nt}
1. Indikator 1	NI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	I_{2t}
n. Indikator n	NI_{nt}	I_{nt}
5. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	-	P_{1t}
5.1 Variabel 1	-	V_{1t}
1. Indikator 1	NI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	I_{2t}
n. Indikator n	NI_{nt}	I_{nt}
5.n Variabel n	-	V_{nt}
1. Indikator 1	NI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	I_{2t}
n. Indikator n	NI_{nt}	I_{nt}
6. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	-	E_{1t}
6.1 Variabel 1	-	V_{1t}
1. Indikator 1	NI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	I_{2t}
n. Indikator n	NI_{nt}	I_{nt}
6.n Variabel n	-	V_{nt}
1. Indikator 1	NI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	I_{2t}
n. Indikator n	NI_{nt}	I_{nt}

Tabel 3.8
(Lanjutan)

	Nilai	Skor
7. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	-	S_{1t}
7.1 Variabel 1	-	V_{1t}
1. Indikator 1	NI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	I_{2t}
.....		
n. Indikator n	NI_{nt}	I_{nt}
.....		
7.n Variabel n	-	V_{nt}
1. Indikator 1	NI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	I_{2t}
.....		
n. Indikator n	NI_{nt}	I_{nt}
8. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	-	H_{1t}
8.1 Variabel 1	-	V_{1t}
1. Indikator 1	NI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	I_{2t}
.....		
n. Indikator n	NI_{nt}	I_{nt}
.....		
8.n Variabel n	-	V_{nt}
1. Indikator 1	NI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	I_{2t}
.....		
n. Indikator n	NI_{nt}	I_{nt}

Tabel 3.9
Profil Ketahanan Nasional di Wilayah pada Periode t

	Nilai	Rank	Skor
Indeks Ketahanan Nasional	-	R_t	IKP_t
1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Geografi	-	RG_{1t}	G_{1t}
1.1 Variabel 1	-	RV_{1t}	V_{1t}
1. Indikator 1	NI_{1t}	RI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	RI_{2t}	I_{2t}
.....			
n. Indikator n	NI_{nt}	RI_{nt}	I_{nt}
.....			
1.n Variabel n	-	RV_{nt}	V_{nt}
1. Indikator 1	NI_{1t}	RI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	RI_{2t}	I_{2t}
.....			
n. Indikator n	NI_{nt}	RI_{nt}	I_{nt}

Tabel 3.9
(Lanjutan)

	Nilai	Rank	Skor
Indeks Ketahanan Nasional	-	R_t	IKP_t
2. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Demografi	-	RD_{1t}	D_{1t}
2.1 Variabel 1	-	RV_{1t}	V_{1t}
1. Indikator 1	NI_{1t}	RI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	RI_{2t}	I_{2t}
.....			
n. Indikator n	NI_{nt}	RI_{nt}	I_{nt}
.....			
2.n Variabel n	-	RV_{nt}	V_{nt}
1. Indikator 1	NI_{1t}	RI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	RI_{2t}	I_{2t}
.....			
n. Indikator n	NI_{nt}	RI_{nt}	I_{nt}
3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra SKA	-	RA_{1t}	A_{1t}
3.1 Variabel 1	-	RV_{1t}	V_{1t}
1. Indikator 1	NI_{1t}	RI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	RI_{2t}	I_{2t}
.....			
n. Indikator n	NI_{nt}	RI_{nt}	I_{nt}
.....			
3.n Variabel n	-	RV_{nt}	V_{nt}
1. Indikator 1	NI_{1t}	RI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	RI_{2t}	I_{2t}
.....			
n. Indikator n	NI_{nt}	RI_{nt}	I_{nt}
4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	-	RI_{1t}	I_{1t}
4.1 Variabel 1	-	RV_{1t}	V_{1t}
1. Indikator 1	NI_{1t}	RI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	RI_{2t}	I_{2t}
.....			
n. Indikator n	NI_{nt}	RI_{nt}	I_{nt}
.....			
4.n Variabel n	-	RV_{nt}	V_{nt}
1. Indikator 1	NI_{1t}	RI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	RI_{2t}	I_{2t}
.....			
n. Indikator n	NI_{nt}	RI_{nt}	I_{nt}

Tabel 3.9
(Lanjutan)

	Nilai	Rank	Skor
Indeks Ketahanan Nasional	-	R_t	IKP_t
5. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	-	RP_{1t}	P_{1t}
5.1 Variabel 1	-	RV_{1t}	V_{1t}
1. Indikator 1	NI_{1t}	RI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	RI_{2t}	I_{2t}
n. Indikator n	NI_{nt}	RI_{nt}	I_{nt}
5.n Variabel n	-	RV_{nt}	V_{nt}
1. Indikator 1	NI_{1t}	RI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	RI_{2t}	I_{2t}
n. Indikator n	NI_{nt}	RI_{nt}	I_{nt}
6. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	-	RE_{1t}	E_{1t}
6.1 Variabel 1	-	RV_{1t}	V_{1t}
1. Indikator 1	NI_{1t}	RI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	RI_{2t}	I_{2t}
n. Indikator n	NI_{nt}	RI_{nt}	I_{nt}
6.n Variabel n	-	RV_{nt}	V_{nt}
1. Indikator 1	NI_{1t}	RI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	RI_{2t}	I_{2t}
n. Indikator n	NI_{nt}	RI_{nt}	I_{nt}
7. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	-	RS_{1t}	S_{1t}
7.1 Variabel 1	-	RV_{1t}	V_{1t}
1. Indikator 1	NI_{1t}	RI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	RI_{2t}	I_{2t}
n. Indikator n	NI_{nt}	RI_{nt}	I_{nt}
7.n Variabel n	-	RV_{nt}	V_{nt}
1. Indikator 1	NI_{1t}	RI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	RI_{2t}	I_{2t}
n. Indikator n	NI_{nt}	RI_{nt}	I_{nt}

Tabel 3.9
(Lanjutan)

	Nilai	Rank	Skor
Indeks Ketahanan Nasional	-	R_t	IKP_t
8. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Hankam	-	RH_{1t}	H_{1t}
8.1 Variabel 1	-	RV_{1t}	V_{1t}
1. Indikator 1	NI_{1t}	RI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	RI_{2t}	I_{2t}
.....			
n. Indikator n	NI_{nt}	RI_{nt}	I_{nt}
8.n Variabel n	-	RV_{nt}	V_{nt}
1. Indikator 1	NI_{1t}	RI_{1t}	I_{1t}
2. Indikator 2	NI_{2t}	RI_{2t}	I_{2t}
.....			
n. Indikator n	NI_{nt}	RI_{nt}	I_{nt}

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Naskah Lembaga Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional dibuat sebagai hasil revisi terakhir yang dilakukan pada tahun 2016 dengan harapan agar Naskah Lembaga ini dapat digunakan sebagai dasar dan rujukan dalam menyusun bahan ajar, kajian, dan ceramah, baik di lingkungan Lemhannas RI maupun di luar Lemhannas RI. Dengan demikian, akan terwujudlah kesamaan pemahaman terhadap Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanat Presiden Soekarno pada peresmian Lemhannas RI di Istana Negara, "Susunlah Pertahanan Nasional Bersendikan Karakteristik Bangsa." Jakarta: Departemen Penerangan RI, 20 Mei 1965.
- Caswell, H.D., dan Abraham Kaplan. 1970. *Power and Society*. New Haven: Yale University Press.
- Djalal, Gonggong A. 2006. *Menjadi Bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional di Tengah Krisis: Penglihatan Sejarah* Jakarta: t. p.
- Jakti, Dorodjatun K. 2014. *Menerawang Indonesia : Pada Dasawarsa Ketiga Abad Ke-21*. Jakarta : Pustaka Alvabet.
- Juergens, Hanco, 2005, Review of Haushofer, Karl, An English Translation of Major General Karl Ernst Haushofer's *Geopolitics of the Pacific Ocean and Studies in the Relationship Between Geography and History*, [online], (<https://www.hnet.otg/reviesw/showpdf.php?id=10738>, diakses tanggal 7 Desember 2016)
- Lemhannas RI. 2001. *Kewarganegaraan Jakarta*: Gramedia Pustaka Utama.
- Lemhannas RI. 2012. *Geostrategi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta.
- Monteiro, Josef M. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Membentuk Karakter Bangsa*. Yogyakarta : Deepublish.
- Neal R., Pierce. "Does *the Nation State Have a Future?*" *International Herald Tribune*, 4 April 1997.
- Pranowo, Bambang M. 2010. *Multidimensi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Spang, Christian W dan Igor Milovanovic. 2011, "An Introduction to Early 20th Century Geopolitics." *Outside the Box: Tsukuba Multilingual Forum (Special Section:Discussing Geopolitics). Volume 4, Issue 1*, https://www.academia.edu/1014552/Anintroduction_to_early_20th_century_Geopolitics diakses pada 7 Desember 2016.
- Sunardi, R.M. 1999. "Geostrategi Indonesia." Disiapkan khusus untuk bahan kuliah. Jakarta.
- Suradinata, Ermaya & Alex Dinuth. 2001. *Geopolitik & Konsepsi Ketahanan Nasional: Pemikiran Awal, Pengembangan, dan Prospek*. Jakarta: Paradigma Cipta Yatsigma.

Tuathail, G.O. 1996. *Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space*. Minneapolis: University of Minnesota Press (Volume 6 In the *Borderlines series*) and London: Routledge.

Usman, W. 1999. *Tinjauan Ilmiah Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional*. Jakarta Program PKN: Pascasarjana UI.